

**IDENTIFIKASI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DALAM
MENDUKUNG PENGEMBANGAN WILAYAH PEDESAAN DI
KECAMATAN LATIMOJONG KABUPATEN LUWU**



Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana
Jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar

Oleh

SITTI FAISAH A

NIM. 60800115102

JURUSAN TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

UIN ALAUDDIN MAKASSAR

TAHUN 2020

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Samata-Gowa,

Penyusun,

Sitti Faisah A

60800115102



PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Identifikasi Pembangunan Infrastruktur Dalam Mendukung
Pengembangan Wilayah Pedesaan di Kecamatan Latimojong
Kabupaten Luwu

Nama Mahasiswa : Sitti Faisah A

NIM : 60800115102

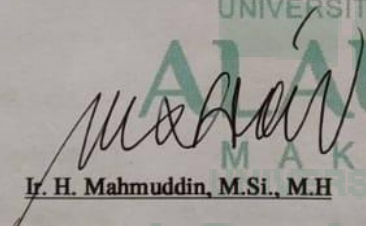
Jurusan : Perencanaan Wilayah dan Kota


Fakultas : Sains dan Teknologi

Disetujui Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II


Ir. H. Mahmuddin, M.Si., M.H


Iyan Awaluddin, S.T., M.T

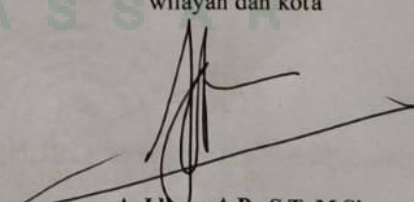
Mengetahui

Dekan Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar

Ketua Jurusan Teknik Perencanaan
wilayah dan kota



Dr. Muhammad Hafifah Mustami, M.Pd
P. 19710424 200903 1 001


A. Idham A.P., S.T., M.Si
NIP. 19761007 200912 1 002

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, "Identifikasi Pembangunan Infrastruktur Dalam Mendukung Pengembangan Wilayah Pedesaan di Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu" yang disusun oleh Sitti Faisah A, NIM: 60800115102, mahasiswa Jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 23 April 2020, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Perencanaan Wilayah Kota dalam Ilmu Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota, Jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota.

Makassar, 25 Agustus 2020

DEWAN PENGUJI:

Ketua : Dr. Fatmawati Nur, S.Si., M.Si.
 Sekretaris : Risnawati K, S.T., M.Si.
 Munaqisy I : Dr. H. Muhammad Anshar, S.Pt., M.Si.
 Munaqisy II : Juhanis, S.Sos., M.M.
 Pembimbing I : Ir. H. Mahmuddin, M.Si., M.H.
 Pembimbing II : Iyan Awaluddin, S.T., M.T.

Diketahui oleh:
 Dekan Fakultas Sains dan Teknologi
 UIN Alauddin Makassar,



Prof. Dr. Muhammad Halifah Mustami, M.Pd
 NIP. 197104212000051001

KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah *Subhanallahu Wataala* yang telah memberikan limpahan rahmat dan karuniah-Nya, sehingga penulis dapat merampungkan kripsi yang berjudul “Identifikasi Pembangunan Infrastruktur Dalam Mendukung Pengembangan Wilayah Pedesaan di Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu”. Penyusunan skripsi ini dilakukan untuk memenuhi persyaratan kelulusan Program Studi SI Jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota pada Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin. Tak lupa pula kiriman sholawat dan salam kepada baginda Rasulullah Muhammad *shallallahu alaihi wasallam*.

Penyusunan tugas akhir ini, penulis menyadari akan segala kekurangan namun berkat bantuan berbagai pihak sehingga segala kekurangan penulis dapat tertutupi. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Allah *Subhanallahu Wataala* yang telah memberikan kasih sayang, rahmat dan hidayah-Nya agar penulis dapat mengerjakan dan menyelesaikan penulisan skripsi ini.
2. Kepada kedua orang tuaku tercinta, ayahanda **Arsyad Tajangi** dan ibunda **Suriati** atas jasa, pengorbanan dukungan baik moril maupun materi serta doa yang tiada hentinya sejak penulis masih dalam kandungan hingga berhasil menyelesaikan studi di jenjang Universitas.

3. Rektor UIN Alauddin Makassar **Prof. Hamdan Juhanis M.A. PhD** serta seluruh jajarannya.
4. Bapak **Prof. Dr. Muhammad Khalifah Mustami, M.Pd.** selaku dekan Fakultas Sains dan Teknologi dan segenap wakil dekan serta seluruh staf di Fakultas Sains dan Teknologi.
5. Ayahanda **A. Idham A.P., S.T., M.Si.** dan Ibunda **Dr. Henny Haerany G, S.T., M.T** selaku ketua dan sekretaris Jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota serta beserta segenap para dosen dan staf lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
6. Dewan Pembimbing Bapak **Ir. H. Mahmuddin, M.Si., MH** selaku pembimbing I dan Bapak **Iyan Awaluddin, S.T., M.T** selaku pembimbing II, yang senantiasa meluangkan waktu untuk membimbing penulis dan membantu penyusunan hingga rampungnya Tugas Akhir ini.
7. Bapak **Dr. Muhammad Anshar, S.Pt., M.Si.** dan bapak **H. Juhanis, S.Sos., M.M** selaku penguji yang telah banyak memberikan pengarahan dan masukan kepada penulis selama penyusunan skripsi hingga selesai.
8. Seluruh Dosen, Staf Akademik, Staf Jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota, Staf Perpustakaan, Pengajar Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang telah memberikan bantuan dan bekal ilmu pengetahuan yang sangat berharga selama mengikuti perkuliahan.
9. Terima kasih kepada saudara saya **Nur Ila** dan **Assaat** selaku kaka kandung saya serta teman-teman yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu-persatu yang

telah banyak membantu, memberikan pengarahan, dan masukan kepada penulis dalam penyusunan skripsi.

10. Terimakasih kepada teman-teman angkatan saya **T.PWK 15 (Predator)** tanpa terkecuali yang telah menemani dalam suka maupun duka selama menempuh pendidikan di UIN Alauddin Makassar.

Penulis sepenuhnya sadar dalam penulisan penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan dan menjadi bahan pembelajaran bagi penulis untuk lebih giat dan teliti dalam proses penulisan penelitian ini. Saran dan kritik membangun sangat penulis harapkan untuk kelancaran dan kesempurnaan dari penulisan penelitian ini. Akhir kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan dalam penyusunan penelitian ini. Besar harapan penulis penelitian ini dapat bermanfaat bagi pembaca. Aamiin.

Wassalamu Alaikum Wr.Wb.

Makassar, April 2020

Sitti Faisah A

ABSTRAK

Nama Penulis : Sitti Faisah A
NIM : 60800115102
Judul Skripsi : **Identifikasi Pembangunan Infrastruktur Dalam Mendukung Pengembangan Wilayah Pedesaan di Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu**

Skripsi ini adalah identifikasi pembangunan infrastruktur di Kecamatan Latimojong dalam mendukung pengembangan wilayah pedesaan di Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu. Pokok permasalahannya adalah bagaimana ketersediaan dan kondisi Infrastruktur terhadap Pengaruh pengembangan wilayah pedesaan di Kecamatan Latimojong. Masalah ini dilihat dengan pendekatan sistem kewilayahan dan dibahas dengan metode kualitatif dan kuantitatif yaitu melalui metode analisis Skoring dan *Chi-Square*.

Potensi yang dimiliki Kecamatan Latimojong cukup besar salah satunya ialah potensi sektor pertanian, dimana sebagian besar penduduknya menggantungkan hidupnya di sektor tersebut dan mata pencaharian penduduk terbesar Kecamatan Latimojong adalah petani. Dalam mengidentifikasi pembangunan infrastruktur dalam mendukung pengembangan wilayah pedesaan merupakan langkah strategis dalam upaya mengetahui sejauh mana pengaruh pembangunan infrastruktur terhadap pengembangan wilayah pedesaan, karena pembangunan infrastruktur merupakan alat vital dalam meningkatkan perkonomian dan mampu memberikan kontribusi yang besar terhadap pengembangan wilayah pedesaan di Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu. Kecamatan Latimojong dengan ketersediaan infrastruktur yang memadai mampu menunjang pengembangan wilayah pedesaan dalam berbagai sektor serta mampu mendukung perekonomian masyarakat.

Kata Kunci: *Pengembangan Wilayah, Infrastruktur, Pembangunan, Pedesaan.*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Batasan Penelitian	6
D. Tujuan Penelitian	6
E. Manfaat Penelitian	7
F. Ruang Lingkup Pembahasan.....	7
1. Lingkup Wilayah	7
2. Lingkup Materi	7
G. Sistematika Pembahasan.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Definisi dan Konsep Pengembangan Wilayah.....	9
1. Definisi Pengembangan Wilayah.....	9
2. Teori-Teori Pengembangan Wilayah.....	11
3. Konsep Pengembangan Wilayah	13
4. Konsep Kewilayahan Struktur Tata Ruang.....	14
B. Definisi Desa dan Pedesaan	15
1. Karakteristik Wilayah Pedesaan	16
2. Tipologi Wilayah Pedesaan	25
3. Struktur Ruang Desa	31
C. Infrastruktur	33
1. Definisi Infrastruktur	33
2. Jenis-Jenis Infrastruktur	34
3. Kriteria Infrastruktur	36
4. Pengembangan Infrastruktur	37
D. Definisi Identifikasi	38
E. Definisi Pembangunan	40
F. Standar Pelayanan Minimum Infrastruktur.....	42
G. Penelitian Terdahulu	47
H. Kerangka Pikir	49
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Lokasi dan Waktu Penelitian	50
B. Jenis dan Sumber data.....	50
1. Jenis Data	50

2. Sumber Data.....	51
C. Metode Pengumpulan Data.....	52
D. Populasi Dan Sampel	53
E. Teknik Penarikan Sampel	54
F. Variabel Penelitian.....	55
G. Metode Pengolahan dan Analisis Data	56
H. Alur Analisis	67
I. Defenisi Operasional.....	68
J. Metode Kerja	71
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	72
A. Gambaran Umum Kabupaten Luwu	72
B. Gambaran Umum Kecamatan Latimojong	75
1. Letak Geografis dan Administratif	75
2. Kondisi Fisik Wilayah	77
3. Penggunaan Lahan	87
4. Aspek Kependudukan	88
C. Infrastruktur Yang Mendukung Pengembangan Wilayah Pedesaan di Kecamatan Latimojong.....	92
1. Jaringan Jalan.....	92
2. Jembatan	100
3. Irigasi Pedesaan	103
4. Jalan Tani	104
5. Air Bersih.....	108
6. Sanitasi.....	111
7. Telekomunikasi.....	114
8. Jaringan Listrik	115
D. Karakteristik Responden.....	115
E. Analisis Ketersediaan dan Kondisi Infrastruktur Dalam Mendukung Pengembangan Wilayah Pedesaan	118
1. Infrastruktur Pendukung Aksesibilitas.....	118
2. Infrastruktur Pendukung Pertanian	121
3. Infrastruktur Pemenuhan Dasar Masyarakat.....	124
F. Analisis Pengaruh Ketersediaan dan Kondisi Infrastruktur	
Dalam Mendukung Pengembangan Wilayah Pedesaan.....	133
1. Pengaruh Ketersediaan dan Kondisi Infrastruktur Pendukung Aksesibilitas.....	133
2. Pengaruh Ketersediaan dan Kondisi Infrastruktur	
Pendukung Pertanian	144
3. Pengaruh Ketersediaan dan Kondisi Infrastruktur	
Pemenuhan Dasar Masyarakat	154
G. Keterkaitan Infrastruktur Dalam Perspektif Islam	177
BAB V PENUTUP.....	186
A. Kesimpulan	186
B. Saran `	187
DAFTAR PUSTAKA	189
RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Standar Pelayanan Minimum Jalan	43
Tabel 2. Standar Pelayanan Minimum Irigasi Pedesaan	43
Tabel 3. Standar Pelayanan Minimum Jalan Tani.....	43
Tabel 4. Standar Pelayanan Minimum Air Bersih	44
Tabel 5. Standar Pelayanan Minimum Sanitasi	44
Tabel 6. Standar Pelayanan Minimum Telekomunikasi	46
Tabel 7. Standar Pelayanan Minimum Listrik.....	46
Tabel 8. Penelitian Terdahulu	47
Tabel 9. Variabel Penelitian	55
Tabel 10. Skoring Variabel Penelitian	57
Tabel 11. Metode Penscoringan (Skoring) untuk Infrastruktur	57
Tabel 12. Skoring pada Indikator Ketersediaan Jalan	59
Tabel 13. Skoring pada Indikator Kondisi Jalan	59
Tabel 14. Skoring pada Indikator Ketersediaan Jembatan	60
Tabel 15. Skoring pada Indikator Kondisi Jembatan	60
Tabel 16. Skoring pada Indikator Ketersediaan Irigasi Pedesaan	60
Tabel 17. Skoring pada Indikator Kondisi Irigasi Pedesaan	61
Tabel 18. Skoring pada Indikator Ketersediaan Jalan Tani.....	61
Tabel 19. Skoring pada Indikator Kondisi Jalan Tani.....	61
Tabel 20. Skoring pada Indikator Ketersediaan Air Bersih	62
Tabel 21. Skoring pada Indikator Kondisi Air Bersih	62
Tabel 22. Skoring pada Indikator Ketersediaan Sanitasi	62
Tabel 23. Skoring pada Indikator Kondisi Sanitasi.....	62
Tabel 24. Skoring pada Indikator Ketersediaan Telekomunikasi	63
Tabel 25. Skoring pada Indikator Kondisi Telekomunikasi	63
Tabel 26. Skoring pada Indikator Ketersediaan Listrik	63
Tabel 27. Skoring pada Indikator Kondisi Listrik.....	63
Tabel 28. Skala Nilai Hasil Uji Kontigensi.....	66
Tabel 29. Metode Kerja Penelitian.....	71
Tabel 30. Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Luwu Tahun 2018	73
Tabel 31. Luas Desa di Kecamatan Latimojong Tahun 2018.....	75
Tabel 32. Rata-Rata Curah Hujan di Kecamatan Latimojong Tahun 2018	85
Tabel 33. Luas Penggunaan Lahan Di Kecamatan Latimojong Tahun 2018	87
Tabel 34. Jumlah Penduduk Di Kecamatan Latimojong Tahun 2018	88
Tabel 35. Kepadatan Penduduk Di Kecamatan Latimojong Tahun 2018	89
Tabel 36. Penduduk Menurut Jenis Kelamin Di Kecamatan Latimojong Tahun 2018	90
Tabel 37. Penduduk Menurut Usia di Kecamatan Latimojong Tahun 2018	91

Tabel 38. Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian di Kecamatan Latimojong Tahun 2018.....	92
Tabel 39. Jenis Jalan Desa/Kelurahan di Kecamatan Latimojong	94
Tabel 40. Kondisi Jalan di Kecamatan Latimojong	95
Tabel 41. Jenis dan Kondisi Jembatan di Kecamatan Latimojong	100
Tabel 42. Jenis Jalan Tani di Kecamatan Latimojong.....	105
Tabel 43. Kondisi Jalan Tani di Kecamatan Latimojong.....	106
Tabel 44. Air Bersih di Kecamatan Latimoong	108
Tabel 45. Jenis Kelamin Responden	116
Tabel 46. Usia Responden.....	116
Tabel 47. Pendidikan Responden	117
Tabel 48. Pekerjaan Responden	117
Tabel 49. Kriteria Penilaian Indikator	118
Tabel 50. Skoring Pada Indikator Ketersediaan Jaringan Jalan	119
Tabel 51. Skoring Pada Indikator Kondisi Jaringan Jalan	119
Tabel 52. Skoring Pada Indikator Ketersediaan Jembatan.....	120
Tabel 53. Skoring Pada Indikator Kondisi Jembatan	121
Tabel 54. Skoring Pada Indikator Ketersediaan Irigasi pedesaan	121
Tabel 55. Skoring Pada Indikator Kondisi Irigasi Pedesaan.....	122
Tabel 56. Skoring Pada Indikator Ketersediaan Jalan Tani	123
Tabel 57. Skoring Pada Indikator Kondisi Jalan Tani.....	123
Tabel 58. Skoring Pada Indikator Ketersediaan Air Bersih	124
Tabel 59. Skoring Pada Indikator Kondisi Air Bersih	125
Tabel 60. Skoring Pada Indikator Ketersediaan Sanitasi	126
Tabel 61. Skoring Pada Indikator Kondisi Sanitasi	126
Tabel 62. Skoring Pada Indikator Ketersediaan Telekomunikasi	127
Tabel 63. Skoring Pada Indikator Kondisi Telekomunikasi	128
Tabel 64. Skoring Pada Indikator Ketersediaan Jaringan Listrik.....	129
Tabel 65. Skoring Pada Indikator Kondisi Jaringan Listrik.....	130
Tabel 66. Skoring Variabel Hasil Penelitian.....	131
Tabel 67. Tabulasi Silang Data Responden	134
Tabel 68. Uji Chi Kuadrat	134
Tabel 69. Tabulasi Silang Data Responden	136
Tabel 70. Uji Chi Kuadrat	137
Tabel 71. Tabulasi Silang Data Responden	139
Tabel 72. Uji Chi Cuadrat	139
Tabel 73. Tabulasi Silang Data Responden	141
Tabel 74. Uji Chi Kuadrat	142
Tabel 75. Tabulasi Silang Data Responden	144
Tabel 76. Uji Chi Kuadrat	145
Tabel 77. Tabulasi Silang Data Responden	147
Tabel 78. Uji Chi Kuadrat	147
Tabel 79. Tabulasi Silang Data Responden	149
Tabel 80. Uji Chi Kuadrat	150
Tabel 81. Tabulasi Silang Data Responden	152
Tabel 82. Uji Chi Kuadrat	152

Tabel 83. Tabulasi Silang Data Responden	154
Tabel 84. Uji Chi Kuadrat	155
Tabel 85. Tabulasi Silang Data Responden	157
Tabel 86. Uji Chi Kuadrat	157
Tabel 87. Tabulasi Silang Data Responden	160
Tabel 88. Uji Chi Kuadrat	160
Tabel 89. Tabulasi Silang Data Responden	162
Tabel 90. Uji Chi Kuadrat	163
Tabel 91. Tabulasi Silang Data Responden	165
Tabel 92. Uji Chi Kuadrat	165
Tabel 93. Tabulasi Silang Data Responden	168
Tabel 94. Uji Chi Kuadrat	168
Tabel 95. Tabulasi Silang Data Responden	170
Tabel 96. Uji Chi Kuadrat	171
Tabel 97. Tabulasi Silang Data Responden	173
Tabel 98. Uji Chi Kuadrat	173
Tabel 99. Rekap Hasil Uji Kontingensi Variable.....	175

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Peta Administrasi Kabupaten Luwu	74
Gambar 2 Peta Administrasi Kecamatan Latimojong	76
Gambar 3 Peta Ketinggian Kecamatan Latimojong	78
Gambar 4 Peta Kemiringan Lereng Kecamatan Latimojong	79
Gambar 5 Peta Geologi Kecamatan Latimojong	81
Gambar 6 Peta Jenis Tanah Kecamatan Latimojong	82
Gambar 7 Peta Hidrogeologi Kecamatan Latimojong	84
Gambar 8 Peta Curah Hujan Kecamatan Latimojong	86
Gambar 9 Jenis Jalan Kecamatan Latimojong	93
Gambar 10 Kondisi Jalan Kecamatan Latimojong	95
Gambar 11 Peta Jaringan Jalan Kecamatan Latimojong	97
Gambar 12 Peta Jenis Jalan Kecamatan Latimojong	98
Gambar 13 Peta Kondisi Jalan Kecamatan Latimojong	99
Gambar 14 Jembatan Kecamatan Latimojong	101
Gambar 15 Peta Jembatan Kecamatan Latimojong	102
Gambar 16 Irigasi Perdesaan Kecamatan Latimojong	104
Gambar 17 Jalan Tani Kecamatan Latimojong	106
Gambar 18 Peta Jalan Tani Kecamatan Latimojong	107
Gambar 19 Air Bersih Kecamatan Latimojong	109
Gambar 20 Peta Air Bersih Kecamatan Latimojong	110
Gambar 21 Persampahan Kecamatan Latimojong	112
Gambar 22 MCK Kecamatan Latimojong	112
Gambar 23 Saluran Pembuangan Limbah Kecamatan Latimojong	113
Gambar 24 Saptik Tank Kecamatan Latimojong	114
Gambar 25 Jaringan Listrik Kecamatan Latimojong	115

BAB I

PENDAHULUAN

A. *Latar Belakang*

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu aspek penting dan vital untuk mempercepat proses pembangunan nasional. Infrastruktur juga memegang peranan penting sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Ini mengingat gerak laju dan pertumbuhan ekonomi suatu negara tidak dapat dipisahkan dari ketersediaan infrastruktur seperti transportasi, telekomunikasi, sanitasi, dan energi. Oleh karena itu, pembangunan sektor ini menjadi pondasi dari pembangunan penggerak suatu wilayah.

Infrastruktur merujuk pada sistem fisik yang menyediakan transportasi, pengairan, drainase, bangunan-bangunan gedung dan fasilitas publik yang lain yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial dan ekonomi (Grigg, 1988) dalam (NSS Prapti, Suryawardana, & Triyani, 2015)

Kondisi infrastruktur di Indonesia khususnya kawasan perdesaan masih menjadi masalah yang sampai saat ini belum mampu diatasi, walaupun sejak pemerintahan Jokowi dalam hal ini nawa cita yang membangun dari pinggiran sudah di keluarkan dana minimal 1 milyar untuk setiap desa. Daerah perdesaan dipedalaman sangat jauh berbeda dalam hal pembangunan. Pembangunan merupakan suatu proses perubahan kearah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana. Pembangunan desa atau perdesaan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional mencakup pembangunan disegala bidang, baik fisik material maupun mental spiritual dalam satu kesatuan integras usaha yang

menyeluruh, terpadu, dan terkoordinasikan untuk memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam perkembangannya, pembangunan perdesaan yang telah banyak dilakukan sejak dari dahulu hingga sekarang, belum memberikan hasil yang memuaskan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat perdesaan. Pembangunan perdesaan seharusnya dilihat bukan hanya sebagai obyek tetapi juga sebagai subyek pembangunan. Pembangunan perdesaan harus mampu meraih aspek-aspek pertumbuhan, pemerataan, kesejahteraan dan keberlanjutan (Lutfi, 2013)

Menurut Adisasmita (2007) dalam Hermansyah et.al (2012) pengembangan wilayah pada kawasan perdesaan harus dipandang sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan kawasan perkotaan. Pemahaman yang menyeluruh dan tidak dikotomis ini menjadi penting dan mendasar dalam penyusunan peraturan atau aturan main yang berkaitan dengan perdesaan maupun perkotaan, agar terjadi sinergi dan keseimbangan perlakuan wilayah, khususnya oleh pelaku pembangunan.

Salah satu faktor penunjang dalam pengembangan wilayah perdesaan yaitu tersedianya infrastruktur perdesaan tersebut yang akan berpengaruh terhadap tata letaknya khususnya jika dihubungkan dengan distribusi penduduk atau pola permukiman, sehingga faktor jarak dan posisi serta aksesibilitas harus dipertimbangkan secara matang. Dari jenis infrastruktur tersebut, yang paling menentukan pola dan bentuk desa serta arah perkembangan adalah sistem jaringan transportasi.

Sarana penghubung juga akan berpengaruh terhadap pola fisik desa karena fungsinya yang vital untuk menghubungkan satu tempat ke tempat yang lain, untuk melaksanakan interaksi antara satu aktivitas dengan aktivitas lain (Lutfi, 2013).

Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS Saba'/34:18 berikut:

وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُورَى ظَاهِرَةً وَقَدَرْنَا فِيهَا السَّيْرَ سِيرُوا فِيهَا لَيَالٍ وَأَيَّامًا آمِنِينَ

Terjemahannya:

“Dan Kami jadikan antara mereka dan antara negeri-negeri yang Kami limpahkan berkat kepadanya, beberapa negeri yang berdekatan dan Kami tetapkan antara negeri-negeri itu (jarak-jarak) perjalanan. Berjalanlah kamu di kota-kota itu pada malam hari dan siang hari dengan dengan aman”.

Nikmat Allah kepada kaum saba' tidak hanya berupa sumber daya alam yang melimpah, tetapi juga letak geografis yang strategis sehingga transportasi antarwilayah, bahkan antarnegara, berjalan lancar. (Hidayatul Insan bi Tafsiril Qur'an / Marwan Hadidi bin Musa, M.Pd.I)

Allah menegaskan, 'dan kami jadikan antara mereka di yaman dan negeri-negeri yang kami berkahi, yakni negeri syam, beberapa negeri yang berdekatan, dan kami tetapkan antara negeri-negeri itu jarak-jarak perjalanan yang mudah dijangkau kapan saja. Berjalanlah kamu, yakni siapa pun yang berada di negeri-negeri itu pada malam dan siang hari dengan aman, tanpa perlu berhenti di padang pasir atau pun menghadapi kesulitan.

Dari ayat ini diperoleh pesan tentang pentingnya pembangunan infrastruktur dan jaminan rasa aman guna mendukung tercapainya kesejahteraan rakyat. Maka sebagai bukti keingkaran mereka atas nikmat-nimat Allah itu, mereka berkata, 'ya tuhan kami, jauhkanlah jarak perjalanan kami, yakni jarak antarwilayah dan

antarnegara, agar perjalanan menjadi panjang sehingga tidak banyak orang yang masuk ke negara kami dan orang-orang miskin tidak mampu menempuh jarak tersebut karena keterbatasan kendaraan mereka. Dengan begitu kami dapat memonopoli hasil negeri kami dan perdagangan, sehingga keuntungan kami lebih besar. "dan tanpa mereka sadari, permintaan tersebut justru menjadikan mereka menzalimi diri mereka sendiri karena mengakibatkan tertutupnya akses perdagangan antarnegara. Maka akibat kedurhakaan itu kami jadikan mereka bahan pembicaraan bagi generasi sesudah mereka dan kami hancurkan mereka sehancur-hancurnya sehingga mereka bertebaran ke berbagai daerah. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi setiap orang yang sabar dan bersyukur. (Hidayatul Insan bi Tafsiril Qur'an / Marwan Hadidi bin Musa, M.Pd.I)

Kabupaten Luwu berada dibagian utara dan timur Provinsi Sulawesi Selatan dan berbatasan dengan teluk Bone. Kabupaten Luwu memiliki luas wilayah kurang lebih 3.000,25 Km² dan secara administrasi terdiri atas 21 wilayah Kecamatan dengan jumlah Kelurahan/Desa sebanyak 227. Kabupaten luwu memiliki morfologi geografis yang unik karena diapit oleh pegunungan dan laut yang memanjang ke Utara dan menjadi keunggulan daerah oleh hal tersebut mengandung potensi bawah tanah yang besar, daratan yang subur dan laut yang kaya sumberdaya hayati. Dengan wilayah yang luas serta mencakupi dimensi dataran yang tinggi/pegunungan, dataran rendah serta pantai dan pesisir. Infrastruktur jalan merupakan salah satu masalah utama dalam pengembangan wilayah yang ada dikabupaten luwu. Sejumlah jalan yang menghubungkan kecamatan dengan ibu

kota kabupaten serta jalan yang menghubungkan kecamatan dengan kecamatan lainnya, memerlukan pengembangan agar optimal berfungsi.

Kecamatan Latimojong merupakan salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Luwu yang sampai saat ini kurang akan pembangunan infrastruktur. Kondisi infrastruktur di Kecamatan Latimojong sangat membutuhkan perhatian oleh pemerintah setempat, karena masih terdapat infrastruktur yang belum memadai salah satunya infrastruktur jalan yang masih belum layak. Kondisi jalan di Kecamatan Latimojong masih dalam keadaan buruk karena belum terdapat jalan yang beraspal maupun jalan yang berbeton, sehingga pada saat musim penghujan datang masyarakat sangat sulit untuk melakukan aktivitas transportasi karena kondisi jalan yang berlumpur. Oleh karena itu, untuk mendukung pengembangan wilayah pedesaan di Kecamatan Latimojong maka ketersediaan infrastruktur mutlak diperlukan dengan tingkat pelayanan infrastruktur yang baik agar perekonomian di Kecamatan Latimojong bisa lebih berkembang serta berpengaruh besar bagi kehidupan masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas maka diperlukan identifikasi infrastruktur yang dapat mengembangkan wilayah pedesaan. Oleh karena itu penelitian ini di fokuskan pada **“Identifikasi Pembangunan Infrastruktur Dalam mendukung Pengembangan Wilayah Pedesaan Di Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu”**.

B. *Rumusan Masalah*

1. Bagaimana ketersediaan dan kondisi infrastuktur dalam mendukung pengembangan wilayah pedesaan di Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu?
2. Bagaimana pengaruh ketersediaan dan kondisi infrastruktur dalam mendukung pengembangan wilayah pedesaan di Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu?

C. *Batasan Masalah*

Pembatasan suatu masalah digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah agar penelitian tersebut lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian akan tercapai. Beberapa Batasan maslaah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Infrastruktur pendukung aksesibilitas yang meliputi jaringan jalan dan jembatan.
2. Infrastruktur pendukung pertanian meliputi irigasi pedesaan dan jalan tani.
3. Infrastruktur kebutuhan masyarakat meliputi penyediaan air bersih, sanitasi, telekomunikasi, listrik.

D. *Tujuan Penelitian*

Adapun tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui ketersediaan dan kondisi infrastruktur dalam mendukung pengembangan wilayah pedesaan di Kecamatan Latimojong.
2. Untuk mengetahui pengaruh ketersediaan infrastruktur dalam mendukung pengembangan wilayah pedesaan di Kecamatan Latimojong.

E. *Manfaat Penelitian*

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah, swasta maupun masyarakat dalam pengembangan wilayah pedesaan di Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu
2. Penelitian ini diharapkan menjadi bahan rujukan untuk peneliti selanjutnya yang membahas tentang pembangunan infrastruktur.

F. *Ruang Lingkup Pembahasan*

1. Lingkup wilayah

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu.

2. Lingkup materi

Adapun pembahasan dalam penelitian ini adalah bagaimana ketersediaan dan kondisi infrastruktur serta pengaruh infrastuktur dalam mendukung pengembangan wilayah pedesaan di Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu.

G. *Sistematika Pembahasan*

Dalam penulisan penelitian ini dilakukan dengan mengurut data sesuai dengan tingkat kebutuhan dan kegunaannya, sehingga semua aspek yang dibutuhkan dalam proses selanjutnya terangkum secara sistematis. Adapun sistematika dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, maksud dan tujuan penelitian, ruang lingkup penelitian, sistematika penulisan dan kerangka berfikir.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas tentang teori-teori pedesaan, infrastuktur, dan pengembangan wilayah.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini membahas tentang lokasi dan waktu penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, tehnik pengumpulan data, tehnik analisis data dan kerangka berfikir.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan mengenai pembahasan-pembahasan tentang analisa ketersediaan dan kondisi infrastruktur di Kecamatan Latimojong serta analisa pengaruh ketersediaan dan kondisi infrastruktur.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. *Definisi dan Konsep Pengembangan Wilayah*

1. Definisi pengembangan wilayah

Pengertian perkembangan wilayah merupakan visi atau wujud masa depan suatu wilayah yang diinginkan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip dasar dari cita-cita luhur daerah tersebut, yang dibangun berdasarkan keputusan-keputusan yang bijaksana dari perpaduan antar ilmu pengetahuan dengan kemampuan sumberdaya alam serta interaksi antar seluruh komponen yang ada dalam wilayah tersebut.

Pengembangan wilayah adalah usaha untuk meningkatkan dan mengembangkan hubungan-hubungan interdependensi dan interaksi (saling membutuhkan dan saling menunjang) antara manusia dengan sistem lingkungan hidup dan sumberdaya alamnya (Ferry K. 1998:10).

Seorang perencana regional dari Inggris Boslow C yaitu (John G. 1997:15) yang pertama mengemukakan Perencanaan “Keseimbangan Regional.” Namun pengertian tentang keseimbangan tersebut oleh para ahli (diantaranya oleh Hall) tidak berhasil memberikan definisi yang memadai, karena pemahaman keseimbangan Boslow dari semua sektor ekonomi harus berkembang secara bersamaan bukan berazaskan pada kesamaan kesempatan bagi setiap daerah untuk mengatasi dan mengembangkan potensinya.

Apabila kita mengkaji persoalan-persoalan wilayah, maka dapat didefinisikan persoalan sebenarnya yaitu karena adanya penambahan

penduduk yang cepat namun tidak diimbangi dengan penyediaan kesempatan kerja, kemampuan untuk mengelola sumberdaya alam yang masih kurang serta penyediaan fasilitas sosial ekonomi yang belum memadai. Untuk itu agar tercipta hubungan yang memuaskan antara penduduk, pekerjaan dan lingkungan, maka perencanaan wilayah mutlak harus diarahkan kepada perencanaan pada tingkat lokal sehingga target pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja, serta penggunaan sumber daya secara efisien dapat mencapai tingkat output yang lebih tinggi dan pada akhirnya terjadi pertumbuhan secara seimbang antara manusia, pekerjaan dan lingkungan. Hal ini seperti yang digambarkan oleh Claudius Petit seorang pelopor Perencanaan Regional mengatakan bahwa “Arti sesungguhnya Perencanaan Regional adalah Perencanaan masyarakat kita sendiri” (Jhon Glasson, 1977:15)

Dengan mengacu dari keseluruhan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa perkembangan wilayah dilakukan untuk pengambilan suatu keputusan mengenai wilayah yang dikembangkan serta memilih sumber-sumber yang berpotensi tinggi, menentukan mana yang memiliki sumbangan yang paling besar dalam jangka pendek maupun jangka panjang, bagaimana perkembangan tersebut harus meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan masyarakat berupa ekonomi sosial, budaya serta fisik.

Pembangunan wilayah (regional) merupakan fungsi dari potensi sumberdaya alam, tenaga kerja dan sumberdaya manusia, investasi modal, prasarana dan sarana pembangunan, transportasi dan komunikasi, komposisi industri, teknologi, situasi ekonomi dan perdagangan antar wilayah.

Kemampuan pendanaan dan pembiayaan pembangunan daerah, kewirausahaan, kelembagaan daerah dan lingkungan pembangunan secara luas. Semua faktor diatas adalah penting, tetapi masih dianggap terpisah-pisah satu sama lain, dan belum menyatu sebagai komponen yang membentuk basis untuk penyusunan teori pembangunan wilayah secara komprehensif (Adisasmita Rahardjo, 2005: 22).

2. Teori-teori pengembangan wilayah

a. Teori kepemilikan sumber daya

Teori kepemilikan sumber daya atau *regional resource endowment* berargumen bahwa kemajuan ekonomi suatu wilayah bergantung pada sumber daya alam yang dimiliki wilayah tersebut dan juga bergantung pada permintaan (*demand*) terhadap komoditas yang dihasilkan oleh wilayah tersebut.

Tingkat *demand* terhadap sumber daya regional dipengaruhi oleh beberapa *variable* seperti tingkat dan distribusi penghasilan, pola perdagangan dan juga struktur produksi. Variabel-variabel tersebut dapat berubah sehingga kemudian mengubah keunggulan relative suatu wilayah dalam perannya memenuhi kebutuhan perekonomian regional dan nasional. Teori ini secara implisit berasumsi bahwa seiring dengan berjalannya waktu, suatu wilayah dapat mengakomodasi *demand* yang ada dengan cara menggeser alokasi penggunaan sumber dayanya untuk memproduksi barang dan jasa yang lain, sesuai dengan perkembangan pasar.

b. Teori *export base*

Teori *export base* atau disebut juga *economic base theory* pertama kali dikemukakan oleh Douglass C. North pada tahun 1955. Menurut North, pertumbuhan suatu wilayah, dalam jangka panjang, bergantung pada industri ekspornya. Pendorong yang paling kuat dalam perkembangan wilayah adalah demand eksternal untuk barang dan jasa yang diproduksi dan diekspor oleh wilayah tersebut. Demand ini mempengaruhi penggunaan modal, tenaga kerja dan teknologi dari wilayah tersebut dalam memproduksi komoditas ekspornya. Permintaan akan komoditas ekspor akan memperkuat perekonomian suatu wilayah baik dengan keterkaitan (*linkages*) ke depan (sektor jasa), maupun ke belakang (aktivitas produksinya)

c. Teori neoklasik

Teori pertumbuhan wilayah neoklasik dikembangkan oleh banyak ekonomi wilayah, di antaranya Borts (1960), Siebert (1969), dan Richardson (1973). Walaupun asumsi-asumsi yang digunakan diturunkan dari ide ekonomi neoklasik, terdapat biaya-biaya yang diasosiasikan dengan realokasi faktor-faktor produksi, dengan pergerakan barang, dan dengan transmisi informasi.

Menurut teori ini, pertumbuhan ekonomi regional sangat erat kaitannya dengan tiga faktor: lapangan kerja, modal, dan perkembangan teknologi. Pertumbuhan serta tingkat faktor-faktor ini akan menentukan tingkat pendapatan wilayah dan juga perekonomian wilayah. Jelas sekali bahwa teori ini mencoba menjelaskan bahwa disparitas pendapatan (*output*)

antarwilayah bergantung pada ketersediaan tenaga kerja, modal, dan teknologi. Teori ini menekankan pada perpindahan faktor-faktor tersebut (terutama modal dan tenaga kerja) antar wilayah. Tenaga kerja dan modal lebih bebas bergerak dalam suatu negara daripada antar negara, sehingga pengaruhnya cukup substansial dalam faktor pertumbuhan perekonomian wilayah. Model neoklasik juga berasumsi bahwa faktor harga memiliki fleksibilitas yang sempurna sehingga hal ini akan meniadakan perbedaan harga antar wilayah sehingga pada akhirnya akan terjadi konvergensi pendapatan perkapita.

3. Konsep pengembangan wilayah

Konsep perencanaan tata ruang wilayah mempunyai kaitan erat dengan konsep pengembangan wilayah dan kota. Konsep pengembangan wilayah telah dikembangkan antara lain oleh Sutami pada era 1970, dengan gagasan bahwa pembangunan infrastruktur yang intensif akan mampu mempercepat terjadinya pengembangan wilayah, juga Poernomosidhi (era transisi) memberikan kontribusi lahirnya konsep hirarki kota-kota yang hirarki prasarana jalan melalui Orde Kota. Pada era 90-an, konsep pengembangan wilayah mulai diarahkan untuk mengatasikesengjangan wilayah, missal antara KTI dan KBI, antar Kawasan dalam wilayah pulau, maupun antara Kawasan perkotaan dan perdesaan.

Konsep pengembangan wilayah dikembangkan dari kebutuhan suatu daerah untuk meningkatkan fungsi dan perannya dalam menata kehidupan sosial, ekonomi, budaya, Pendidikan dan kesejahteraan masyarakat. Konsep

pengembangan wilayah terbagi 3 kelompok yaitu konsep pusat pertumbuhan, konsep integrasi fungsional dan konsep pendekatan desentralisasi (Alkadri et al, Manajemen Teknologi Untuk Pengembangan Wilayah, 1999).

Konsep pusat pertumbuhan menekankan pada perlunya melakukan investasi secara besar-besaran pada suatu pusat pertumbuhan atau wilayah/kota yang telah mempunyai infrastruktur yang baik. Pengembangan wilayah di sekitar pusat pertumbuhan diharapkan melalui proses tetesan ke bawah (*trickle down effect*). Penerapan konsep ini di Indonesia telah melahirkan adanya 111 kawasan andalan dalam RTRWN.

Konsep integrasi fungsional mengutamakan adanya integrasi yang diciptakan secara sengaja diantara berbagai pusat pertumbuhan karena adanya fungsi yang komplementer. Konsep ini menemoatkan suatu kota atau wilayah mempunyai hirarki sebagai pusat pelayanan relative terhadap kota tau wilayah yang lain. Sedangkan konsep desentralisasi dimaksudkan untuk mencegah tidak terjadinya aliran keluar sumberdana dan sumberdaya manusia.

4. Konsep kewilayahan struktur tata ruang

Dalam suatu rung wilayah, pembentukan struktur ruang dilakukan dengan menata hierarki wilayah pemerintahan yang ada secara efesien berdasarkan hasil Analisa tentang struktur wilayah, dapat dibagi Kawasan yang berfungsi sebagai Pusat dan Sub Pusat. Tingkatan Pusat dan Sub Pusat dibentuk oleh perkembangan dan pertumbuhan wilayah itu sendiri. Sedangkan perkembangn dan pertumbuhan dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu:

- a. Keadaan fisik tanah yang meliputi topografi, sungai, geologi, kemampuan tanah dan sebagainya.
- b. Jumlah dan perkembangan penduduk.
- c. Kegiatan masyarakat, baik itu volume maupun manusia.
- d. Kelengkapan fasilitas, utilitas, dan sarana infrastruktur.

Adanya hoerarki suatu wilayah berarti ada keterkaitan suatu wilayah dengan wilayah lainnya. Wilayah yang memiliki hierarki lebih tinggi lebih besar pengaruh jangkauannya dan akan mempengaruhi wilayah yang hierarkinya lebih rendah.

B. Definisi Desa dan Pedesaan

Desa dan pedesaan telah menjadi objek kajian multi disiplin oleh berbagai bidang ilmu, seperti geografi, sosiologi, planologi, administrasi, lingkungan, pertanian, dan sebagainya. Istilah desa berasal dari bahasa india swadesi yang berarti tempat asal, tempat tinggal, Negara asal atau tanah leluhur yang merujuk batas yang jelas kesatuan hidup dengan kesatuan norma serta memiliki batas yang jelas (Yayuk dan Mangku, 2003).

Istilah pedesaan adalah bentuk pengembangan dari istilah desa yang lebih mengacup ada ciri-ciri wilayah yang lebih luas. Antonius T (2003) mengemukakan bahwa desa dan pedesaan sering dikaitkan dengan pengertian rural dan village yang dibandingkan dengan kota (city/town) dan perkotaan (urban). Konsep pedesaan dan perkotaan mengacu kepada karakteristik masyarakat sedangkan desa dan kota merujuk pada suatu satuan wilayah administrasi atau territorial, dalam hal ini pedesaan mencakup beberapa desa. (Muta'ali, 2016).

Desa bukan sekedar unit administratif, atau hanya permukiman penduduk, melainkan juga merupakan basis sumber daya ekonomi (tanah, sawah, sungai, ladang, kebun, hutan dan sebagainya), basis komunitas yang memiliki keragaman nilai-nilai lokal dan ikatan-ikatan sosial, ataupun basis pemerintahan yang mengatur dan mengurus sumber daya dan komunitas tersebut. (Muta'ali, 2016)

Selaras dengan prespektif tersebut, banyak defenisi tentang desa dan pedesaan yang telah dikemukakan para ahli. Secara umum defenisi tersebut dapat dikelompokkan menjadi beberapa aspek, diantaranya aspek bahasa, administrasi, aspek sosial kemasyarakatan, demografis dan aspek geografis. (Muta'ali, 2016)

1. Karakteristik wilayah pedesaan

Karakteristik desa adalah sesuatu yang melekat pada unsur-unsur desa yang merupakan penciri dan memberikan kekhususan atau perbedaannya, sehingga merupakan aspek yang melekat pada istilah yang disebut dengan Desa. Karakteristik ini dapat ditinjau dari segala aspek lingkungan fisik dan kehidupan masyarakat pada umumnya. Karakteristik tersebut antara lain wilayah dan masyarakat. (Muta'ali, 2016, p. 35)

a. Karakteristik wilayah

Karakteristik wilayah pedesaan dilihat dari aspek ruang dan lingkungan fisik wilayah pedesaan yang menjadi ciri khusus yang berbedabeda dengan wilayah lainnya khususnya perkotaan. Ruang dan wilayah pedesaan sebagai wadah kehidupan sosial ekonomi dan budaya masyarakatnya dapat dilihat dari kenampakan fisik wilayah seperti penggunaan lahan, karakteristik bangunan khususnya permukiman, dan

sarana prasarana wilayah. Hal ini juga tercermin pula dari definisi kawasan pedesaan, yaitu sebagai wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman pedesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.

1) Penggunaan lahan

Analisis penggunaan lahan wilayah pedesaan berhubungan dengan letak dan posisi geografis desa tersebut baik secara morfologi bentuk lahan maupun aksesibilitasnya terhadap wilayah perkotaan. Desa yang terletak di pegunungan sangat berbeda penggunaan lahannya desa pesisir, demikian pula dengan desa di perkotaan (kelurahan) dengan desa di daerah yang terisolir. Semakin posisi geografisnya mendekati dataran dan pesisir serta perkotaan, maka pola penggunaan lahannya semakin beragam (heterogen) dan intensitasnya semakin tinggi.

Penggunaan lahan sebagai salah satu produk hasil interaksi kegiatan manusia di permukaan bumi menunjukkan variasi yang sangat besar dan dapat digunakan untuk melakukan diferensiasi struktur keruangannya. Bentuk-bentuk penggunaan lahan yang mewarnai daerah terbangun (built-up area) open space, green area dapat digunakan untuk membedakan jenis penggunaan lahans ebagai penentu kawasan pedesaan dan kawasan perkotaan.

Dalam membahas pendekatan morfologikal, selalu ditekankan pada aspek fisik dan satu diantaranya adalah penggunaan lahan dan jenis

penggunaan lahan di pedesaan selalu berasosiasi dengan kegiatan pertanian. Secara umum penggunaan lahan di wilayah pedesaan memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a) Memiliki fungsi ruang terbuka (open space) lebih luas dibandingkan areal terbangun (built-up area).
- b) Memiliki green area yang lebih luas, baik yang bersifat lindung seperti hutan dan vegetasi lindung lainnya, padang rumput, maupun areal pertanian khususnya sawah.
- c) Areal penggunaan lahan memungkinkan berkembangnya keanekaragaman hayati baik flora maupun fauna.
- d) Penggunaan lahan didominasi peruntukkan lahan pertanian, baik lahan basah maupun lahan kering, termasuk perkebunan, dan perikanan (tambak).
- e) Penggunaan lahan untuk areal permukiman dan sarana dan prasarana lainnya jauh lebih rendah dibandingkan areal terbuka hijau.
- f) Jenis-jenis penggunaan lahan yang berkembang memiliki tingkat heterogenitas yang lebih rendah dibanding wilayah perkotaan.

Ciri-ciri tersebut di atas tidak berlaku bagi desa-desa yang berada di wilayah perkotaan atau kelurahan.

2) Bangunan dan Permukiman

Indikator bangunan dan permukiman di wilayah pedesaan dapat diamati dari luas dan ketinggian, kepadatan, dan jenis bahan bangunan serta peruntukkan bangunan. Beberapa ciri-ciri tersebut diantaranya:

- a) Dalam setiap area bangunan, building coverage ratio (BCR) menunjukkan bahwa luas bangunan lebih rendah dibanding areal yang akan dibangun atau areal terbukanya termasuk areal resapan.
- b) Bangunan pedesaan umumnya berlantai satu dengan ketinggian yang relatif rendah.
- c) Tingkat kepadatan bangunan dan permukiman rendah
- d) Jenis bahan bangunan sebagian besar menyesuaikan dengan kondisi lingkungannya dan banyak terbuat dari bahan-bahan alam sekitarnya.
- e) Bentuk-bentuk bangunan masih terikat dengan nilai-nilai budaya masyarakatnya (tradisional)
- f) Peruntukkan bangunan relative sederhana (tidak kompleks) yang terdiri dari permukiman dan fasilitas bersama (pendidikan, kesehatan, tempat ibadah, dan kantor desa).

3) Sistem sarana dan prasarana wilayah

Sistem sarana dan prasarana wilayah yang penting dan mencerminkan karakter pedesaan adalah sistem sarana transportasi sarana pertanian khusus irigasi, listrik, komunikasi, dan sanitasi

lingkungan. Disamping itu juga sarana dan prasarana dasar seperti pendidikan dan kesehatan.

Dalam hal ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana tersebut, terdapat perbedaan bahkan kesenjangan yang besar antara desa yang berada di kota (kelurahan) dengan yang diluar wilayah perkotaan. Di Indonesia kesenjangan juga terjadi antara desa-desa di Pulau Jawa-Bali dengan luar Pulau Jawa. Dalam hal ini ketersediaan, bisa dipastikan bahwa jumlah sarana dan prasarana wilayah pedesaan jauh lebih rendah dibanding perkotaan, demikian pula halnya dengan kualitas yang kurang memadai.

Secara spasial sebaran penduduk wilayah pedesaan umumnya terpecah, menyebabkan tingginya biaya dan kesulitan, serta mahalhnya penyediaan sarana dan prasarana barang dan jasa publik.

4) Peruntukan Ruang

Berdasarkan ciri sebelumnya, pedesaan memiliki sumber daya pertanian dan lingkungan hidup sebagai penyangga kehidupan dan perekonomian masyarakat. Desa memiliki peranganda sebagai penopang interaksisosial dan peningkatan kesejahteraan, juga sebagai penyeimbang ekosistem lingkungan yang berpengaruh terhadap kelangsungan hidup manusia. Peran sumber daya dan lingkungan hidup kerap kali menjadi hambatan dalam pengembangan pertanian, melalui kearifan dan pendekatan lingkungan yang berkelanjutan pembangunan desa dewasa ini sangat penting untuk kelestarian alam.

Sesuai dengan tujuan pengembangan kawasan pedesaan, pola peruntukkan ruang desa cenderung untuk zona konversasi dan fungsi lindung. Hal ini tercermin dari tujuan peruntukkan ruang kawasan pedesaan yaitu:

- a) Mengatur pemanfaatan ruang kawasan pedesaan guna meningkatkan kemakmuran rakyat dan mencegah serta menanggulangi dampak negatif terhadap lingkungan buatan dan lingkungan sosial.
- b) Meningkatkan fungsi kawasan pedesaan secara serasi, selaras dan seimbang antara perkembangan lingkungan dan tata kehidupan masyarakat.
- c) Mencapai tata ruang pedesaan yang optimal, serasi, selaras, dan seimbang dalam pengembangan kehidupan masyarakat.
- d) Mendorong dinamika kegiatan pembangunan di pedesaan sehingga dicapai kehidupan pedesaan yang berkeadilan serta menunjang pelestarian budaya.
- e) Menciptakan keterkaitan fungsional antara kawasan pedesaan dan perkotaan.
- f) Mengendalikan konversi pemanfaatan ruang berskala besar
- g) Mencegah kerusakan lingkungan
- h) Meningkatkan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya buatan secara tepat.

- i) Mewujudkan lingkungan perumahan dan permukiman yang layak, sehat, aman serasi dan teratur.
- j) Meningkatkan perekonomian masyarakat kawasan pedesaan.

Selain indikator-indikator objektif tersebut di atas, kawasan pedesaan dipersepsikan secara subjektif sebagai daerah hijau dengan iklim yang nyaman, pemandangan menarik dengan hamparan sawah yang hijau dan teratur, berlatarkan gunung dan perbukitan serta sungai-sungainya yang mengalir jernih.

b. Karakteristik Masyarakat

Dalam kajian kemasyarakatan, sering dibedakan antara masyarakat pedesaan (rural community) dan masyarakat perkotaan (urban community). Menurut Soekanto (1994), perbedaan tersebut sebenarnya tidak mempunyai hubungan dengan pengertian masyarakat sederhana, karena dalam masyarakat modern, betapa pun kecilnya suatu desa, pasti ada pengaruh-pengaruh dari kota. Demikian pula sebaliknya dalam masyarakat perkotaan akan tetap dapat ditemui karakter desa. (Muta'ali, 2016, p. 49)

Soemardjan, (1993) menyebutkan bahwa tata hidup “ruralisme” masih berlaku kental pada masyarakat di kawasan pedesaan, walaupun diakui bahwa ada kecenderungan pergeseran ke arah “urbanisme” yang dimaksud dengan ruralisme disini adalah tata hidup masyarakat di kawasan pedesaan yang pada dasarnya merupakan tata hidup agraris yang berpegangan kuat pada adat yang diturunkan dari generasi kepada generasi berikutnya tanpa banyak perubahan.

Terdapat banyak pendapat tentang perbedaan masyarakat desa dan kota, namun umumnya untuk membedakannya dapat diukur dengan sejumlah indikator. Sorokin dan Zimerman dalam T.L Smith dan P.E Zop (1970) mengemukakan sejumlah faktor, yaitu mata pencaharian, ukuran komunitas, tingkat kepadatan penduduk, lingkungan, diferensiasi sosial, stratifikasi sosial, interaksi sosial dan solidaritasi sosial.

Ciri awal masyarakat desa umumnya hidup dalam kondisi sosial ekonomi rendah dengan mata pencaharian sangat tergantung dari kondisi geografis wilayahnya, seperti usaha pertanian, peternakan, nelayan dan petambak, kerajinan tangan dan pedagang kecil. Ukuran komunitas relative kecil dan homogen, memegang teguh tradisi, nilai-nilai dan adat istiadat secara turun temurun. Beberapa ciri lainnya dapat di deskripsikan sebagai berikut (Khairuddin, 1997):

- 1) Pekerjaan (*occupation*). Pada umumnya pekerjaan di desa masih banyak tergantung kepada alam (tanaman dan hewan) dan bersifat homogen, khususnya dibidang pertanian (usaha tani, peternakan, perikanan).
- 2) Ukuran masyarakat (*size of community*) pedesaan relatif kecil, karena terkait dengan keseimbangan antara potensi alam dan penduduknya.
- 3) Kepadatan penduduk (*density of population*) masih rendah baik dalam pengertian rasio penduduk dengan luas wilayah maupun rasio antara tempat tinggal dibandingkan dengan luas wilayah, dimana umumnya disekitar rumah masih dikelilingi lahan pertanian.

- 4) Lingkungan (environment) baik dalam pengertian lingkungan fisik, lingkungan biologis, maupun lingkungan sosial budaya masih terjaga dan dengan baik sehingga tercipta hubungan lingkungan yang relatif lebih harmonis antara lingkungan fisik dan lingkungan sosial budaya.
- 5) Diferensiasi sosial rendah. Diferensiasi sosial dipengaruhi oleh banyaknya kelompok sosial dan struktur sosial yang ada.
- 6) Mobilitas sosial masyarakat pedesaan relative rendah dan stagnan. Smith (1951) melukiskan masyarakat pedesaan seperti “air tenang dalam sebuah ember”, sedangkan masyarakat perkotaan seperti “air mendidih dalam ketel”.
- 7) Interaksi sosial adalah hubungan sosial yang dinamis, yang menyangkut hubungan antara perorangan, antara kelompok manusia, dan antara perorangan dengan kelompok.
- 8) Solidaritas sosial masyarakat pedesaan sangat kuat karena adanya kesamaan ciri sosial ekonomi budaya bahkan tujuan hidup.
- 9) Kontrol sosial (social control) masyarakat pedesaan sangat kuat terkait dengan pranata-pranata sosial berupa norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.
- 10) Tradisi lokal masyarakat masih kuat. Hidup di desa banyak berkaitan dengan tradisi, nilai, norma adat yang telah berkembang secara turun menurun dari satu generasi ke generasi berikutnya sehingga masyarakat desa cenderung statis.

2. Tipologi wilayah perdesaan

Peraturan pemerintah Nomor 72 tahun 2005 menyebutkan bahwa pembentukan desa harus memenuhi syarat diantaranya jumlah penduduk, luas wilayah, bagian wilayah kerja, perangkat dan sarana dan prasarana pemerintahan. Tipologi wilayah pedesaan adalah kegiatan pengelompokan desa-desa berdasarkan kesamaan ciri-ciri wilayah dan masyarakatnya untuk mencapai tujuan tertentu. Misalnya, berdasarkan ciri-ciri mata pencaharian masyarakat pedesaan dapat ditentukan beberapa tipe desa seperti, desa nelayan, desa pertanian, desa hutan, dan sebagainya.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan mendefinisikan Tipologi Desa/Kelurahan adalah kondisi spesifik keunggulan potensi sumber daya alam, sumberdaya manusia dan potensi kelembagaan serta potensi prasarana dan sarana dalam menentukan arah pengembangan dan pembinaan masyarakat berdasarkan karakteristik keunggulan komparatif dan kompetitif dari setiap desa dan kelurahan.

Asumsi dasar yang dikembangkan didalam penyusunan tipologi wilayah desa adalah setiap desa memiliki karakteristik yang bervariasi, setiap desa yang memiliki karakteristik yang sama dikelompokkan kedalam satu tipologi wilayah yang sama. Masing-masing tipologi desa memiliki potensi dan permasalahan yang berbeda sehingga dapat digunakan sebagai dasar pada intervensi pembangunan yang seharusnya juga bervariasi.

Berdasarkan keragaman indikator tersebut dan mempertimbangkan variasi karakteristiknya, maka desa-desa di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi beberapa bagian dengan mendasarkan kesamaan lingkungan fisik, sosial budaya masyarakat, posisi geografis terhadap kota, spasial, administrasi bahkan mendasarkan pada tingkat perkembangan desa.

a. Tipologi desa berdasarkan aspek lingkungan fisik

Pengelompokan desa berdasarkan letak dan posisi geografis desa khususnya aspek bentang lahan di permukaan bumi, seperti pegunungan, perbukitan, dataran, pantai atau pesisir. Tipologi lingkungan fisik berkaitan dengan kandungan potensi sumber daya alam, khususnya aspek biotik (flora dan fauna) dan abiotik (tanah dan air) yang pada akhirnya menentukan potensi sumber daya alam dan tingkat produktivitas desa. Tipologi desa dan kelurahan berdasarkan lingkungan fisik wilayah terdiri atas

1) Tipologi desa pegunungan;

Desa-desa ini memiliki curah hujan yang tinggi dan potensi sumberdaya air yang cukup melimpah sehingga memiliki potensi sumberdaya alam khususnya tanaman perkebunan dan holtikultura yang potensial, selain iklimnya memenuhi syarat bagi pengembangan peternakan bahkan akhirakhir ini dikembangkan untuk pariwisata.

2) Tipologi desa dan kelurahan dataran;

Tipologi desa dataran tergolong paling luas dan banyak ditinggali penduduk dengan kepadatan yang tinggi. Dalam lingkup, desa-desa ini berada di daerah hilir dan selalu berasosiasi dengan keberadaan sungai

yang menjadi sumber kehidupan. Potensi air cukup melimpah sehingga daerah dataran banyak digunakan untuk permukiman dan kegiatan lainnya seperti pertanian, industri, perdagangan, dan jasa lainnya.

3) Tipologi desa dan kelurahan pesisir / pantai;

Tipologi desa pesisir atau pantai adalah kelompok desa yang keberadaannya sangat dipengaruhi oleh ekologi laut. Potensi ekonomi desa pesisir/pantai sangat ditentukan oleh tingkat perkembangan wilayahnya, selain itu potensi desa pesisir juga ditentukan morfologi dan bentuk pantai, seperti pantai berpasir dan berbatu atau morfologi datar dan tebing curam.

4) Tipologi desa pulau-pulau kecil;

Kelompok desa ini berada di pulau kecil yang umumnya terpencil dan terpisah dari dataran luas oleh lautan luas. Kegiatan ekonomi potensial adalah sektor perikanan kelautan dan pariwisata.

b. Tipologi desa berdasarkan aspek posisi geografis terhadap pusat pertumbuhan (kota)

Tipologi ini ditetapkan dengan mendasarkan asumsi bahwa desa-desa yang berada di pusat pertumbuhan memiliki tingkat perkembangan tertinggi dan kemudian perkembangannya menurun seiring dengan menjauhnya jarak desa tersebut terhadap pusat pertumbuhan (kota). Tipologi desa dan kelurahan berdasarkan posisi geografis terhadap pusat pertumbuhan terdiri atas;

1) Tipologi desa dan kelurahan di kota (urban);

Sebagian besar 80% penduduk bekerja disektor non pertanian. Dalam terminologi administrative pemerintah desa-desa ini lebih banyak disebut dengan kelurahan. Terkecuali pertanian, semua sektor ekonomi dapat tumbuh dan berkembang dengan baik pada tipologi desa ini sehingga memungkinkan memiliki potensi ekonomi dan pendapatan perkapita terbesar.

2) Tipologi desa dan kelurahan di pinggiran kota;

Desa-desa ini memiliki ciri-ciri jumlah penduduk dan perkembangan permukiman mengalami perkembangan tinggi akibat perluasan kota. Potensi ekonomi desa dipinggiran sangat dipengaruhi oleh kegiatan ekonomi kota. Berdasarkan karakteristiknya, desa-desa tipologi inilah yang sangat potensial untuk terjadinya perubahan dari status desa menjadi kelurahan.

3) Tipologi desa dan kelurahan di koridor antar kota;

Desa-desa ini memiliki kesamaan karakter dengan desa dipinggiran kota (dalam hal demografis dan penggunaan lahan), namun berbeda pemicu perkembangan wilayahnya yaitu keberadaan akses transportasi jalan yang menjadikan desa ini memiliki potensi untuk berkembang lebih cepat. Potensi ekonomi yang dikembangkan sangat bergantung kepada potensi lokal dan rencana pengembangan wilayah, seperti kawasan industri, perdagangan, pergudangan, kawasan permukiman dan lain sebagainya. Desa ini bisa menjadi penghubung ekonomi antara kota dan desa.

4) Tipologi desa dan kelurahan di pedesaan;

Desa-desaini menjadi pendukung dari keberadaan kota, khususnya supporting terhadap komoditas pertanian dan mobilitas penduduk. Desa desa ini memiliki ciri desa pada umumnya yaitu jumlah dan kepadatan penduduk maupun permukiman yang rendah, hubungan sosial yang akrab, sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani dan menggantungkan hidupnya pada lahan pertanian, dan ketersediaan sarana dan prasarana yang masih terbatas.

5) Tipologi desa dan kelurahan terisolasi dari pusat perkembangan;

Kelompok desa ini secara geografis berjarak sangat jauh dan tidak memiliki aksesibilitas yang baik terhadap pusat-pusat pertumbuhan bahkan terkadang terisolir, sehingga tidak memungkinkan adanya hubungan intensif dengan kota. Ciri-ciri masyarakat diantaranya tinggal dalam lingkungan alam yang masih asli dengan budaya utama bercocok tanam berkebun dan beternak serta intensitas pembangunan dan ketersediaan sarana prasarana dasar sangat terbatas.

c. Tipologi Desa Berdasarkan Aspek Spasial

Tipologi desa yang dilihat dari kenampakan letak permukiman dan tata guna lahan pedesaan dapat digunakan untuk menganalisis spasial (pola distribusi keruangan) pedesaan. Bintaro (dalam Daldjoeni, 1987) menemukan 4 tipe distribusi spasial desa, yaitu; (1) desa menyusur sepanjang pantai, (2) desa terpusat, (3) desa linier di dataran rendah, (4) desa mengelilingi fasilitas tertentu.

Sedangkan Everett. M. Rogers J. Burdge dalam bukunya “Social Change ini Rural Societies” (Dalam Leibo, 1995) dan berdasarkan pada pola pemukiman mengelompokkan desa kedalam empat tipe distribusi keruangan permukiman desa yaitu: (1) The Scattered Farmstead Community, (2) The Cluster Village, (3) The Line Village.

d. Tipologi Desa Berdasarkan Potensi Ekonomi

Potensi ekonomi pedesaan ditentukan oleh potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia serta peluang ekonomi akibat posisi dan relasi dengan wilayah lain. Pemanfaatan sumberdaya alam tercermin oleh pemanfaatan lahan dan struktur mata pencaharian masyarakatnya. Permendagri nomor 12 tahun 2007 menyusun tipologi desa berdasarkan potensi pengembangan ekonomi, diantaranya;

- 1) Tipologi desa persawahan
- 2) Tipologi desa perladangan
- 3) Tipologi desa perkebunan
- 4) Tipologi desa peternakan
- 5) Tipologi desa nelayan
- 6) Tipologi desa di hutan atau tepi hutan
- 7) Tipologi desa pertambangan/galian
- 8) Tipologi desa kerajinan dan industri kecil
- 9) Tipologi desa industry sedang dan besar
- 10) Tipologi desa pariwisata
- 11) Tipologi desa jasa dan perdagangan

e. Tipologi Desa Berdasarkan Tingkat Pengembangan

Berbeda dengan tipologi sebelumnya yang lebih sederhana dalam penetapan indikator, tipologi pedesaan dengan mendasarkan tingkat perkembangan pada hakekatnya merupakan proses penyusunan kelompok perkembangan desa dengan multi kriteria. Tingkat perkembangan wilayah desa yang sangat populer di Indonesia dan sampai sekarang juga masih digunakan adalah tiga tingkatan desa yaitu desa swadaya, swakarsa, dan swasembada.

Indikator multikriteria yang digunakan untuk menetapkan tiga tingkatan perkembangan tersebut diantaranya indikator (1) mata pencaharian, (2) produksi, (3) adat istiadat, (4) kelembagaan, (5) pendidikan, (6) swadaya, dan (7) sarana dan prasarana.

f. Tipologi Desa Berdasarkan Sistem Pengaturan Desa

Terdapat tiga azas untuk mengatur desa yaitu: (1) asas rekognisi (pengakuan dan penghormatan); (2) desentralisasi (penyerahan kewenangan) dan (3) delegasi (tugas bantuan). Dalam konteks ini, desa dapat dikelompokkan menjadi dua bagian besar yaitu desa adat dan desa non adat.

3. Struktur ruang desa

Struktur desa ditunjukkan oleh pola keruangannya, yaitu pemanfaatan lahan desa untuk keperluan tertentu yang mendukung kehidupan penduduknya. Secara umum pemanfaatan lahan desa dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai fungsi social dan fungsi ekonomi. Fungsi social sebagai perkampungan dan

fungsi ekonomi sebagai tempat melakukan kegiatan ekonomi, seperti Bertani dan berternak. Struktur desa di suatu daerah dengan daerah lain tidak sama. Perbedaan struktur desa dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut.

a. Sumber daya air

Ketersediaan air di suatu tempat sangat mendukung kehidupan penghuninya. Penduduk membutuhkan air untuk dapat bertahan hidup. Permukiman akan banyak muncul di tempat yang tersedia sumber air.

b. Kesesuaian tanah

Tingkat kesesuaian tanah menentukan hasil panen pertanian dan peternakan. Pada tanah yang subur cocok digunakan untuk kegiatan pertanian dan peternakan. Pada lahan subur banyak dipilih penduduk untuk membangun permukiman.

c. Topografi

Topografi menentukan pola permukiman desa. Di dataran rendah, pola permukiman bersifat mengelompok bulat atau memanjang. Sedang di dataran tinggi atau pegunungannya, pola permukiman bersifat tersebar.

d. Iklim

Keadaan iklim suatu daerah berpengaruh terhadap pola permukiman desa. Curah hujan merupakan unsur iklim yang sangat memengaruhi ketersediaan air suatu daerah.

e. Kegiatan penduduk

Pola permukiman desa dipengaruhi oleh kegiatan ekonomi atau mata pencaharian penduduk desa. Misalnya, desa yang penduduknya bermata

pencarian sebagai nelayan akan membangun permukiman dengan pola memanjang mengikuti garis pantai atau muara sungai.

f. Budaya

Kebiasaan, adat istiadat, tradisi, dan kepercayaan yang berlaku di suatu daerah mempengaruhi pola permukimannya. Pola keruangan desa umumnya sederhana. Rumah-rumah di desa biasanya dikelilingi pekarangan. Jarak antar rumah cukup longgar karena setiap rumah mempunyai halaman luas. Kenampakan yang terlihat di desa adalah sawah atau lading tempat bercocok tanam, rumah-rumah sederhana, jalan setapak, jalan kampung, dan pohon-pohon yang rindang. Sawa, lading, dan balai desa terletak berjauhan dengan permukiman penduduk.

Desa yang telah berkembang memiliki pola keruangan yang lebih kompleks. Pada desa yang telah berkembang terdapat perusahaan pengelola sumber daya alam, sarana Pendidikan, tempat ibadah, dan pasar. Pola keruangan desa yang lebih kompleks ini dipengaruhi oleh faktor spasial, sumber daya alam, dan sumber daya manusia.

C. *Infrastruktur*

1. Definisi infrastruktur

Infrastruktur merujuk pada sistem fisik yang menyediakan transportasi, pengairan, drainase, bangunan-bangunan gedung dan fasilitas public yang lain yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial dan ekonomi (Grigg,1988) dalam (NSS Prapti, Suryawardana, & Triyani, 2015)

Sistem infrastruktur merupakan pendukung utama fungsi-fungsi sistem sosial dan sistem ekonomi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Sistem infrastruktur dapat didefinisikan sebagai fasilitas-fasilitas atau struktur-struktur dasar, peralatan-peralatan, instalasi-instalasi yang dibangun dan yang dibutuhkan untuk berfungsinya sistem sosial dan sistem ekonomi masyarakat (Grigg, 2000)

(Moteff 2003 dalam NSS Prapti, Suryawardana, & Triyani, 2015) mendefinisikan infrastruktur tidak hanya terbatas pada sudut pandang ekonomi melainkan juga pertahanan dan keberlanjutan pemerintah.

Vaughn and pollard (2003) dalam (NSS Prapti, Suryawardana, & Triyani, 2015), menyatakan infrastruktur secara umum meliputi jalan, jembatan, air dan sistem pembuangan, Bandar udara, pelabuhan, bangunan umum, dan juga termasuk sekolah, fasilitas kesehatan, penjara, rekreasi, pembangkit listrik, keamanan, kebakaran, tempat pembuangan sampah dan telekomunikasi.

Menurut Green dan Haines (dalam Adi, 2013;240) infrastruktur dapat berupa jalan raya, jembatan, jalan kereta api, sarana pembuangan limbah, sarana air bersih, jaringan telepon, dan lain sebagainya.

2. Jenis-jenis infrastruktur

Berdasarkan jenisnya, infrastruktur dibagi dalam 13 kategori (Grigg, 1988) dalam (Cakrawijaya, 2014, p. 140) yaitu:

- a. Sistem penyediaan air; waduk, penampungan air, transmisi dan distribusi, dan fasilitas pengelolaan air.

- b. System pengelolaan air limbah; pengumpul, pengolahan, pembuangan, dan daur ulang.
- c. Fasilitas pengelolaan limbah (padat).
- d. Fasilitas pengendalian banjir, drainase dan irigasi.
- e. Fasilitas lintas air dan navigasi.
- f. Fasilitas transportasi; jalan, rel Bandar udara, serta utilitas pelengkap lainnya.
- g. System transit public.
- h. System kelistrikan; gedung pemerintahan, dll.
- i. Fasilitas gas alam.
- j. Gedung public; sekolah, rumah sakit, gedung pemerintahan, dll.
- k. Fasilitas perumahan publik
- l. Taman kota; taman terbuka, plaza, dll serta,
- m. Fasilitas komunikasi.

Jenis-jenis infrastruktur tersebut menjadi dasar dalam pengelompokan pembangunan infrastruktur yang dilakukan melalui Pedoman Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan.

Jenis infrastruktur pedesaan yang menjadi cakupan pembiayaan Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan untuk tahun anggaran 2009, antara lain berupa;

Jenis infrastruktur pedesaan yang menjadi cakupan pembiayaan Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan untuk tahun anggaran 2009, antara lain berupa;

- a. Infrastruktur yang mendukung aksesibilitas, berupa jalan dan jembatan pedesaan,
- b. Infrastruktur untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat pedesaan, berupa penyediaan air minum, dan sanitasi pedesaan (pedoman Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan, 2006) dalam (Asnudin A., 2009, p. 293)

3. Kriteria infrastruktur

- a. Dalam memilih jenis infrastruktur yang akan dilaksanakan di desa sasaran PPIP 2009, harus mempertimbangkan faktor-faktor, antara lain:
Memenuhi kebutuhan infrastruktur yang mendesak bagi masyarakat miskin dan diusulkan oleh masyarakat melalui musyawarah desa,
- b. Langsung memberikan manfaat bagi masyarakat setempat terutama kelompok miskin,
- c. Penyediaan lahan untuk infrastruktur disediakan oleh masyarakat, dan
- d. Dapat dilaksanakan dan berfungsi pada tahun anggaran 2009, serta
- e. Memprioritaskan pemberian kesempatan kerja kepada tenaga kerja setempat dan penggunaan material lokal, dan
- f. Penggunaan teknologi sederhana yang dapat dilaksanakan oleh masyarakat atau teknologi yang sesuai dengan kebutuhan setempat
- g. Merupakan infrastruktur yang dapat dikelola oleh masyarakat,
- h. Menjamin keberlangsungan fungsi infrastruktur yang dibangun,
- i. Tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan, sosial dan budaya.

4. Pengembangan infrastuktur

Pembangunan infrastruktur memiliki peranan penting dalam mewujudkan sasaran pembangunan seperti pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju terciptanya keadilan social bagi seluruh rakyat. Pembangunan infrastruktur merupakan dinamika organisasi public yang harus dilakukan untuk mendukung pengembangan wilayah. Pembangunan infrastruktur merupakan determinan penting untuk menunjang kelancaran kegiatan social ekonomi pada suatu daerah karena tanpa adanya infrastruktur yang memadai kegiatan perekonomian kurang lancar dan dapat menghambat pembangunan (Yonatan, 2014, p. 541)

Pentingnya pembangunan infrastruktur bagi suatu daerah ditandai oleh nilai manfaat dan kegunaan yang dirasakan masyarakat diberbagai hal karena cukup beralasan jika pembangunan infrastruktur mendapat perhatian pemerintah. Pembangunan infrastruktur ditinjau dari aspek kepentingan masyarakat dapat meningkatkan transformasi informasi dan kemudahan akses yang menghubungkan antar wilayah, baik antar wilayah pemerintahan pedesaan, antar pemerintahan Kecamatan bahkan kemudahan akses menuju bukota Kabupaten. Mencermati betapa pentingnya infrastruktur dalam kehidupan masyarakat, disamping untuk meningkatkan akselerasi pembangunan maka cukup beralasan jika setiap wilayah dibangunnya infrastruktur yang memadai. Tentunya pembangunan infrastruktur yang berorientasi pada visi dan misi pemerintahan, baik lembaga pemerintah pada

level yang paling bawah hingga lembaga pemerintah paling atas (Yonatan, 2014, p. 542)

Peran infrastruktur sebagai mediator antara sistem ekonomi dan sosial dalam tatanan kehidupan manusia dengan lingkungan alam menjadi sangat penting. Infrastruktur yang kurang (bahkan tidak) berfungsi akan memberikan dampak yang besar bagi manusia. Sebaliknya, memperhitungkan kapasitas daya dukung lingkungan akan merusak alam yang pada hakekatnya akan merugikan manusia termasuk makhluk hidup yang lain. Infrastruktur yang dibutuhkan Negara maju tentunya berbeda dengan yang dibutuhkan oleh Negara berkembang bahkan terbelakang. Hal yang sama juga untuk wilayah perkotaan dan pedesaan, atau daerah industri dengan wilayah pertanian dan pesisir atau kepulauan.

Kurangnya infrastruktur menyebabkan banyak masyarakat hidup terkungkung di wilayah terisolasi dengan tingkat kemiskinan yang sangat parah. Berbagai persoalan mendera kehidupan masyarakat mulai dari kemiskinan, wabah penyakit, gizi buruk, dan keterbelakangan. Obat mujarab yang mampu menyembuhkan penyakit tersebut adalah dengan pembangunan infrastruktur.

D. Definisi Identifikasi

Identifikasi berasal dari kata Identify yang artinya meneliti, menelaah. Identifikasi adalah kegiatan yang mencari, menemukan, mengumpulkan, meneliti, mendaftarkan, mencatat data dan informasi dari “kebutuhan” lapangan. Secara intensitas kebutuhan dapat dikategorikan (dua) macam yakni kebutuhan terasa yang sifatnya mendesak dan kebutuhan terduga yang sifatnya tidak mendesak.

Identifikasi juga merupakan proses pengenalan, menempatkan obyek atau individu dalam suatu kelas sesuai dengan karakteristik tertentu. Selain itu, Identifikasi adalah satu cara yang dilakukan oleh seseorang untuk mengambil alih ciri-ciri orang lain dan menjadikannya bagian yang terintegrasi dengan kepribadiannya sendiri. Dalam pengertian yang lain, identifikasi adalah kecenderungan dalam diri individu untuk menjadi sama dengan individu lain. Sedangkan definisi Identifikasi menurut para ahli adalah sebagai berikut:

1. JP Chaplin yang diterjemahkan Kartini Kartono yang dikutip oleh (Uttoro 2008:8)

Individu yang menjadi sasaran identifikasi dinamakan idola. Perilaku, sikap, keyakinan, dan pola hidup yang menjadi idola akan melembaga bahkan menjiwai para pelaku identifikasi sehingga sangat berpengaruh terhadap pembentukan dan perkembangan kepribadiannya.

2. Poerwadarminto (1976: 369)

Identifikasi adalah penentuan atau penetapan identitas seseorang atau benda". Menurut ahli psikoanalisisn identifikasi adalah suatu proses yang dilakukan seseorang, secara tidak sadar, seluruhnya atau sebagian, atas dasar ikatan emosional dengan tokoh tertentu, sehingga ia berperilaku atau membayangkan dirinya seakan-akan ia adalah tokoh tersebut. Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa identifikasi adalah penempatan atau penentu identitas seseorang atau benda pada suatu saat tertentu.

3. Koenjtaraningrat (1987: 17)

Identifikasi adalah suatu bentuk pengenalan terhadap suatu ciri-ciri fenomena sosial secara jelas dan terperinci (Koenjtaraningrat, 1987: 17). Mengidentifikasi suatu fenomena sosial berarti Kartika Handayani: Identifikasi Anak Jalanan Di Kota Medan, 2009. mengenal secara keseluruhan gejala yang terjadi dimasyarakat dengan melihatnya melalui ukuran-ukuran pada gejala yang sama.

E. *Definisi Pembangunan*

Pembangunan adalah proses untuk melakukan perubahan atau suatu proses perubahan yang disengajah untuk mencapai perbaikan kehidupan dan penghidupan yang berkesinambungan. Beberapa pengertian yang selama ini berkembang tentang pembangunan adalah:

1. Suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara, dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (Siagia, 1994)
2. Suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana (Kartasasmita, 1994:9).
3. Proses multidimensional yang melibatkan perubahan-perubahan mendasar dalam struktur social, perilaku social, dan institusi nasional, di samping akselerasi pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketidakmerataan, dan pemberantasan kemiskinan (Todaro, 1994)

4. Proses natural mewujudkan cita-cita bernegara, yaitu terwujudnya masyarakat makmur sejahtera secara adil dan merata (Soemodiningrat, 2001)
5. Pembangunan adalah proses dengan anggota-anggota suatu masyarakatnya meningkatkan kapasitas perorangan dan institusional mereka untuk memobilisasi dan mengelolah sumber daya dalam upaya kualitas hidup sesuai dengan aspirasi mereka sendiri (Korten, 1993).
6. Pembangunan mengandung unsur-unsur usaha atau proses, peningkatan, kemajuan, atau perubahan ke arah kemajuan, berkesinambungan, dilakukan secara sadar atau dengan sengaja, terencana, ntuk tujuan pembinaan dilakukan secara bertahap (Khairuddin, 1992 :24)
7. Transformasi berbagai faktor dalam unsur sistemik yang secara sengaja dilakukan oleh suatu bangsa untuk mencapai tingkat kehidupan yang secara kualitatif dan kuantitatif lebih tinggi.

Menurut Bryat & White (1987) pembangunan adalah satu di antara konsep-konsep paling mendesak di zaman kita sekarang ini. Menurutnya, pembangunan memancing pertanyaan-pertanyaan sulit tentang-tentang nilai, teknik-teknik, dan pilihan-pilihan. Pembangunan memunculkan kembali pertanyaan klasik tentang hakikat “masyarakat yang baik”, dan juga masalah siapakah yang harus menentukan isi dan tujuan masyarakat. Karena masalah-masalah iu luas dan sulit, mudahlah orang mengaburkannya dalam generalisasi, menggunakan istilah *pembangunan* sebagai eufemisme untuk perubahan, modernisasi, atau pertumbuhan.

Sebagai suatu kajian, pembahasan tentang pembangunan senantiasa dikaitkan dengan negara-negara Dunia Ketiga/Negara Berkembang sehingga melahirkan *Teori Pembangunan (Development Theories)* yang berupaya menjelaskan persoalan pembangunan yang dihadapi oleh negara-negara Dunia Ketiga dalam berbagai dimensinya: ekonomi, social dan politik, serta bagaimana arah yang harus ditempuh untuk menjawabnya. Teori pembangunan ini merupakan mainstream dan teori yang dominan mengenai perubahan social.

Menurut Bryat & White (1987) pembangunan sebagai suatu peningkatan kapasitas untuk mempengaruhi masa depan mempunyai beberapa implikasi tertentu. Pertama, itu berarti memberikan perhatian terhadap “kapasitas”, terhadap apa yang perlu dilakukan untuk mengmebangkan kemampuan dan tenaga guna membuat perubahan. Kedua, mencakup “keadilan”, perhatian yang berat sebelah kepada kelompok tertentu akan akan memecah belah masyarakat dan mengurangi kapasitasnya. Ketiga, penumbuhan kuasa dan wewenang, dalam pengertian bahwa hanya jika masyarakat mempunyai kuasa dari wewenang tertentu maka mereka akan menerima manfaat pembangunan. Akhirnya pembangunan berarti perhatian yang bersungguh-sungguh terhadap saling ketergantungan di dunia serta perlunya menjamin bahwa masa depan dapat ditunjang kelangsungannya. Kapasitas apapun yang tercapai akan cepat punah, kecuali jika kita mengetahui dan menangani masalah-masalah kelangkaan dan keterbatasan sumberdaya-sumberdaya yang ada.

F. *Standar Pelayanan Minimum Infrastruktur*

Standar palayanan minimum yaitu pedoman atau acuan untuk mengetahui bagaimana ketersediaan dan kondisi infrastruktur di Kecamatan Latimojong. Untuk

mengetahui bagaimana ketersediaan dan kondisi infrastruktur di Kecamatan Latimojong dalam mendukung pengembangan wilayah pedesaan dapat dilakukan dengan melihat standar pelayanan minimum pada infrastruktur jalan, jembatan, irigasi pedesaan, jalan tani, air bersih, sanitasi, telekomunikasi dan listrik sebagai berikut:

1. Jalan

Tabel 1. Standar Pelayanan Minimum Jalan

No	Kriteria			
	Klasifikasi Jalan	Panjang (m)	Lebar (m)	Konstruksi
1	2	3	4	5
1	Jaringan Jalan	25-50 m/Ha	Lebar 2-5 m	<ul style="list-style-type: none"> • Aspal • Beton • Pengerasan
2	Jalan setapak	35-70 m/Ha	0,8 – 2 m	

Sumber: Standar Pelayanan Minimal PR/PP/PU No.53/KPTS/M/2001

2. Irigasi pedesaan

Tabel 2. Standar Pelayanan Minimum Irigasi Pedesaan

No	Kriteria
1	2
1	Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada sesuai dengan kewenangannya
2	Sistem irigasi meliputi sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi lintas kabupaten/kota yang luasnya 1000 ha sampai dengan 3000 ha
3	Ketersediaan air irigasi di petak-petak sawah dalam jumlah, waktu dan tempat pada setiap musim tanam terhadap kebutuhan air irigasi berdasarkan Rencana Tata Tanam yang telah ditetapkan.

Sumber: Permen PU No 04 Tahun 2014

3. Jalan tani

Tabel 3. Standar Pelayanan Minimum Jalan Tani

No	Kriteria
1	2
1	Panjang jalan usaha tani antara 50-100 m/ha (tergantung kondisi lahan)
2	Jalan usaha tani utama lebar atas 3 m dan lebar bawah 4 m sedangkan jalan usaha tani cabang lebar atas 2 m dan lebar bawah 3 m
3	Tinggi jalan antara 0,25-0,70 m diatas permukaan lahan

No	Kriteria
1	2
4	Konstruksi tanah dipekeras batuan dan disebelah bahu jalan (kiri dan kanan) di buat saluran pembuangan air
5	Lebar saluran pembuangan air (drainase) anatar 40-60 cm dengan kedalaman kurang lebih 50 cm

Sumber: Persentasi Pembangunan Jalan Usaha Tani

4. Air bersih

Tabel 4. Standar Pelayanan Air Bersih

No	Kriteria
1	2
1	Kebutuhan air bersih untuk rumah tangga adalah 100 liter/orang/hari
2	Kebutuhan air bersih untuk fasilitas kesehatan menurut jenisnya adalah Rumah Sakit Bersalin 5000 liter/hari, Puskesmas 3.000 liter/unit/hari, Pustu 1.500 liter/unit/hari, Balai pengobatan 8.000 liter/unit/hari, Tempat Praktek Dokter 300 liter/unit/hari.
3	Kebutuhan air bersih untuk fasilitas perekonomian menurut jenisnya adalah warung 250 liter/unit/hari, pertokoan 10.000 liter/unit/hari, dan pusat perbelanjaan 86 m ³ /ha/hari.
4	Kebutuhan air bersih untuk fasilitas Pendidikan adalah 10 liter/orang/hari.
5	Kebutuhan air bersih untuk fasilitas peribadatan adalah masjid 10.000 liter/unti/hari dan mushollah/langar 2.000 liiter/unit/hari.
6	Kebutuhan air berish untuk fasilitas umum adalah parkir dan MCK membutuhkan air sebanyak 1.000 liter/unit/hari

Sumber: SNI 03-1733-2004 Tentang Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan

5. Sanitasi

Tabel 5. Standar Pelayanan Minimum Sanitasi

No	Kriteria MCK Umum
1	2
1	Jarak maksimal lokasi antara lokasi MCK dengan rumah penduduk yang dilayani adalah 100 m dengan lokasi daerah harus bebas banjir
2	Kemampuan dalam mengelola MCK
3	Terdapat saluran pengelolaan untuk pembuangan air limbah sehingga tidak mencemari air udara dan tanah dilingkungan permukiman
4	Kapasitas pelayanan untuk: <ul style="list-style-type: none"> • 10-20 orang dengan kapasitas ruangan mandi 2, cuci 1, dan kakus 2. • 21-40 orang dengan kapasitas ruangan mandi 2, cuci 2, kakus 2 • 41-80 orang dengan kapasitas ruangan mandi 2, cuci 3, kakus 4 • 81-100 dengan kapasitas ruangan mandi 2, cuci 4, kakus 4 • 101-120 dengan kapasitas ruangan mandi 4, cuci 5, kakus 4 • 121-160 orang dengan kapasitas ruangan mandi 4, cuci 5, kakus 6 • 161-200 orang dengan kapasitas ruangan mandi 4, cuci 6, kakus 6

No	Kriteria Persampahan			
	Lingkup prasarana	Sarana pelengkap	Status	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Rumah (Jiwa)	Tong sampah	Pribadi	<ul style="list-style-type: none"> • Jarak bebas TPS dengan lingkungan hunian minimal 30m • Gerobak mengangkut 3x seminggu
2	RW (2500 jiwa)	<ul style="list-style-type: none"> • Gerobak sampah • Bak sampah kecil 	TPS	
3	Kelurahan (30.000 jiwa)	<ul style="list-style-type: none"> • Gerobak sampah • Bak sampah besar 	TPS	
4	Kecamatan (120.000 jiwa)	<ul style="list-style-type: none"> • Mobil sampah • Bak sampah besar 	TPS/TPA lokal	
5	Kota (>480.000 jiwa)	<ul style="list-style-type: none"> • Bak sampah akhir • Temat daur ulang sampah 	TPA	
5	Kuantitas air yang disesuaikan untuk kesatuan MCK adalah minimal 20 liter/orang/hari untuk mandi, minimal 15 liter/orang/hari untuk mencuci, dan minimal 10 liter/orang/hari untuk kakus.			
6	Kuantitas air bersih yang dipergunakan harus memenuhi baku mutu air yang berlaku.			

No	Kriteria Tangki Septik Tank			
	2			
1	Bidang resapan, sumur resapan pada daerah air tanah tinggi			
2	Bentuk dan ukuran: <ul style="list-style-type: none"> • Tangki septik segi empat dengan perbandingan panjang dan lebar 2:1 sampai 3:1, lebar tangki septik minimal 0,75 m dan panjang tangka septik minimal 1,50 m, tinggi tangka minimal 1,5 m. • Bentuk tangki septik dengan periode pengurusan 3 tahun (septik tercampur) <ul style="list-style-type: none"> - 5 orang pemakai dengan panjang 1,6 m, lebar 0,8, tinggi 1,6, volume total 2,1 m³ - 10 orang dengan panjang 2,1 m, lebar 1,0 m, tinggi 1,8 m, volume total 3,9 m³ - 15 orang dengan panjang 2,5 m, lebar 1,3 m, tinggi 1,8 m, volume total 5,8 m³ - 20 orang dengan panjang 2,8m, lebar 1,4 m, tinggi 2 m, volume total 7,8 m³ - 25 orang dengan panjang 3,2 m, lebar 1,5 m, tinggi 2 m, volume total 9,6 m³ - 50 orang dengan panjang 4,4 m, lebar 2,2 m, tinggi 2 m, volume total 19,4 m³ • Ukurang septik terpisah: <ul style="list-style-type: none"> - 10 orang dengan panjang 1,6 m, lebar 0,8 m, tinggi 1,3 m, volume total 2,4 m³ 			

No	Kriteria Tangki Septik Tank
1	2
	<ul style="list-style-type: none"> - 15 orang dengan panjang 1,8 m, lebar 1,0 m, tinggi 1,4 m, volume total 2,5 m³ - 20 orang dengan panjang 2,1 m, lebar 1,0 m, tinggi 1,4 m, volume total 2,9 m³ - 25 orang dengan panjang 2,4 m, lebar 1,2 m, tinggi 1,6 m, volume total 4, 6 m³ - 50 orang dengan panjang 3,2 m, lebar 1,6 m, tinggi 1,7 m, volume total 5,2 m³
3	Jarak minimum unit pengelolaan lanjutan terhadap bangunan tertentu: <ul style="list-style-type: none"> • Jarak sumur atau bidang resapan untuk bangunan Gedung/rumah 1.50 m • Jarak sumur atau bidang resapan untuk sumur air bersih 10,00 m • Jarak sumur atau bidang resapan air hujan 5,00 m

Sumber: SNI 2398-2017 tentang Tata cara perencanaan tangka septik, SNI 03-1733-2004 Tentang Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan

6. Telekomunikasi

Tabel 6. Standar Pelayanan Minimum Telekomunikasi

No	Kriteria
1	2
1	Kebutuhan telepon rumah tangga 1 KK = Jiwa
2	Kebutuhan telepon umum per 1000 jiwa
3	Kebutuhan telepon komersial 10% dari telepon domestik

Sumber: SNI 03-1733-2004 Tentang Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan

7. Listrik

Tabel 7. Standar Pelayanan Minimum Listrik

No	Kriteria
1	2
1	Kebutuhan rumah tangga minimum 450 VA/jiwa
2	Perumahan dengan golongan tipe A adalah 450 VA/Watt, tipe B adalah 900 VA/Watt dan tipe C sebesar 1.300 VA/Watt
3	Fasilitas perdagangan dan perkantoran membutuhkan suplai energi listrik sesuai standar yakni 60 watt/m ² atau 25 % dari kebutuhan rumah tangga
4	Fasilitas social dan pelayanan umum untuk kegiatan Pendidikan, kesehatan, dan peribadatan, dan pelayanan umum meliputi pos hansip dan balai pertemuan membutuhkan standar energi listrik yaitu 60 watt/m ² atau 25% dari kebutuhan rumah tangga
5	Penerangan jalan membutuhkan 10% energi listrik dari total kebutuhan rumah tangga
6	Perkiraan kehilangan energi listrik dalam transmisi diperkirakan 30% dari total energi listrik yang dibutuhkan

Sumber: SNI 03-1733-2004 Tentang Perencanaan Lingkungan

G. Penelitian Terdahulu

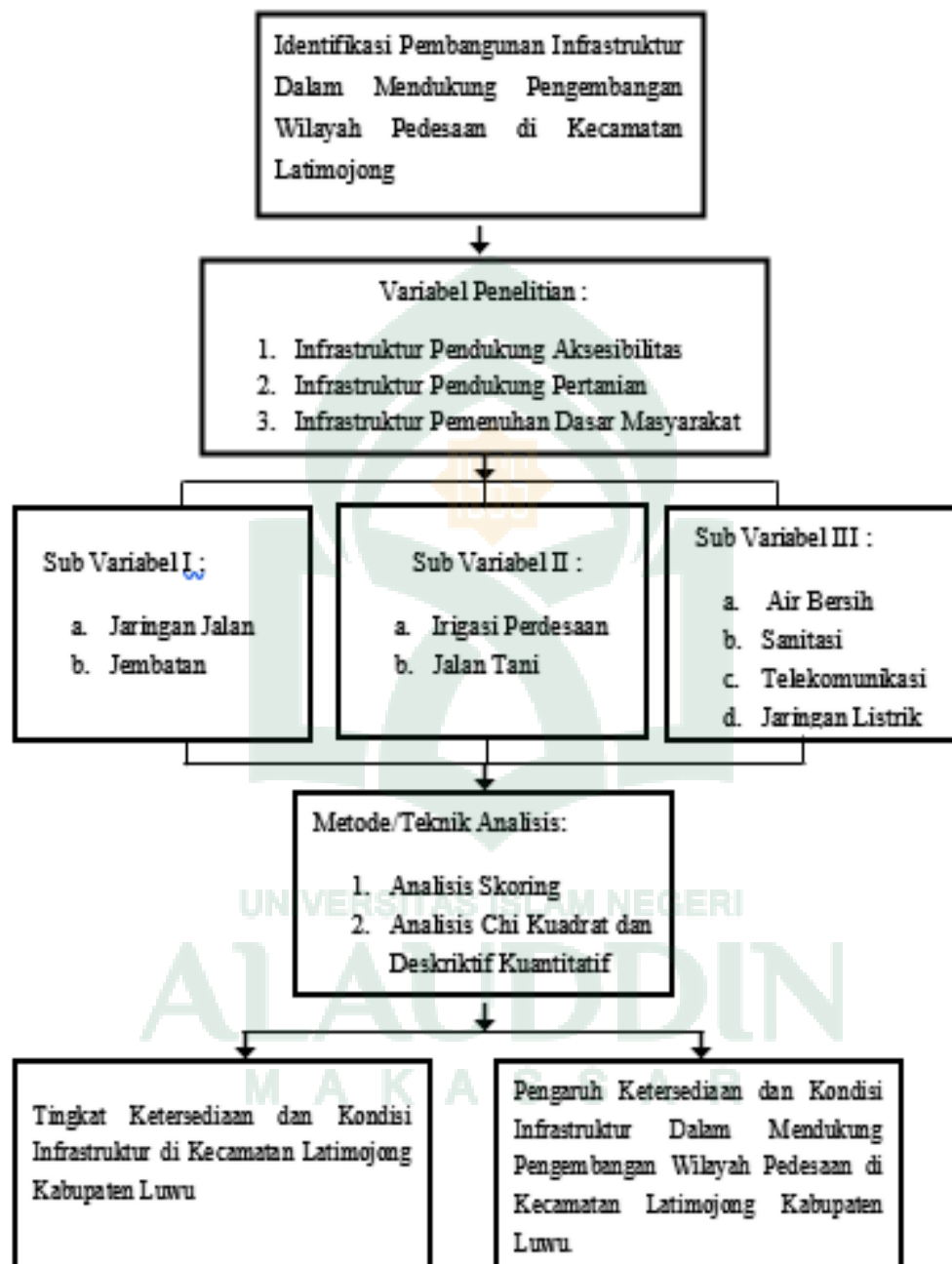
Originalitas penelitian yang dimaksud untuk membandingkan penelitian terdahulu dengan penelitian ini. Adapun beberapa penelitian terdahulu dapat dilihat pada Tabel 8 berikut:

Tabel 8. Penelitian Terdahulu

No.	Judul Penelitian	Penulis	Rumusan Masalah	Metode Analisis
1	2	3	4	5
1	Studi Dukungan Infrastruktur Pedesaan Dalam Rangka Pengembangan Kawasan Pertanian I kabupaten Gowa (Studi Kasus Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa)	Andi Syahratul Hayani S.PWK	1. Bagaimana ketersediaan infrastruktur pedesaan dalam upaya pengembangan kawasan pertanian di Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa? 2. Bagaimana strategi pengembangan infrastruktur pedesaan dalam upaya pengembangan kawasan pertanian di Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa?	Analisis skoring, Analisis SWOT dan deskriptif kualitatif
2	Analisis Ketersediaan Infrastruktur Kawasan Pedesaan dalam Mendukung Pengembangan Kawasan Agropolitan di Kabupaten Enrekang	Multazam, S.PWK	Bagaimana tingkat pelayanan infrastruktur pada pusat kegiatan agribisnis pada pusat kawasan Agropolitan Belajen di Kabupaten Enrekang?	Analisis skoring dan deskriptif kualitatif

No.	Judul Penelitian	Penulis	Rumusan Masalah	Metode Analisis
1	2	3	4	5
3	Evaluasi Dukungan Infrastruktur Kawasan Agropolitan Di KAabupaten Bantaeng (Studi Kasus: Kecamatan Uluere dan Kecamatan Sinoa)	Z ulfahri, S.PWK	1. Bagaimana ketersediaan infrastruktur kawasan Agropolitan yang ada di Kecamatan Uluere dan Kecamatan Sinoa Kabupaten Bantaeng? 2. Evaluasi ketersediaan infrastruktur pertanian yang ada Kecamatan Uluere dan Kecamatan Sinoa sebagai bentuk dukungan terhadap kawasan agropolitan di Kabupaten Bantaeng?	Analisis skoring dan deskriptif kualitatif
6	Implementasi Pembangunan Infrastruktur dalam Menunjang Kelancaran Pelayanan pada Masyarakat di Kecamatan Mentarang Kabupaten Malinau	Yonatan, Nur Fitriyah, Antonius Margono	Bagaimana implementasi pembangunan infrastruktur dalam menunjang kelancaran pelayanan pada masyarakat	Analisis deskriptif kualitatif

H. Kerangka Pikir



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di Kecamatan Latimojong, Kabupaten Luwu. Waktu penelitian ini mencakup tahap persiapan penelitian, tahap pelaksanaan penelitian dan tahap penyusunan laporan hingga tahap persentase.

B. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas 2 (dua), yaitu:

- a. Data kualitatif yaitu data yang berbentuk bukan angka atau menjelaskan secara deskriptif yaitu data terkait persepsi masyarakat menyangkut penelitian ini.
- b. Data kuantitatif yaitu data yang menjelaskan kondisi lokasi penelitian dengan tabulasi angka yang dapat dikalkulasikan untuk mengetahui bobot yang diinginkan. Data Kuantitatif yang dimaksud adalah:
 - 1) Data demografi, seperti jumlah penduduk, jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan, jumlah penduduk menurut mata pencaharian, jumlah pendapatan penduduk, jumlah penduduk menurut agama.
 - 2) Data kondisi fisik kawasan, yang mencakup letak geografis, kondisi topografi, kelerengan, dan hidrologi.
 - 3) Data pola penggunaan lahan Kecamatan Latimojong.
 - 4) Data ketersediaan infrastruktur, seperti jalan, jembatan, air bersih, telekomunikasi, jaringan listrik, irigasi, drainase, dan sanitasi

2. Sumber data

Adapun sumber data yang digunakan, digolongkan ke dalam dua kelompok, yaitu data primer dan data sekunder. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat uraian berikut ini.

- a. Data primer merupakan data yang diperoleh melalui observasi dan survey lapangan terkait kondisi eksisting dengan narasumber seperti instansi pemerintah maupun masyarakat di Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu. Adapun data yang dibutuhkan, yaitu:
 - 1) Sebaran Ketersediaan dan Kondisi Infrastruktur
 - 2) Data Hasil Wawancara dan Survey lapangan
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari instansi terkait dengan kebutuhan data yang diperlukan. Adapun data sekunder yang diperlukan, yaitu:
 - 1) Gambaran umum Kabupaten Luwu yang meliputi data luas wilayah, batas administrasi serta pembagian batas administrasi Kabupaten Luwu yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Luwu.
 - 2) Gambaran umum Kecamatan Latimong, meliputi batas wilayah administrasi, luas wilayah, pembagian wilayah administrasi, aspek fisik dasar: topografi, geologi dan jenis tanah, klimatologi, dan penggunaan lahan, demografi, prasarana jalan, kondisi permukiman, Data tersebut diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS).

- 3) Tinjauan kebijakan pemerintah terkait tata ruang Kecamatan Latimong, berupa Undang-Undang No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
- 4) RTRW Kabupaten Luwu dalam Perda Kabupaten Luwu Nomor 6 Tahun 2011 dan Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Tahun 2011-2031.

C. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Metode wawancara

Metode ini dilakukan dengan cara melakukan wawancara dan diskusi langsung kepada pemerintah dan masyarakat, guna mendapatkan data yang dibutuhkan untuk penelitian

2. Metode observasi

Merupakan kegiatan pengamatan, penelitian, dan pengambilan data atau informasi terhadap aspek-aspek yang berkaitan langsung maupun tidak langsung terhadap ketersediaan dan kondisi infrastruktur.

3. Survey lapangan

Untuk mengetahui ketersediaan dan kondisi pembangunan infrastruktur dalam mendukung pengembangan wilayah pedesaan di Kecamatan Latimojong. Dengan survey lapangan diperoleh foto-foto yang merupakan gambaran ketersediaan dan kondisi infrastruktur saat ini.

4. Kuisioner

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan keterangan penilaian tabel secara tertulis yang ditujukan kepada responden.

5. Metode telaah pustaka

Yakni dalam telaah pustaka peneliti mempelajari data, baik kuantitatif maupun kualitatif melalui sumber documenter (laporan, jurnal, monografi daerah, buku-buku ilmiah, dan lain-lain).

D. *Populasi Dan Sampel*

1. Populasi

Sugiono (2010) mengatakan bahwa populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.

Populasi adalah keseluruhan aspek tertentu dari ciri, fenomena, atau konsep yang menjadi pusat perhatian. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang bermukim di Kecamatan Latimojong dengan jumlah 5.628 jiwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kecamatan Latimojong tahun 2018.

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi

tersebut (Sugiyono, 2017:81). Secara matematis besarnya sampel dari suatu populasi dapat menggunakan rumus slovis, yaitu:

$$n = \frac{N}{1+Ne^2} \dots\dots\dots(1)$$

Keterangan:

n : Jumlah Sampel

N : Jumlah Populasi

e : Koefisien kelonggaran ketidakteelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang masih dapat ditolerir atau diinginkan (10%)

Berdasarkan rumus diatas, maka pengambilan sampel pada studi kasus di Kecamatan Latimojong dengan populasi sebanyak 5.628 jiwa adalah sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

$$n = \frac{5.628}{1 + 5.628 (10\%)^2}$$

$$n = 100 \text{ Responden}$$

Jadi, sampel yang diperlukan dalam penelitian ini sebanyak 100 responden dari keseluruhan populasi.

E. Teknik Penarikan Sampel

Teknik pengumpulan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik *probability sampling* adalah teknik sampling yang memberi peluang sama kepada anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Cara demikian sering disebut dengan *random sampling* atau cara pengambilan sampel secara acak.

Pengambilan sampel secara random/acak dapat dilakukan dengan bilangan random, komputer, maupun dengan undian. Bila pengambilan dilakukan dengan undian, maka setiap anggota populasi diberi nomor terlebih dahulu, sesuai dengan jumlah anggota populasi.

Karena teknik pengambilan sampel adalah random, maka setiap anggota populasi mempunyai peluang sama untuk dipilih menjadi anggota sampel. Peluang akan semakin besar bila yang telah diambil tidak dikembalikan. Bila yang telah diambil keluar lagi, dianggap tidak sah dan dikembalikan lagi (Sugiyono, 2017: 91)

F. Variabel Penelitian

Variabel yang digunakan dalam proses identifikasi ditentukan berdasarkan kajian teori yang digunakan. Semakin sederhana metode penelitian maka variabel yang di gunakan semakin sedikit. Adapun variabel yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 9 sebagai berikut:

Tabel 9. Variabel Penelitian

No	Variabel Penelitian	Sub Variabel Penelitian	Indikator Penelitian
1	2	3	4
1	Infrastruktur pendukung aksesibilitas	a. Jaringan Jalan b. Jembatan	<ul style="list-style-type: none"> • Ketersediaan • Kondisi
2	Infrastruktur pendukung pertanian	a. Irigasi Pedesaan b. Jalan Tani	<ul style="list-style-type: none"> • Ketersediaan • Kondisi
3	Infrastruktur pemenuhan dasar masyarakat	a. Air Bersih b. Sanitasi c. Jaringan Listrik d. Telekomunikasi	<ul style="list-style-type: none"> • Ketersediaan • Kondisi

Sumber: Hasil Olah Pustaka Tahun 2019

G. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Metode analisis yang dipakai dalam penelitian ini, dilakukan agar dapat menjawab rumusan masalah yang ada dan metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Alat analisis untuk rumusan masalah pertama

Alat analisis yang digunakan untuk rumusan masalah pertama yaitu bagaimana ketersediaan dan kondisi infrastruktur di Kecamatan Latimojong dalam mendukung pengembangan wilayah pedesaan dengan menggunakan analisis skoring.

Analisis skoring adalah teknik analisis yang digunakan untuk mengetahui ketersediaan dan kondisi infrastruktur di Kecamatan Latimojong, Kabupaten Luwu.

Metode pembobotan (faktor skoring) juga merupakan suatu teknik dalam menganalisis data dengan mengukur tiap indikator dengan menggunakan skala Likert. Adapun pemberian bobot ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana ketersediaan dan kondisi infrastruktur dalam mendukung pengembangan wilayah pedesaan. Adapun kriteria dan metode pembobotan kondisi infrastruktur di wilayah tersebut dapat dilihat pada Tabel 10 sebagai berikut:

Keterangan penilaian:

Tabel 10. Skoring Variabel Penelitian

No.	Kriteria		Nilai Skor	Interval Skor (%)
	Ketersediaan	Kondisi		
1	2	3	4	5
1	Terpenuhi	Baik	5	75-100
2	Cukup	Sedang	3	50-74
3	Tidak	Buruk	1	< 50

Sumber: Hasil Olah Pustaka Tahun 2019

- a) Terpenuhi/Baik = 5 (Jika memiliki tingkat kesesuaian 75%-100%)
- b) Cukup/Sedang = 3 (Jika memiliki tingkat kesesuaian 50%-74%)
- c) Tidak/Buruk = 1 (Jika memiliki tingkat kesesuaian <50%)

Dengan menggunakan skala penilaian maka akan didapatkan jumlah nilai indikator, penilaian indikator, dan nilai bobot variabel (berdasarkan kriteria pada tabel) dari hasil penilaian tiap indikator ketersediaan dan kondisi infrastruktur dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Jumlah nilai indikator} = \text{bobot} \times \text{nilai indikator}$$

$$\text{Penilaian indikator} = \frac{\text{jumlah nilai indikator}}{\text{jumlah nilai indikator maksimal}} \times 100$$

$$\text{Nilai indikator} = \frac{\text{penilaian indikator} \times \text{bobot variabel}}{100}$$

Tabel 11. Metode Penscoringan (Skoring) untuk Infrastruktur

No	Kriteria	Nilai Skor	Interval Skor	Keterangan
1	2	3	4	5
Ketersediaan Jaringan Jalan				
1	Terpenuhi	5	75-100	✓
2	Kurang terpenuhi	3	50-74	
3	Tidak terpenuhi	1	< 50	
Kondisi Jaringan Jalan				
1	Baik	5	75-100	
2	Sedang	3	50-74	✓
3	Buruk	1	< 50	
Ketersediaan Jembatan				
1	Terpenuhi	5	75-100	✓
2	Kurang terpenuhi	3	50-74	

No	Kriteria	Nilai Skor	Interval Skor	Keterangan
3	Tidak terpenuhi	1	< 50	
Kondisi Jembatan				
1	Baik	5	75-100	✓
2	Sedang	3	50-74	
3	Buruk	1	< 50	
Ketersediaan Irigasi Pedesaan				
1	Terpenuhi	5	75-100	
2	Kurang terpenuhi	3	50-74	
3	Tidak terpenuhi	1	< 50	✓
Kondisi Irigasi Pedesaan				
1	Baik	5	75-100	
2	Sedang	3	50-74	✓
3	Buruk	1	< 50	
Ketersediaan Jalan Tani				
1	Terpenuhi	5	75-100	✓
2	Kurang terpenuhi	3	50-74	
3	Tidak terpenuhi	1	< 50	
Kondisi Jalan Tani				
1	Baik	5	75-100	
2	Sedang	3	50-74	✓
3	Buruk	1	< 50	
Ketersediaan Air Bersih				
1	Terpenuhi	5	75-100	
2	Kurang terpenuhi	3	50-74	✓
3	Tidak terpenuhi	1	< 50	
Kondisi Air Bersih				
1	Baik	5	75-100	
2	Sedang	3	50-74	✓
3	Buruk	1	< 50	
Ketersediaan Sanitasi				
1	Terpenuhi	5	75-100	
2	Kurang terpenuhi	3	50-74	✓
3	Tidak terpenuhi	1	< 50	
Kondisi Sanitasi				
1	Baik	5	75-100	
2	Sedang	3	50-74	✓
3	Buruk	1	< 50	
Ketersediaan Telekomunikasi				
1	Terpenuhi	5	75-100	
2	Kurang terpenuhi	3	50-74	✓
3	Tidak terpenuhi	1	< 50	
Kondisi Telekomunikasi				
1	Baik	5	75-100	
2	Sedang	3	50-74	
3	Buruk	1	< 50	✓
Ketersediaan Jaringan Listrik				
1	Terpenuhi	5	75-100	✓

No	Kriteria	Nilai Skor	Interval Skor	Keterangan
2	Kurang terpenuhi	3	50-74	
3	Tidak terpenuhi	1	< 50	
Kondisi Jaringan Listrik				
1	Baik	5	75-100	✓
2	Sedang	3	50-74	
3	Buruk	1	< 50	

Sumber: Hasil Olah Pustaka Tahun 2019

a. Infrastruktur pendukung aksesibilitas

Untuk pemberian skoring pada variabel penelitian Infrastruktur pendukung aksesibilitas, yang dimana terbagi atas dua sub variabel penelitian yaitu jalan dan jembatan.

Dengan indikator penelitian masing-masing sub variabel terbagi atas dua yaitu indikator ketersediaan dan indikator kondisi dimana dapat dilihat pada tabel berikut:

1) Jalan

Tabel 12. Skoring pada Indikator Ketersediaan

No.	Kriteria	Skor
1	2	3
1	Apabila berfungsi menghubungkan dengan lokasi lain dan panjang jalan 25-50 m/Ha	5
2	Apabila menghubungkan dengan lokasi dan panjang jalan 25 m/Ha	3
3	Apabila tidak menghubungkan dengan lokasi lain dan tidak memiliki panjang jalan sesuai standar 25-50 m/Ha	1

Sumber: Standar Pelayanan Minimal PR/PP/PU No.53/KPTS/M/2001

Tabel 13. Skoring pada Indikator Kondisi

No.	Kriteria	Skor
1	2	3
1	Apabilah kondisi konstruksi jalan aspal dan beton	5
2	Apabilah kondisi konstruksi jalan pekerasan	3
3	Apabilah kondisi kontruksi jalan tanah	1

Sumber: Standar Pelayanan Minimal PR/PP/PU No.53/KPTS/M/2001

2) Jembatan

Tabel 14. Skoring pada Indikator Ketersediaan

No.	Kriteria	Skor
1	2	3
1	Apabila lebar jembatan sesuai dengan lebar jalan yaitu 2-5 m	5
2	Apabila lebar jembatan kurang 1 meter dari lebar jalan 2-5 m	3
3	Apabila lebar jembatan tidak sesuai dengan lebar jalan 2-5 m	1

Sumber: Standar Pelayanan Minimal PR/PP/PU No.53/KPTS/M/2001

Tabel 15. Skoring pada Indikator Kondisi

No.	Kriteria	Skor
1	2	3
1	Apabila kondisi konstruksi jembatan aspal dan beton	5
2	Apabila kondisi konstruksi jembatan kayu	3
3	Apabila kondisi konstruksi jembatan tanah	1

Sumber: Standar Pelayanan Minimal PR/PP/PU No.53/KPTS/M/2001

b. Infrastruktur pendukung pertanian

Untuk pemberian skoring pada variabel penelitian Infrastruktur pendukung pertanian, yang dimana terbagi atas dua sub variabel penelitian yaitu irigasi pedesaan dan jalan tani.

Dengan indikator penelitian masing-masing sub variabel terbagi atas dua yaitu indikator ketersediaan dan indikator kondisi dimana dapat dilihat pada Tabel 16 berikut:

1) Irigasi pedesaan

Tabel 16. Skoring pada Indikator Ketersediaan

No.	Kriteria	Skor
1	2	3
1	Apabila terdapat sumber air berupa waduk, sungai, danau pada sistem irigasi sekunder dan tersier untuk pertanian	5
2	Apabila hanya terdapat sumber air berupa waduk pada sistem irigasi primer dan tersier untuk pertanian	3
3	Apabila tidak terdapat sumber air dan sistem irigasi sekunder dan tersier untuk pertanian.	1

Sumber: Permen PU No 04 Tahun 2014

Tabel 17. Skoring pada Indikator Kondisi

No.	Kriteria	Skor
1	2	3
1	Apabila sistem irigasi sekunder dan tersier mampu mengalir pertanian dengan luas minimal 1000 ha dan intensitas kecepatan air 50 lt/dt	5
2	Apabila sistem irigasi sekunder dan tersier mampu mengalir pertanian dengan luas minimal 500 ha dan intensitas kecepatan air 20 lt/dt	3
3	Apabila sistem irigasi sekunder dan tersier hanya mengalir pertanian <500 ha dan intensitas kecepatan air >20 lt/dt	1

Sumber: Permen PU No 04 Tahun 2014

2) Jalan tani

Tabel 18. Skoring pada Indikator Ketersediaan

No.	Kriteria	Skor
1	2	3
1	Apabila panjang jalan usaha tani sesuai standar antara 50-100 m/ha	5
2	Apabila panjang jalan usaha tani hanya 45 m/ha	3
3	Apabila panjang jalan usaha tani hanya <45 m/ha	1

Sumber: web.ipb.ac.id Jalan Tani

Tabel 19. Skoring pada Indikator Kondisi

No.	Kriteria	Skor
1	2	3
1	Apabila permukaan jalan tani di aspal dan beton	5
2	Apabila permukaan jalan tani di pekeras	3
3	Apabila konstruksi jalan tani tanah.	1

Sumber: web.ipb.ac.id Jalan Tani

c. Infrastruktur pemenuhan dasar masyarakat

Untuk pemberian skoring pada variabel penelitian Infrastruktur pemenuhan dasar masyarakat, yang dimana terbagi atas empat sub variabel penelitian yaitu air bersih, sanitasi, telekomunikasi, dan listrik.

Dengan indikator penelitian masing-masing sub variabel terbagi atas dua indikator yaitu indikator ketersediaan dan indikator kondisi dimana dapat dilihat pada Tabel 20 berikut:

1) Air bersih

Tabel 20. Skoring pada Indikator Ketersediaan

No.	Kriteria	Skor
1	2	3
1	Apabila terdapat sarana sistem pelayanan perpipaan yaitu Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)	5
2	Apabila terdapat sarana sistem pelayanan non perpipaan berupa mata air, sumur bor, dan air dari pegunungan	3
3	Apabila terdapat sumber air hujan yang di tampung oleh masyarakat	1

Sumber: Permen PU No 04 Tahun 2014 Tentang SPM

Tabel 21. Skoring pada Indikator Kondisi

No.	Kriteria	Skor
1	2	3
1	Apabila memenuhi kebutuhan rumah tangga 60-100 liter/orang/hari	5
2	Apabila kebutuhan rumah tangga hanya 50-55 liter/orang/hari	3
3	Apabila kebutuhan air bersih untuk rumah tangga hanya <50 liter/orang/hari	1

Sumber: SNI 03-1733-2004 Tentang Perencanaan Lingkungan Perumahan

2) Sanitasi

Tabel 22. Skoring pada Indikator Ketersediaan

No.	Kriteria	Skor
1	2	3
1	Apabila tersedianya saluran pembuangan air limbah, sumur resapan, MCK, dan tempat pembuangan sampah untuk masyarakat	5
2	Apabila kurang tersedia saluran pembuangan air limbah, sumur resapan, MCK, dan pembuangan sampah untuk masyarakat	3
3	Apabila tidak tersedianya saluran pembuangan air limbah, sumur resapan, MCK dan tempat pembuangan sampah untuk masyarakat.	1

Sumber: SNI 03-1733-2004 Tentang Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan, SNI 2398-2017 tentang Tata Cara Perencanaan Tangki Septik.

Tabel 23. Skoring pada Indikator Kondisi

No.	Kriteria	Skor
1	2	3
1	Apabila saluran pembuangan air limbah, sumur resapan, MCK, dan tempat pembuangan sampah yang berfungsi dengan baik	5
2	Apabila saluran pembuangan air limbah, sumur resapan, MCK, dan tempat pembuangan sampah yang berfungsi kurang baik	3
3	Apabila saluran pembuangan air limbah, sumur resapan, MCK, dan tempat pembuangan sampah tidak berfungsi	1

Sumber: SNI 03-1733-2004 Tentang Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan, SNI 2398-2017 tentang Tata Cara Perencanaan Tangki Septik.

3) Telekomunikasi

Tabel 24. Skoring pada Indikator Ketersediaan

No.	Kriteria	Skor
1	2	3
1	Apabila terdapat layanan telepon rumah tangga 1 KK = jiwa, telepon umum per 1000 jiwa, dan telepon komersial 10% dari telepon domestic	5
2	Apabila layanan telepon rumah tangga kurang dari 1 KK = jiwa, telepon umum kurang dari 1000 jiwa, dan telepon komersial kurang dari 10 % dari telepon domestic	3
3	Apabila tidak terdapat layanan telepon rumah tangga, telepon umum, telepon komersial	1

Sumber: SNI 03-1733-2004 Tentang Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan.

Tabel 25. Skoring pada Indikator Kondisi

No.	Kriteria	Skor
1	2	3
1	Apabila terdapat fasilitas Radio Pemancar Jaringan yang memenuhi kebutuhan masyarakat	5
2	Apabila fasilitas Radio Pemancar Jaringan kurang memenuhi kebutuhan masyarakat	3
3	Apabila tidak terdapat fasilitas Radio Pemancar Jaringan	1

Sumber: SNI 03-1733-2004 Tentang Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan

4) Listrik

Tabel 26. Skoring pada Indikator Ketersediaan

No.	Kriteria	Skor
1	2	3
1	Apabila terdapat gardu listrik yang melayani penduduk 1000 jiwa	5
2	Apabila terdapat gardu listrik yang hanya melayani penduduk 500 jiwa	3
3	Apabila tidak terdapat gardu listrik yang melayani penduduk jiwa	1

Sumber: SNI 03-1733-2004 Tentang Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan.

Tabel 27. Skoring pada Indikator Kondisi

No.	Kriteria	Skor
1	2	3
1	Apabila layanan energi listrik 900 W/rumah	5
2	Apabila layanan energi listrik 450 W/rumah	3
3	Apabila layanan energi listrik 300 W/rumah	1

Sumber: SNI 03-1733-2004 Tentang Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan

2. Alat analisis untuk rumusan masalah kedua

Rumusan masalah kedua membahas mengenai bagaimana pengaruh ketersediaan dan kondisi infrastruktur dalam mendukung pengembangan wilayah pedesaan di Kecamatan Latimojong, Kabupaten Luwu. Sehingga, analisis yang digunakan untuk memperoleh data tersebut, yaitu:

Chi-Square disebut juga dengan kai kuadrat. *Chi-Square* adalah salah satu jenis uji komparatif non parametris yang dilakukan pada dua variabel, di mana skala data kedua variabel adalah nominal. Analisis *Chi-Square* atau uji *Chi-Square* berguna untuk menguji pengaruh dua buah variabel nominal dan mengukur kuatnya hubungan antara variabel yang satu dengan variabel nominal lainnya ($C = \text{Coefisien of contingency}$). (Sirait B.S, 2018:40)

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel bebas (*Varabel independent*) dan variabel terikat (*Variabel Dependen*). Variabel Independen sering disebut sebagai variabel *stimulus*, *predictor*, *antecedent* yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat).

Dimana:

Y = Pengembangan Wilayah

X1 = Infrastruktur Pendukung Aksesibilitas: Jaringan Jalan dan Jembatan

X2 = Infrastruktur Pendukung Pertanian: Irigasi Perdesaan, Jalan Tani.

X3 = Infrastruktur Pemenuhan Dasar Masyarakat: Penyediaan Air Bersih,

Sanitasi, Telekomunikasi, dan Jaringan Listrik.

Analisis *Chi-Square* memiliki karakteristik :

- a. Nilai Chi-Square selalu positif.

b. Terdapat beberapa keluarga distribusi *Chi-Square*, yaitu distribusi *Chi-Square* dengan DK=1, 2, 3, dan seterusnya.

c. Bentuk Distribusi Chi-Square adalah menjulur positif

Adapun rumus dari analisis *Chi-Square* adalah :

$$X^2 = \left[\frac{(F_0 - F_h)^2}{f_h} \right] \dots\dots\dots(2)$$

Dimana :

X^2 : Nilai *Chi*-kuadrat

F_h : Frekuensi yang diharapkan

f_0 : Frekuensi yang diperoleh/diamati

Untuk menghitung frekuensi yang diharapkan digunakan rumus:

$$fh = \frac{(n_o^i - n_o^j)^2}{N} \dots\dots\dots(3)$$

Dimana:

fh : Frekuensi yang diharapkan

n_o^i : Jumlah Baris

n_o^j : Jumlah Kolom

N : Jumlah Sampel (Sugiyono, 1999 :175 dalam Basri,2017 :49)

Penarikan kesimpulan dapat dilakukan apabila memenuhi kriteria berikut :

a. X^2 hitung < X^2 tabel, maka H_0 diterima dan H_1 ditolak,

b. X^2 hitung > X^2 tabel, maka H_1 diterima dan H_0 ditolak,

Untuk mengetahui koefisien korelasi variabel X terhadap variabel Y berdasarkan hasil yang diperoleh, maka digunakan uji kontingensi sebagai berikut:

$$C = \sqrt{\frac{x^2}{(N+x^2)}} \quad C_{max} = \sqrt{\frac{m}{(m-1)}} \dots \dots \dots (4)$$

Dimana:

C : Hasil koefisien kontingensi

C_{max} : Hasil maksimal koefisien kontingensi

X^2 : Hasil chi-kuadrat yang dihitung

N : Jumlah sampel (Rahman, 1991 :136 dalam Basri, 2017: 49)

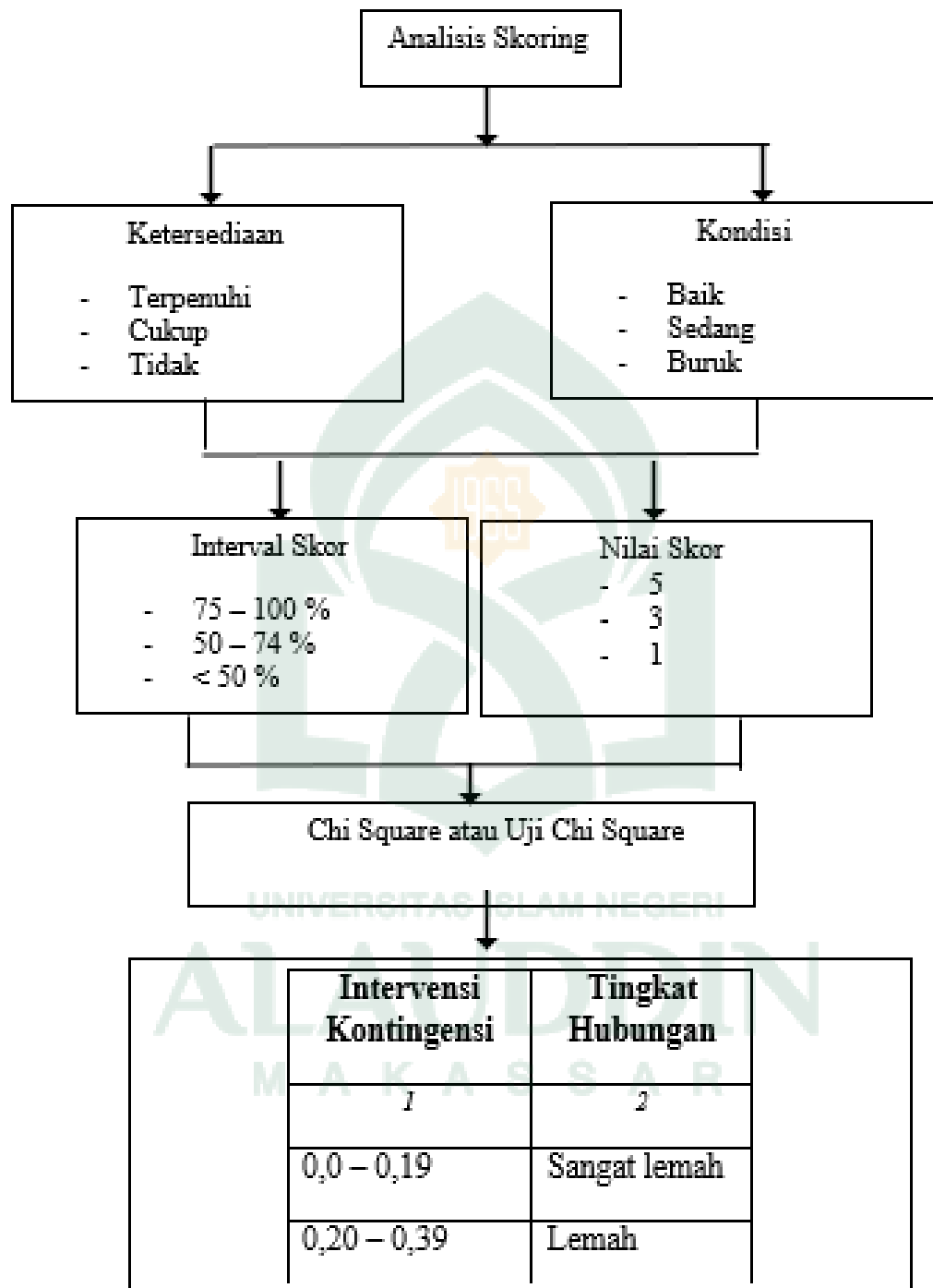
Selanjutnya untuk mengetahui keterkaitan besaran dalam hubungan antara variabel X dan variabel Y, maka digunakan skala yang telah ditetapkan sebelumnya sebagai patokan dalam interpretasi nilai presentase tersebut. Tabel skala nilai hasil uji kontingensi dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 28. Skala Nilai Hasil Uji Kontingensi

Intervensi Kontingensi	Tingkat Hubungan
<i>1</i>	<i>2</i>
0,0 – 0,19	Sangat lemah
0,20 – 0,39	Lemah
0,40 – 0,59	Sedang
0,60 – 0,79	Kuat
0,80 – 1	Sangat Kuat

Sumber: Hasil Analisis

H. Alur Analisis



I. Definisi Oprasional

Dalam definisi operasional ini ada beberapa pengertian yang berkaitan dengan pokok pembahasan materi penelitian untuk dijadikan acuan sebagai berikut:

1. Identifikasi

Infrastruktur adalah kegiatan yang mencari, menemukan, mengumpulkan, meneliti, mendaftarkan, mencatat data dan informasi dari kebutuhan lapangan

2. Pembangunan

Pembangunan adalah proses untuk melakukan perubahan atau suatu proses perubahan yang disengajah untuk mencapai perbaikan kehidupan dan penghidupan yang berkesinambungan.

3. Infrastruktur

Infrastruktur untuk mendukung pengembangan wilayah pedesaan berupa: Jalan, Irigasi Pedesaan, Jalan Tani, Telekomunikasi, Listrik, Air Bersih, dan Sanitasi di Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu.

4. Pengembangan

Pengembangan adalah upaya untuk meningkatkan sesuatu yang sudah ada menjadi lebih baik dan berkembang.

5. Wilayah

Wilayah adalah sebuah daerah yang dikuasai atau menjadi teritorial dari sebuah kedaulatan.

6. Pedesaan

Pedesaan adalah daerah permukiman penduduk yang sangat dipengaruhi oleh kondisi tanah, iklim, dan air sebagai syarat penting bagi terwujudnya pola kehidupan agraris.

7. Desa

Desa merupakan unit terkecil pemerintahan dalam lingkup tata pemerintahan di Indonesia.

8. Jalan

Jalan adalah satu kesatuan jaringan jalan yang terdiri atas sistem jaringan primer dan jaringan sekunder yang terjalin dalam hubungan hierarkis.

9. Irigasi Perdesaan

Irigasi perdesaan adalah sistem jaringan irigasi untuk melayani pertanian di Kecamatan Latimojong.

10. Jalan Tani

Jalan tani adalah jalan kawasan pertanian untuk memperlancar mobilitas alat dan mesin pendukung keberlangsungan pertanian dan juga sebagai jalan untuk mengangkut hasil produk pertanian dari lahan menuju penyimpanan.

11. Telekomunikasi

Jaringan telekomunikasi adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam melakukan aktivitas telekomunikasi di Kecamatan Latimojong.

12. Jaringan Listrik

Jaringan listrik adalah sistem listrik yang terdiri dari hantaran dan peralatan listrik yang terhubung satu sama lain untuk menyalurkan tenaga listrik di Kecamatan Latimojong.

13. Penyediaan Air Bersih

Penyediaan air bersih adalah proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan untuk dapat di gunakan dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari bagi masyarakat di Kecamatan Latimojong.

14. Sanitasi

Sanitasi adalah upaya untuk menjamin dan meningkatkan penyehatan lingkungan dalam suatu kawasan permukiman, termasuk pengumpulan, pengelolaan, dan pembuangan air limbah permukiman berupa persampahan, saluran air limbah, sumur resapan, dan MCK komunal di Kecamatan Latimojong.

15. Ketersediaan

Ketersediaan adalah tersedianya infrasktruktur yang memadai dengan kondisi yang baik sehingga dapat mendukung pengembangan wilayah pedesaan di Kecamatan Latimojong.

J. Metode Kerja

Tabel 29. Metode Kerja Penelitian

No	Rumusan Masalah	Tujuan	Variabel	Alat Analisis	Kesimpulan
1	2	3	4	5	6
1	Bagaimana ketersediaan dan kondisi infrastruktur dalam mendukung pengembangan wilayah pedesaan di Kecamatan Latimojong	Untuk mengetahui ketersediaan dan kondisi infrastruktur dalam mendukung pengembangan wilayah pedesaan di Kecamatan Latimojong.	<ul style="list-style-type: none"> • Infrastruktur pendukung aksesibilitas • Infrastruktur pendukung pertanian • Infrastruktur kebutuhan dasar masyarakat 	Analisis skoring	Ketersediaan dan kondisi inrastruktur
2	Bagaimana pengaruh ketersediaan infrastruktur dalam mendukung pengembangan wilayah pedesaan di Kecamatan Latimojong	Untuk mengetahui pengaruh ketersediaan infrastruktur dalam mendukung pengembangan wilayah pedesaan di Kecamatan Latimojong.	Ekonomi	Deskriptif kualitatif	Pengaruh infrastruktur terhadap pengembangan wilayah pedesaan di Kecamatan Latimojong

Sumber: Hasil Olah Pustaka Tahun 2019

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. *Gambaran Umum Kabupaten Luwu*

Letak wilayah Kabupaten Luwu berada pada $2^{\circ}34'45''$ - $3^{\circ}30'30''$ Lintang Selatan dan $120^{\circ}21'15''$ - $121^{\circ}43'11''$ Bujur Timur dari Kutub Utara dengan patokan posisi Provinsi Sulawesi Selatan, dengan demikian posisi Kabupaten Luwu berada pada bagian utara dan timur Provinsi Sulawesi Selatan dengan jarak sekitar 400 km dari Kota Makassar. Kabupaten Luwu dibatasi oleh Kabupaten Luwu Utara dan Kota Palopo disebelah utara, Teluk Bone di sebelah timur, Kota Palopo dan Kabupaten Wajo di sebelah selatan, dan Kabupaten Tana Toraja dan Kabupaten Enrekang disebelah barat. Daerah Kabupaten Luwu terbagi dua wilayah sebagai akibat dari pemekaran Kota Palopo, yaitu wilayah Kabupaten Luwu bagian selatan yang terletak sebelah selatan Kota Palopo dan wilayah yang terletak di sebelah utara Kota Palopo.

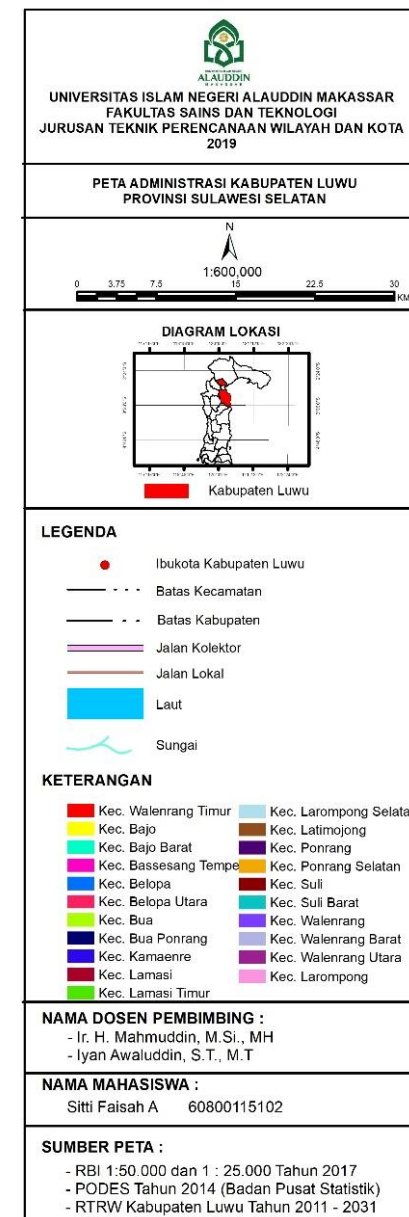
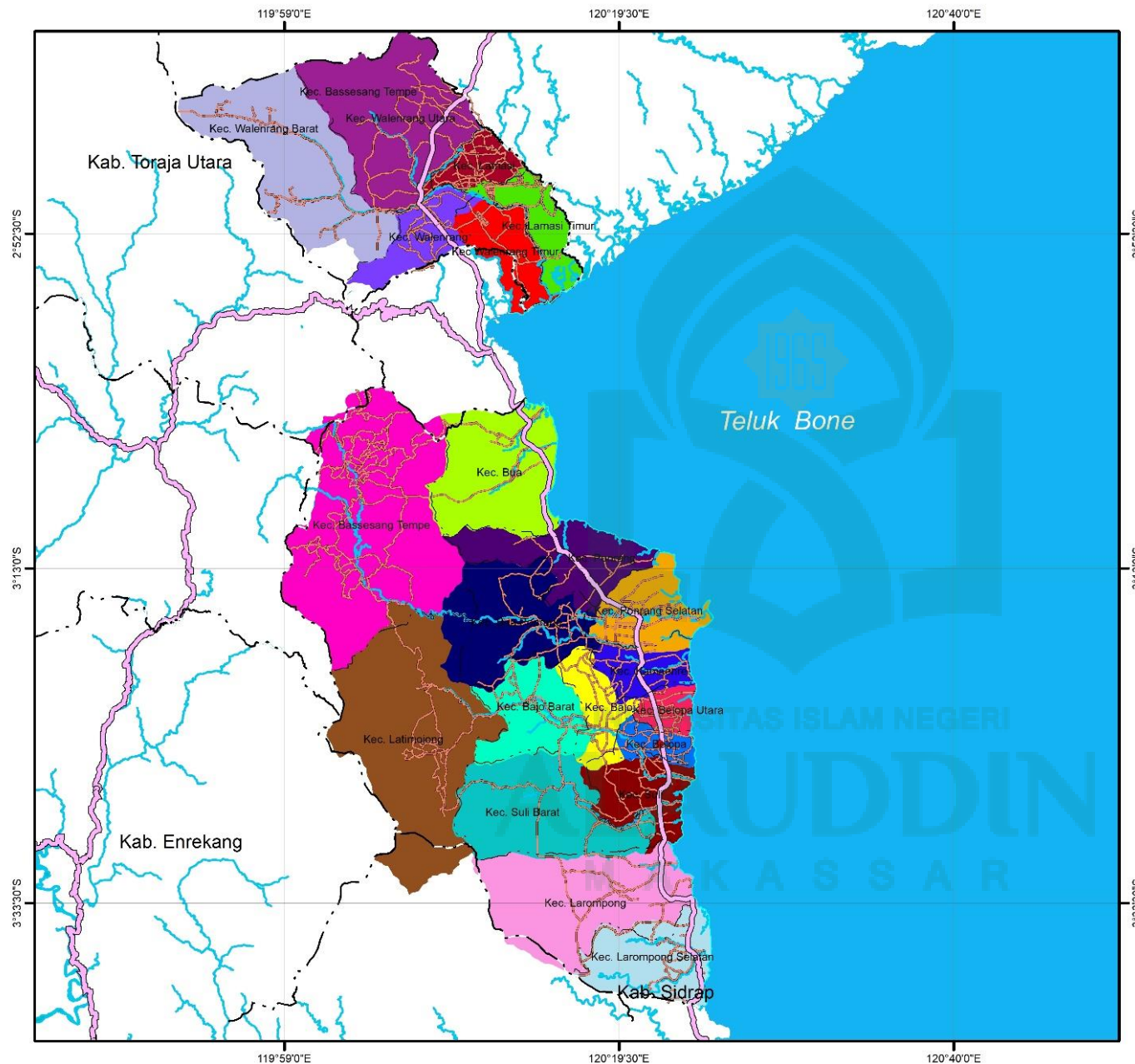
Di sebelah Timur wilayah Kabupaten Luwu dibatasi dengan Teluk Bone, adapun kecamatan yang berbatasan dengan Teluk Bone adalah Kecamatan Larompong, Larompong Selatan, Suli, Belopa, Kamanre, Belopa Utara, Ponrang, Ponrang Selatan, dan Bua. Dari sembilan kecamatan yang berbatasan dengan Teluk Bone tersebut terdapat sebanyak 37 desa/kelurahan yang diklasifikasikan sebagai daerah pantai, selebihnya sebanyak 190 desa/kelurahan adalah desa/kelurahan bukan pantai.

Tabel 30. Luas Wilayah Menurut Kecamatan
di Kabupaten Luwu Tahun 2018

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Presentase (%)
1	2	3	4
1	Larompomg	225,25	7,51
2	Larompong Selatan	131,00	4,37
3	Suli	81,75	2,72
4	Suli Barat	153,50	5,12
5	Belopa	59,26	1,98
6	Kamanre	52,44	1,75
7	Belopa Utara	34,73	1,16
8	Bajo	68,52	2,28
9	Bajo Barat	66,30	2,21
10	Bassesangtempe	178,12	5,94
11	Latimojong	467,75	15,59
12	Bassesangtempe Utara	122,88	4,10
13	Bupon	182,67	6,09
14	Ponrang	107,09	3,57
15	Ponrang Selatan	99,98	3,33
16	Bua	204,01	6,80
17	Walenrang	94,60	3,15
18	Walenrang Timur	63,65	2,12
19	Lamasi	42,20	1,41
20	Walenrang Utara	259,77	8,66
21	Walenrang Barat	247,13	8,24
22	Lamasi Timur	57,65	1,92
Total		3.000,25	100

Sumber: Kabupaten Luwu Dalam Angka 2019

Luas wilayah administrasi Kabupaten Luwu kurang lebih 3.000,25 km² terdiri dari 22 kecamatan pada tahun 2018 yang dibagi habis menjadi 227 desa/kelurahan. Kecamatan Latimojong adalah kecamatan terluas di Kabupaten Luwu, luas Kecamatan Latimojong tercatat sekitar 467,75 km² atau sekitar 15,59 persen dari luas Kabupaten Luwu, menyusul kemudian Kecamatan Walenrang Utara dan Walenrang Barat dengan luas masing-masing sekitar 259,77 km² dan 247,13 km² atau 8,66 persen dan 8,24 persen. Sedangkan kecamatan yang memiliki luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Belopa Utara dengan luas kurang lebih 34,73 km² atau hanya sekitar 1,16 persen.



B. Gambaran Umum Kecamatan Laitmojong

1. Letak Geografis dan Administratif

Kecamatan Latimojong adalah salah satu kecamatan dalam lingkup wilayah Kabupaten Luwu yang berbatasan dengan:

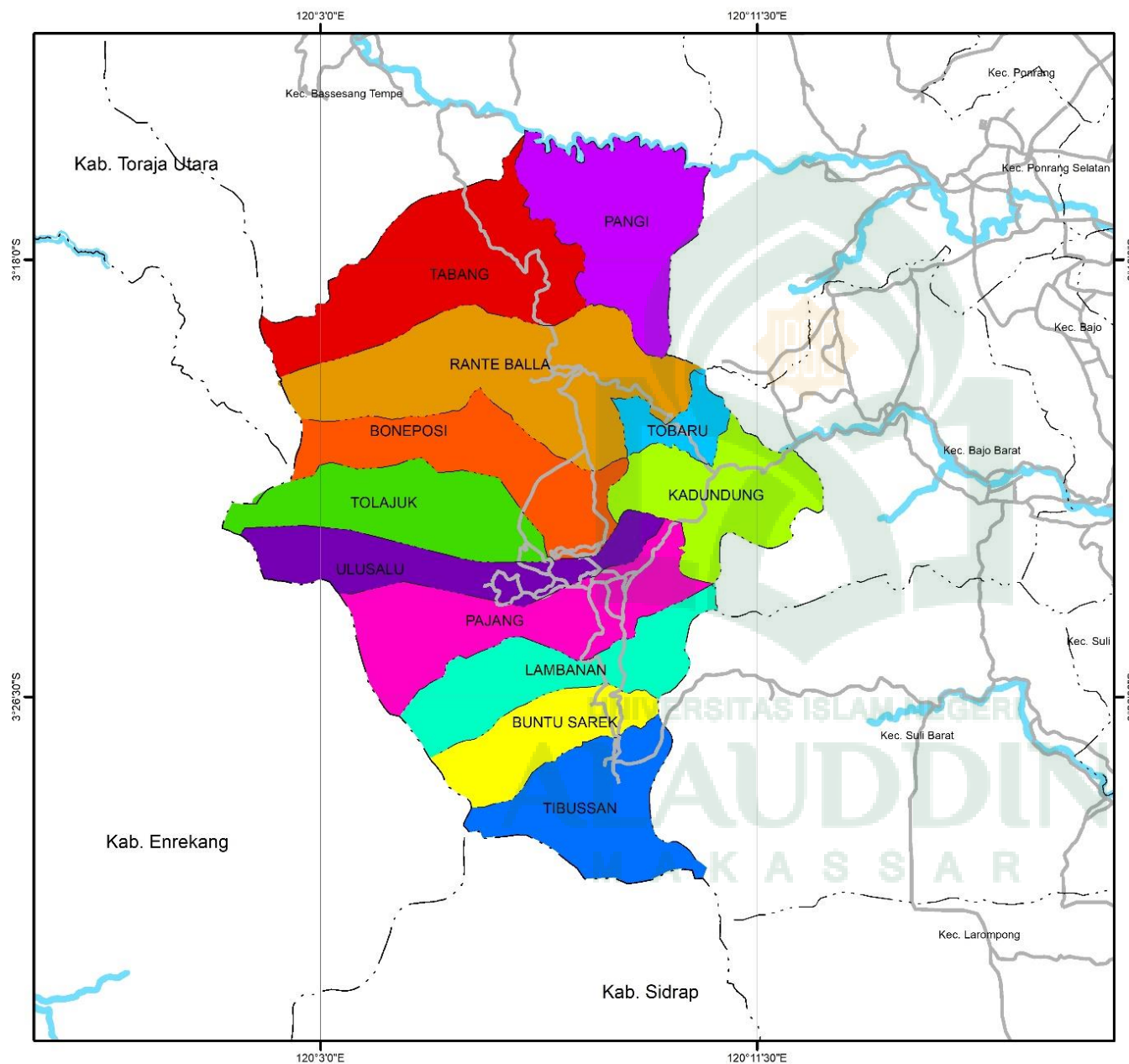
- a. Sebelah Utara: Kecamatan Basesangtempe
- b. Sebelah Timur: Kecamatan Bupon, Kecamatan Bajo Barat, dan Kecamatan Suli Barat
- c. Sebelah Selatan: Kabupaten Enrekang
- d. Sebelah Barat : Kabupaten Tana Toraja

Kecamatan Latimojong mempunyai luas 467,75 Km² dengan jumlah Desa/Kelurahan sebanyak 12. Ibu kota Kecamatan Latimojong adalah Rante Balla dengan jarak 36 Km dari Belopa Ibu Kota Kabupaten. Untuk lebih jelasnya luas wilayah Kecamatan Latimojong untuk setiap wilayah dapat dilihat pada Tabel 31 sebagai berikut.

Tabel 31. Luas Desa di Kecamatan Latimojong Tahun 2018

No	Desa/Kelurahan	Luas (Km ²)	Persentase(%)
1	2	3	4
1	Lambanan	26,30	5,62
2	Buntu Serek	46,59	9,96
3	Pajang	19,25	4,12
4	Kadundung	46,36	9,91
5	Tobaru	30,85	6,60
6	Ulusalu	19,56	4,18
7	Boneposi	11,08	2,37
8	Rante Balla	112,13	23,97
9	Pangi	77,34	16,53
10	Tabang	49,29	10,54
11	Tibussan	20,52	4,39
12	Tolajuk	8,48	1,81
Total		467,75	100

Sumber: Kecamatan Latimojong Dalam Angka Tahun 2019

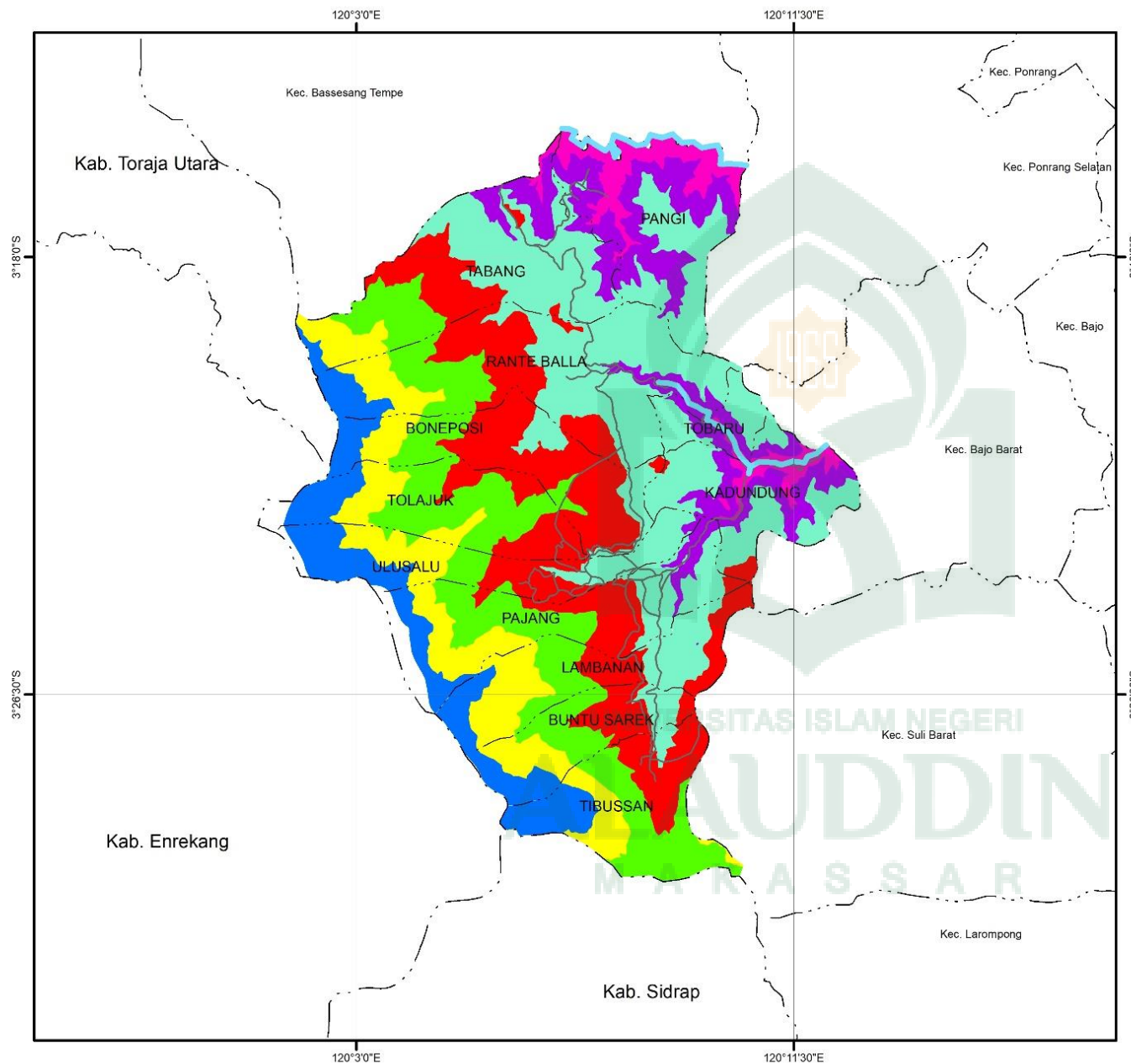


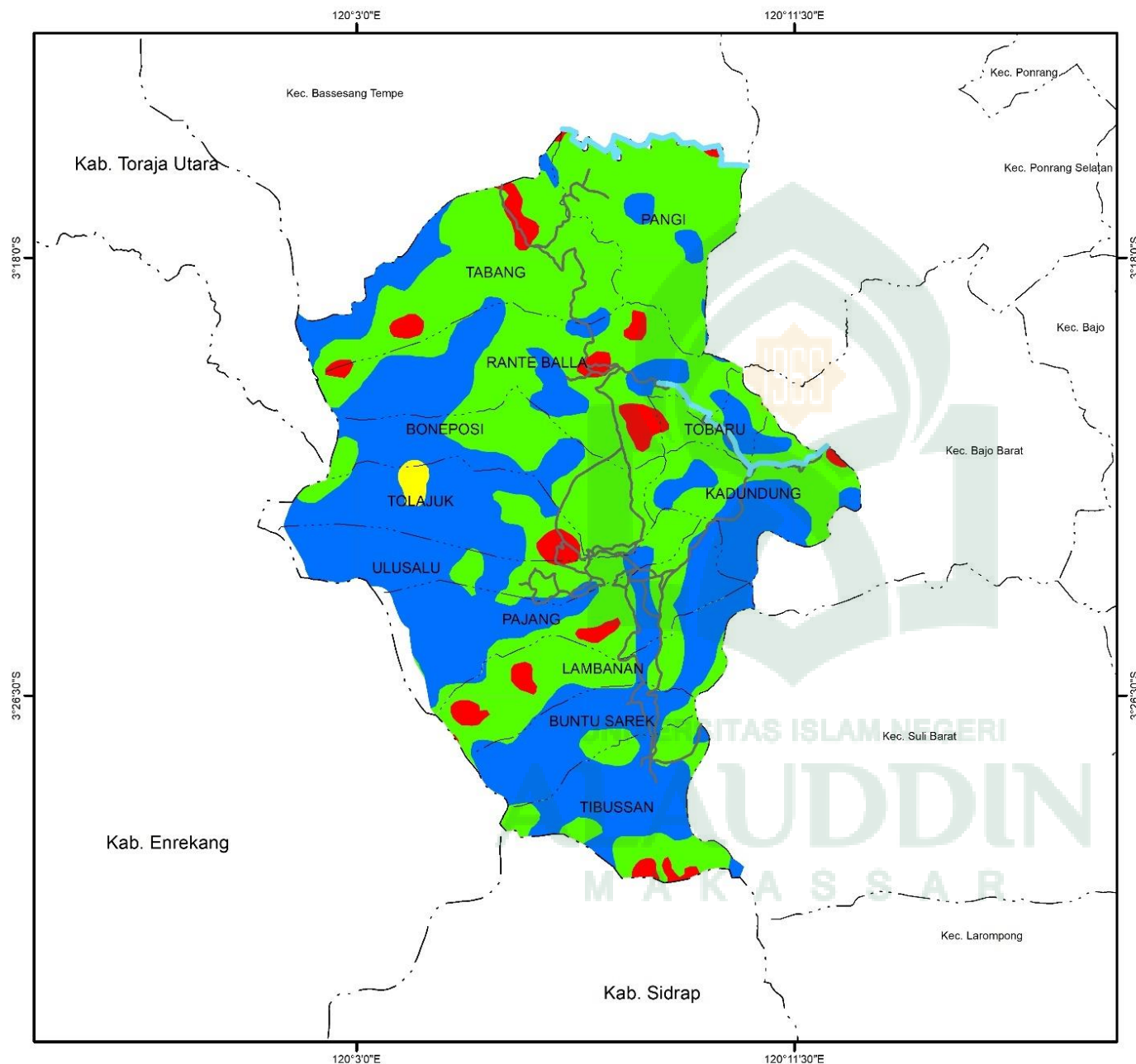
2. Kondisi Fisik Wilayah

Kondisi fisik wilayah Kecamatan Latimojong, mencakup kondisi fisik dasar, yang didalamnya terdiri dari kondisi topografi, geologi, jenis tanah, kemampuan lahan, hidrologi, iklim dan penggunaan lahan, serta sumberdaya alam.

a. Ketinggian dan Kemiringan Lereng

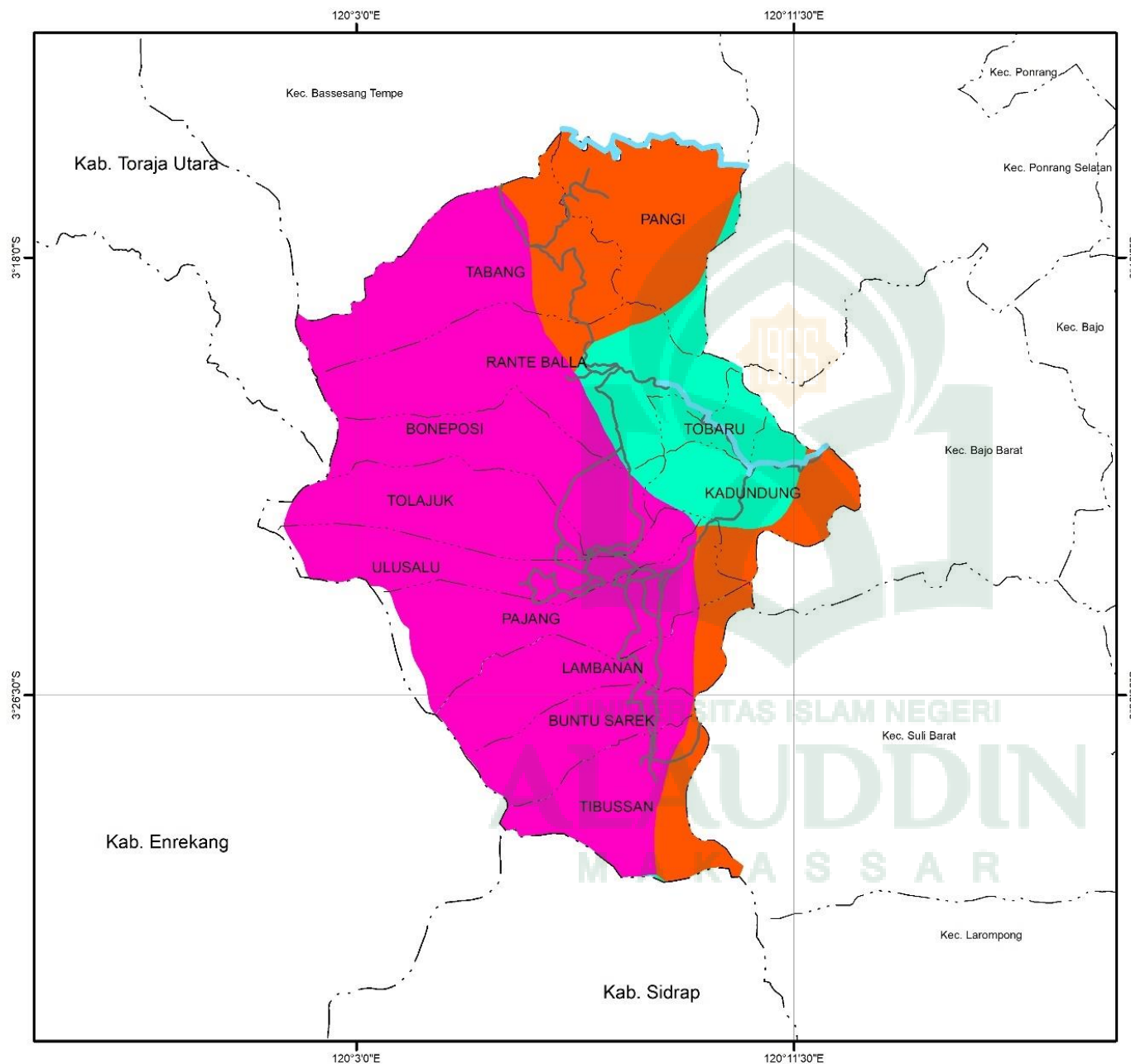
Wilayah daratan Latimojong memiliki topografi dan lereng yang tinggi atau relatif pegunungan. Dipandang dari sisi lereng, maka secara garis besar Kecamatan Latimojong juga berada pada daerah kelerengan antara ketinggian >100 m (dpl). Secara alami faktor letak lintang atau ketinggian suatu wilayah dari permukaan laut (dpl) berpengaruh terhadap lingkungan fisik seperti suhu dan jenis flora dan fauna yang mendiaminya yang berdampak kepada potensi pengembangan penggunaan lahan.





b. Geologi dan jenis tanah

Morfologi pegunungan vulkanik mempunyai relief topografi tinggi. Batuan pegunungan adalah batuan gunung api dari formasi Latimojong. Formasi Latimojong tersusun dari batuan sedimen liat berselingan dengan batuan gunung api (vulkanik), batu pasir tufaan berselingan dengan batu tufa, batu pasir, batu lanan dan batu lempung umumnya mengeras kuat dan sebagian kurang padat. Tufanya berbutir halus (lapilli), mengandung fosil foraminifera kecil yang menunjukkan umur miosen tengah sampai miosen akhir dan di endapkan dalam lingkungan neritic yang memiliki beberapa jenis tanah yaitu Podsolik Violet, Mediteran Coklat Kelabu, Aluvial Kelabu, Podsolik merah kekuningan yang sangat berpotensi untuk kegiatan pertanian dan perkebunan.




UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
JURUSAN TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
2019

PETA GEOLOGI
KECAMATAN LATIMOJONG
KABUPATEN LUWU


 0 1 2 3 4 5 6 7 8
 1:190,000
 KM

DIAGRAM LOKASI

 Kecamatan Latimojong

LEGENDA

- Batas Desa
- - - Batas Kecamatan
- - - Batas Kabupaten
- Jalan Lokal
- Sungai

KETERANGAN

- Batuan Gunung Api Lamasi
- Batuan Terobosan
- Formasi Latimojong

NAMA DOSEN PEMBIMBING :

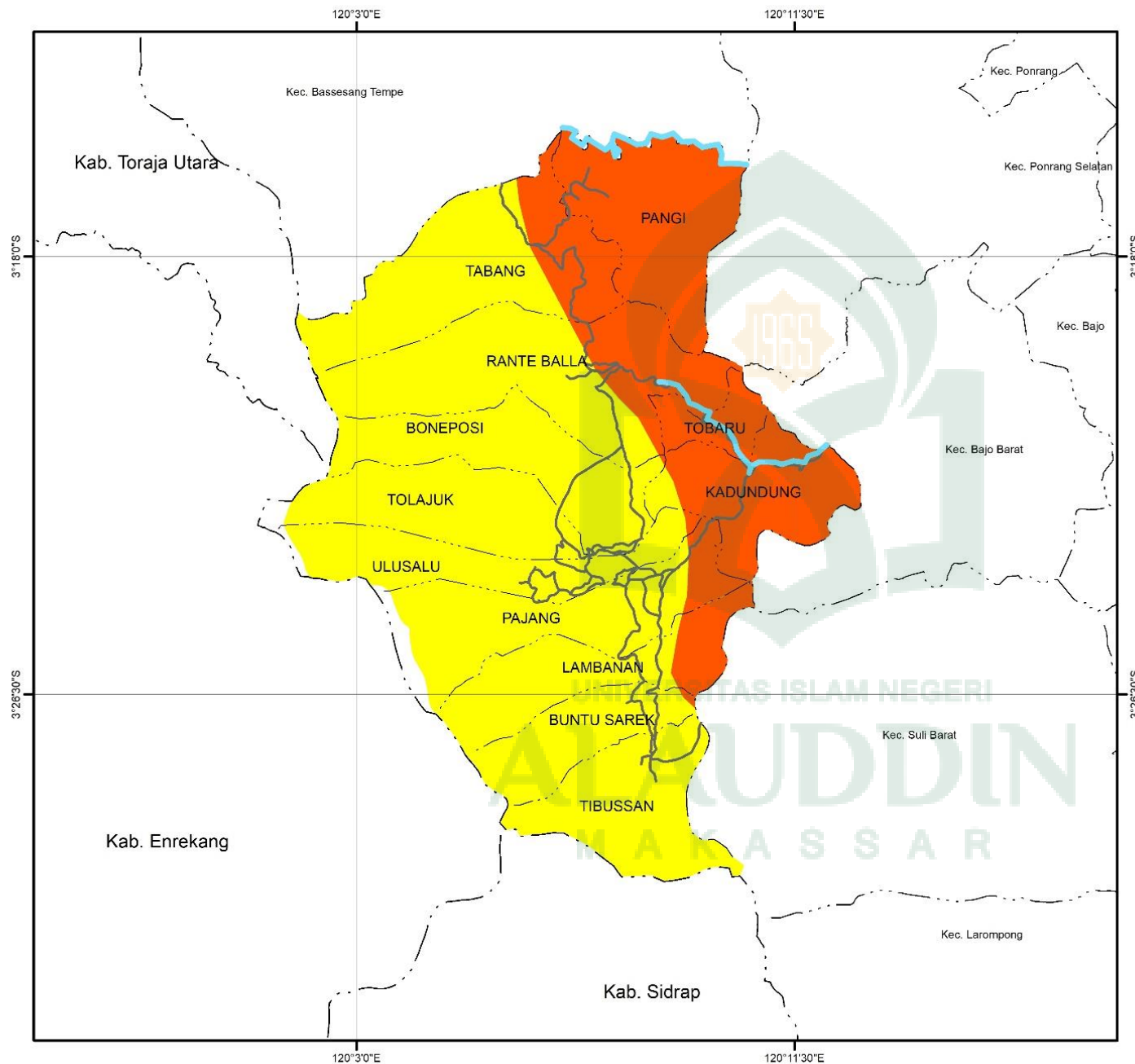
- Ir. H. Mahmuddin, M.Si., M.H
- Iyan Awaluddin, S.T., M.T

NAMA MAHASISWA :

Sitti Faisah A 60800115102

SUMBER PETA :

- RBI 1:50.000 dan 1 : 25.000 Tahun 2017
- PODES Tahun 2014 (Badan Pusat Statistik)
- RTRW Kabupaten Luwu Tahun 2011 - 2031

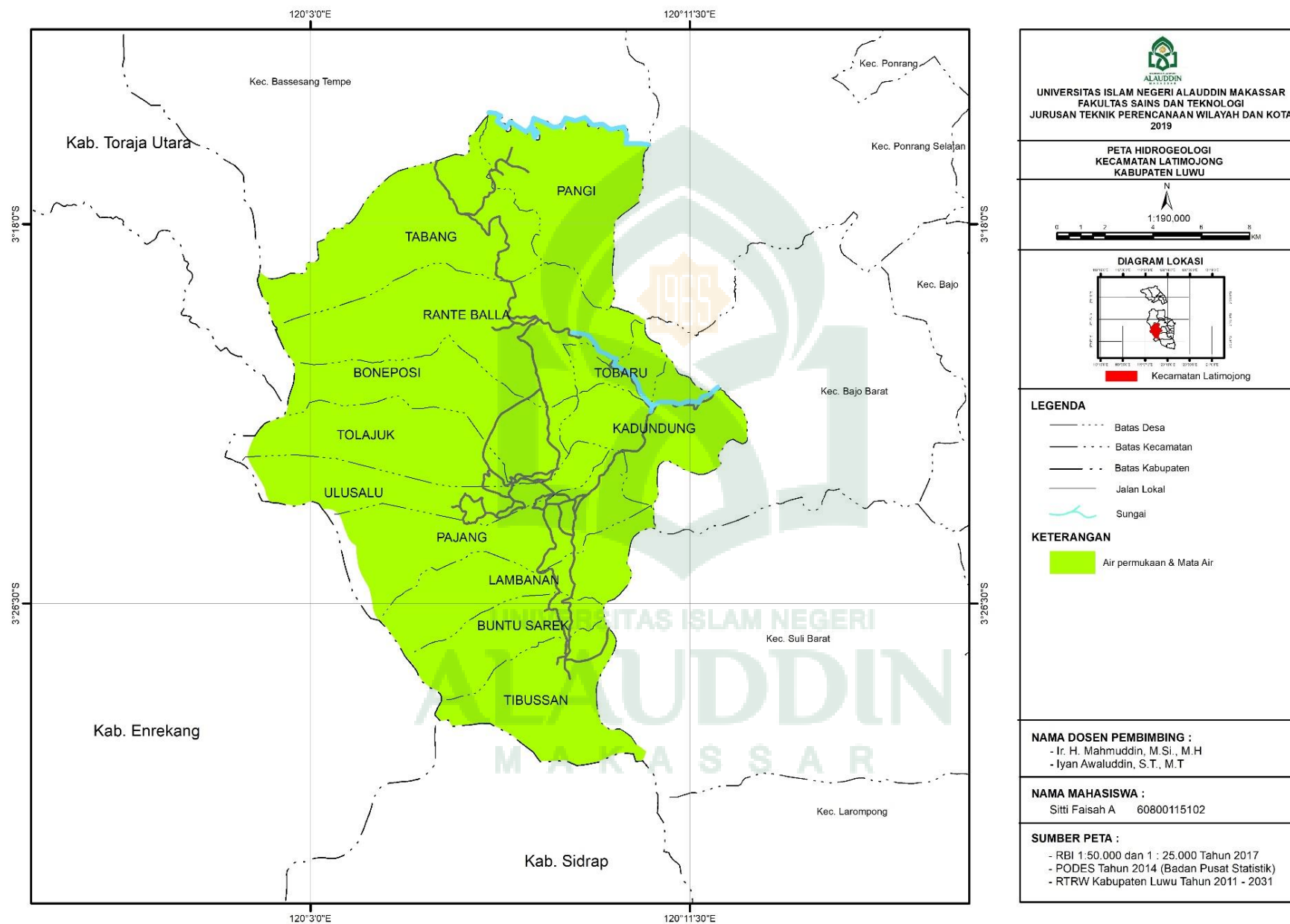


 <p>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI JURUSAN TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA 2019</p>
<p>PETA JENIS TANAH KECAMATAN LATIMOJONG KABUPATEN LUWU</p>
<p>DIAGRAM LOKASI</p>  <p>Kecamatan Latimojong</p>
<p>LEGENDA</p> <ul style="list-style-type: none"> ----- Batas Desa - - - - - Batas Kecamatan - - - - - Batas Kabupaten — Jalan Lokal — Sungai <p>KETERANGAN</p> <ul style="list-style-type: none"> Gromusol Mediteran
<p>NAMA DOSEN PEMBIMBING :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ir. H. Mahmuddin, M.Si., M.H - Iyan Awaluddin, S.T., M.T
<p>NAMA MAHASISWA :</p> <p>Sitti Faisah A 60800115102</p>
<p>SUMBER PETA :</p> <ul style="list-style-type: none"> - RBI 1:50.000 dan 1 : 25.000 Tahun 2017 - PODES Tahun 2014 (Badan Pusat Statistik) - RTRW Kabupaten Luwu Tahun 2011 - 2031

c. Kondisi hidrologi

Pada wilayah Kecamatan Latimojong terdapat 6 (enam) sungai, diantaranya sungai lambanan panjang 49 km, sungai katangka panjang 50 km, sungai pajang 60 km, sungai kadundung panjang 39 km, sungai toke panjang 35 km, sungai ulu salu panjang 52 km, sungai boneposi panjang 29 km, dan sungai noling dengan panjang 63 km.





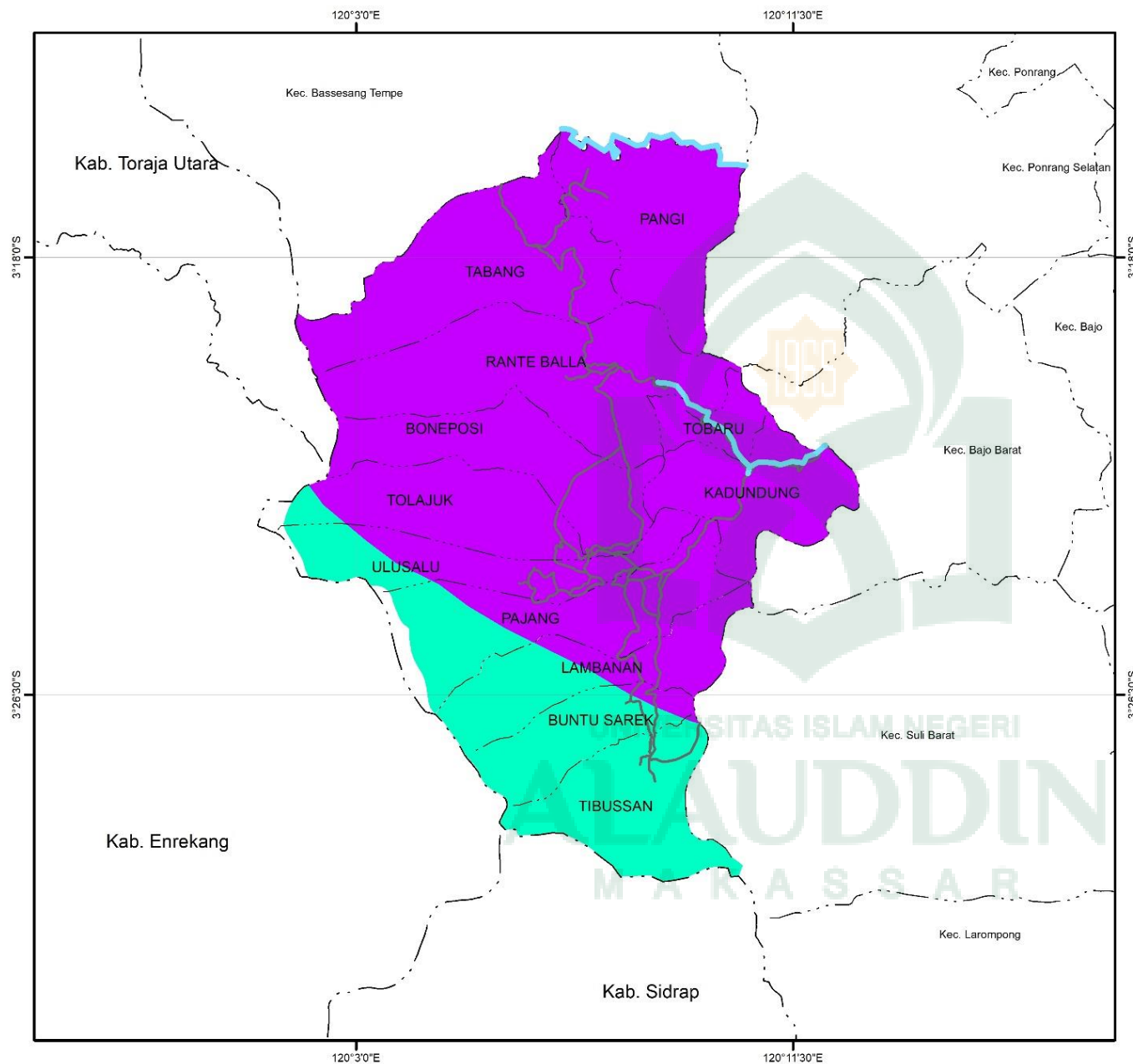
d. Kondisi Iklim

Faktor utama yang mempengaruhi kegiatan pertanian tanaman pangan dan perkebunan adalah Iklim. Kondisi iklim Kecamatan Latimojong digolongkan kedalam iklim tropis dalam artian kondisi tersebut berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Adapun kondisi zone agroklimatologi di Kecamatan Latimojong dengan bulan basah mencapai 8 – 10 bulan dengan curah hujan lebih dari 149 mm per bulan, sedangkan bulan kering mencapai 2 – 3 bulan.

Tabel 32. Rata-Rata Curah Hujan di Kecamatan Latimojong Tahun 2018

No	Bulan	Curah Hujan (mm)	Persentase (%)
1	2	3	4
1	Januari	120	7,74
2	Februari	96	6,19
3	Maret	70	4,52
4	April	293	18,91
5	Mei	246	15,88
6	Juni	18	1,16
7	Juli	108	6,97
8	Agustus	48	3,09
9	September	107	6,90
10	Oktober	64	4,13
11	November	149	9,62
12	Desember	230	14,84
Jumlah		1,549	100

Sumber: Kecamatan Latimojong Dalam Angka Tahun 2019



3. Penggunaan lahan

Pola penggunaan lahan suatu Daerah adalah merupakan suatu ruangan sebagai hasil gabungan suatu aktivitas manusia, sesuai dengan tingkat teknologi, jenis usaha, kondisi fisik. Hal tersebut sekaligus juga mencirikan kualitas kegiatan penduduk di suatu Daerah.

Sumberdaya lahan di Kecamatan Latimojong dapat terlihat dari kondisi penggunaan lahan atau pemanfaatan lahan yang terbentuk. Pada dasarnya pembentukan pola pemanfaatan lahan dipengaruhi oleh faktor fisik lahan seperti letak geografis, struktur geologi dan tanah, klimatologi wilayah, dan sektor kegiatan ekonomi masyarakat. Pemanfaatan lahan yang terbentuk hingga saat ini di Kecamatan Latimojong terdiri atas Sawah, Lahan Kering, Bangunan/Pekarangan, Perkebunan, Ladang, Padang Rumput, Rawa Hutan Rakyat, Hutan Negara, dan lain-lain. Dari luas wilayah Kecamatan Latimojong 467,75 Km² didominasi oleh peruntukan perkebunan mencapai sekitar 7,017 Ha, dari total luas wilayah Kecamatan Latimojong dan luasan yang terbesar untuk pemanfaatan lahan perkebunan adalah Desa Pangi dan Desa Rante Balla yaitu masing-masing 1,142 Ha, dan 886 Ha. Untuk Lebih Jelasnya dapat dilihat pada Tabel 33 sebagai berikut.

Tabel 33. Luas Penggunaan Lahan Di Kecamatan Latimojong Tahun 2018

No	Penggunaan Lahan	Luas Lahan (Km ²)
1	2	3
1	Lahan Sawah	670
2	Lahan Kering	2,145
3	Tegal/Kebun	3,699
4	Ladang/Huma	895
5	Padang Rumput	1,975
6	Hutan Rakyat	435
7	Hutan Negara	9,703
8	Perkebunan	3,318

No	Penggunaan Lahan	Luas Lahan (Km ²)
1	2	3
9	Bangunan/Pekarangan	996
10	Lain-Lain	7,221
Jumlah		467,75

Sumber: Kecamatan Latimojong Dalam Angka Tahun 2019

4. Aspek kependudukan

a. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk di Kecamatan latimojong yakni 5,628 jiwa yang tersebar di setiap Desa/ Kelurahan. Adapun jumlah penduduk dikawasan peneli tian dapat dilihat pada Tabel 34 sebagai berikut.

Tabel 34. Jumlah Penduduk di Kecamatan Latimojong Tahun 2018

No	Desa/Kelurahan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Persentase (%)
1	2	3	4
1	Lambanan	383	6,80
2	Buntu Serek	489	8,68
3	Pajang	448	7,96
4	Kadundung	436	7,74
5	Tobaru	237	4,21
6	Ulusalu	778	13,82
7	Boneposi	565	10,04
8	Rante Balla	791	14,05
9	Pangi	269	4,77
10	Tabang	485	8,61
11	Tibussan	386	6,85
12	Tolajuk	361	6,41
Jumlah		5,628	100 %

Sumber: Kecamatan Latimojong Dalam Angka Tahun 2019

b. Kepadatan Penduduk

Mengetahui distribusi kepadatan penduduk di suatu wilayah dimaksudkan untuk mengidentifikasi tingkat kepadatan wilayah tertentu dalam kaitannya dengan jumlah penduduk baik dalam

spasialperekonomian, pembangunan hingga produktivitas wilayah. Distribusi kepadatan penduduk di wilayah penelitian yakni 19,84 jiwa/Km² dengan berasumsi pada 5,628 jiwa jumlah penduduk dan luas wilayah 467,26 Km². Untuk lebih jelasnya kepadatan penduduk di kawasan penelitian dapat dilihat pada tabel 35 sebagai berikut.

Tabel 35. Kepadatan Penduduk Di Kecamatan Latimojong Tahun 2018

No	Desa/Kelurahan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Luas (Km ²)	Kepadatan (Jiwa/Km ²)
1	2	3	4	5
1	Lambanan	383	26,30	14,56
2	Buntu Serek	489	46,59	10,50
3	Pajang	448	19,25	23,27
4	Kadundung	436	46,36	9,40
5	Tobaru	237	30,85	7,81
6	Ulusalu	778	19,56	39,78
7	Boneposi	565	11,08	50,99
8	Rante Balla	791	112,13	7,05
9	Pangi	269	77,34	3,48
10	Tabang	485	49,29	9,84
11	Tibussan	386	20,52	18,81
12	Tolajuk	361	8,48	42,57
Jumlah		5,628	467,75	19,84

Sumber: Kecamatan Latimojong Dalam Angka Tahun 2019

c. Komposisi penduduk

1) Penduduk menurut jenis kelamin

Berdasarkan data pada tahun 2018 jumlah penduduk Kecamatan Latimojong yang terdiri dari jenis kelamin laki-laki sebanyak 2,894 jiwa dan perempuan sebanyak 2,734 jiwa. Adapun jumlah penduduk menurut jenis kelamin laki-laki terbanyak terdapat di Desa Rante Balla dengan jumlah 395 jiwa, sedangkan jumlah penduduk laki-laki terendah terdapat di Desa Tobaru 111 jiwa. Sedangkan untuk jumlah penduduk dengan jenis kelamin perempuan terbanyak terdapat di Desa Ulusalu dengan

jumlah 397 jiwa dan jumlah penduduk jenis kelamin perempuan terendah terdapat di Desa Pangi dengan jumlah 122 jiwa. Untuk lebih jelasnya mengenai jumlah penduduk menurut jenis kelamin di Kecamatan Latimojong Tahun 2018 dapat dilihat pada Tabel 36 sebagai berikut.

Tabel 36. Penduduk Menurut Jenis Kelamin Tahun 2018

No	Desa/Kelurahan	Jenis Kelamin		Jumlah Penduduk (Jiwa)
		Laki-Laki	Perempuan	
1	2	3	4	5
1	Lambanan	200	183	383
2	Buntu Serek	243	246	489
3	Pajang	243	205	448
4	Kadundung	242	194	436
5	Tobaru	111	126	237
6	Ulusalu	381	397	778
7	Boneposi	286	279	565
8	Rante Balla	395	396	791
9	Pangi	147	122	269
10	Tabang	259	226	485
11	Tibussan	200	186	386
12	Tolajuk	187	174	361
Jumlah		2.894	2.734	5.628

Sumber: Kecamatan Latimojong Dalam Angka Tahun 2019

2) Penduduk menurut usia

Berdasarkan data pada Tahun 2018 jumlah penduduk Kecamatan Latimojong menurut kelompok umur diketahui bahwa usia rata-rata penduduk adalah 5 – 9 dan 10 – 14 tahun atau tergolong usia anak-anak dengan jumlahnya masing-masing 701 jiwa dan 555 jiwa. Sedangkan usia produktif yaitu 25 – 34 tahun masih tergolong sedang. Hal ini mengisyaratkan bahwa tingkat pertumbuhan penduduk di Kecamatan Latimojong mulai menunjukkan perkembangan yang pesat dalam jangka waktu 10 tahun terakhir yang diperlihatkan dengan tingginya penduduk yang berumur 0 – 9 tahun. Untuk lebih jelasnya mengenai jumlah

penduduk Kecamatan Latimojong berdasarkan kelompok umur dapat dilihat pada Tabel 37 sebagai berikut.

Tabel 37. Penduduk Menurut Usia di Kecamatan Latimojong Tahun 2018

No	Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah Penduduk (Jiwa)
		Laki-Laki	Perempuan	
1	2	3	4	5
1	0 – 4	363	363	726
2	5 – 9	367	334	701
3	10 – 14	268	287	555
4	15 – 19	231	174	405
5	20 – 24	237	199	436
6	25 – 29	225	213	438
7	30 – 34	231	213	444
8	35 – 39	207	173	380
9	40 – 44	167	167	334
10	45 – 49	135	134	269
11	50 – 54	112	123	235
12	55 – 59	119	118	237
13	60 – 64	78	88	166
14	65+	154	148	302
Jumlah		2.894	2.734	5.628

Sumber: Kecamatan Latimojong Dalam Angka Tahun 2019

3) Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharia

Masyarakat Kecamatan Latimojong sebahagian besar bermata pencaharian sebagai petani, pedagang, dan sebahagian lagi berprofesi sebagai pegawai negeri, dan pegawai swasta. Pola ketenagakerjaan yang ada di Kecamatan Latimojong sangat di pengaruhi oleh kualitas individu maupun sector pendidikan yang ada di bawah ini akan disajikan tabulasi jumlah masyarakat berdasarkan mata pencaharian. Untuk lebih jelasnya penduduk berdasarkan mata pencaharian dapat dilihat pada Tabel 38 sebagai berikut.

Tabel 38. Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian di Kecamatan Latimojong Tahun 2018

No	Mata Pencaharian	Jumlah (Jiwa)	Persentase (%)
1	2	3	4
1	Petani	2,432	43,21
2	Pedagang	359	6,37
3	Peternak	187	3,32
4	Buruh	389	6,91
5	Pengangkutan	215	3,82
6	PNS	59	1,05
7	DLL	1,987	35,30
Jumlah		5,628	100 %

Sumber: Kantor Kecamatan Latimojong Tahun 2019

C. Infrastruktur Yang Mendukung Pengembangan Wilayah Pedesaan di Kecamatan Latimojong

Adapun infrastruktur yang mendukung pengembangan wilayah pedesaan di Kecamatan Latimojong sebagai berikut: infrastruktur pendukung aksesibilitas berupa jalan dan jembatan, infrastruktur pendukung pertanian berupa irigasi pedesaan dan jalan tani serta infrastruktur pemenuhan dasar masyarakat, berupa penyediaan air bersih, sanitasi, listrik, dan telekomunikasi.

1. Jaringan Jalan

Jaringan jalan merupakan moda transportasi yang berperan penting dalam mendukung pembangunan terutama dalam kontribusinya untuk melayani mobilitas manusia maupun koleksi dan distribusi barang. Selain jaringan jalan juga diperlukan untuk menjembatani kesenjangan dan mendorong pemerataan hasil-hasil pembangunan antar wilayah, antar perkotaan dan antar pedesaan serta untuk mempercepat pengembangan wilayah.

a. Jenis Jalan

Jenis jalan yang terdapat di Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu umumnya berupa jalan beton dan pengerasan. Adapun jalan yang berupa jalan tanah di wilayah ini, yaitu pada wilayah dimana jumlah penduduk yang bermukim di wilayah tersebut sedikit. Adapun jenis jalan berdasarkan konstruksi dapat dilihat pada gambar/foto sebagai berikut.



Gambar 9. Jenis Jalan di Kecamatan Latimojong

Berdasarkan gambar diatas, maka rincian konstruksi jalan sebagaimana diperlihatkan pada Tabel 39 sebagai berikut.

Tabel 39. Jenis Jalan Desa/Kelurahan di Kecamatan Latimojong

No	Desa/Kelurahan	Jenis Konstruksi (Km)						Lebar (M)
		Beton	Persentase (%)	Pengerasan	Persentase (%)	Tanah	Persentase (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Lambanan	1,97	11,81	1,72	3,45	-	-	5
2	Buntu Serek	2,31	13,85	2,85	5,72	-	-	5
3	Pajang	1,01	6,05	10,73	21,53	1,62	8,61	5
4	Kadundung	-	-	6,65	13,34	-	-	5
5	Tobaru	-	-	2,35	4,71	-	-	5
6	Ulusalu	-	-	2,47	4,95	4,52	24,02	5
7	Boneposi	3,07	18,41	2,74	5,49	4,19	22,27	5
8	Rante Balla	4,53	27,17	7,71	15,47	-	-	5
9	Pangi	-	-	2,49	4,99	1,69	8,98	5
10	Tabang	2,73	16,37	4,52	9,07	3,35	17,81	5
11	Tibussan	1,05	6,29	4,41	8,85	1,09	5,79	5
12	Tolajuk	-	-	1,18	2,36	2,35	12,49	5
Total		16,67	100	49,82	100	18,81	100	

Sumber: Survey Lapangan 2019

Berdasarkan Tabel 39 dapat dilihat bahwa Desa Rante Balla memiliki konstruksi jalan beton terpanjang dengan nilai persentase 27,17 % sedangkan konstruksi jalan tanah terpanjang yaitu Desa Ulusalu dengan nilai persentase 24,02 %.

b. Kondisi Jalan

Kondisi jalan yang terdapat di Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu umumnya sudah baik semua sehingga kondisi jalan yang ada di sana hanya butuh pemeliharaan saja bagi para penduduk sekitar dan para pengguna jalan. Sedangkan jalan yang kondisinya kurang baik hanya terdapat di beberapa desa saja. Adapun kondisi jalan di Kecamatan Latimojong dapat dilihat pada gambar sebagai berikut.



Gambar 10. Kondisi Jalan di Kecamatan Latimojong

Berdasarkan gambar diatas, maka rincian kondisi jalan sebagaimana diperlihatkan pada Tabel 40 sebagai berikut.

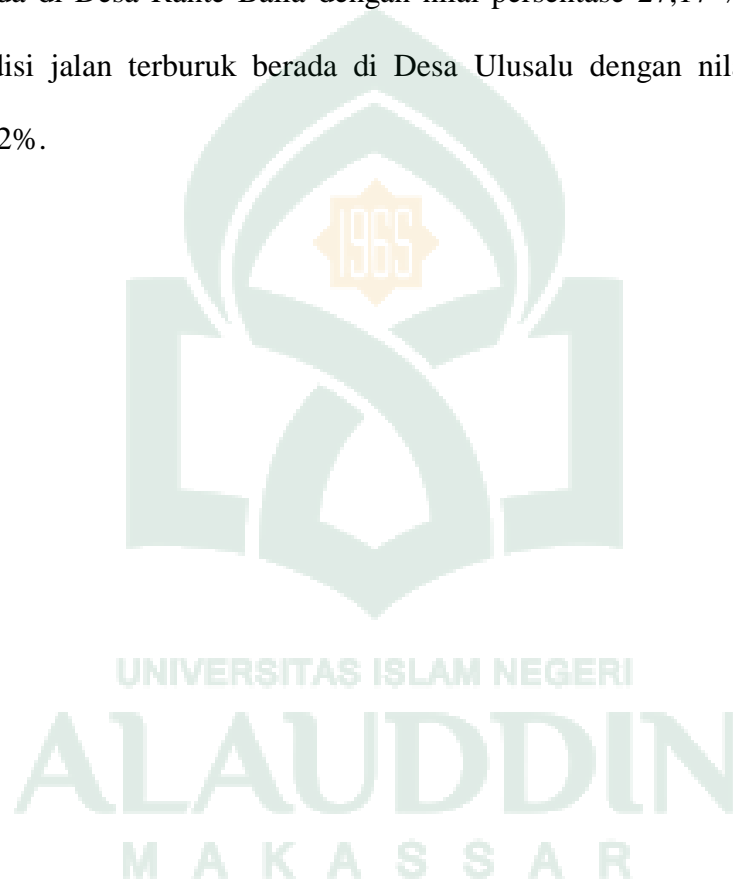
Tabel 40. Kondisi Jalan di Kecamatan Latimojong.

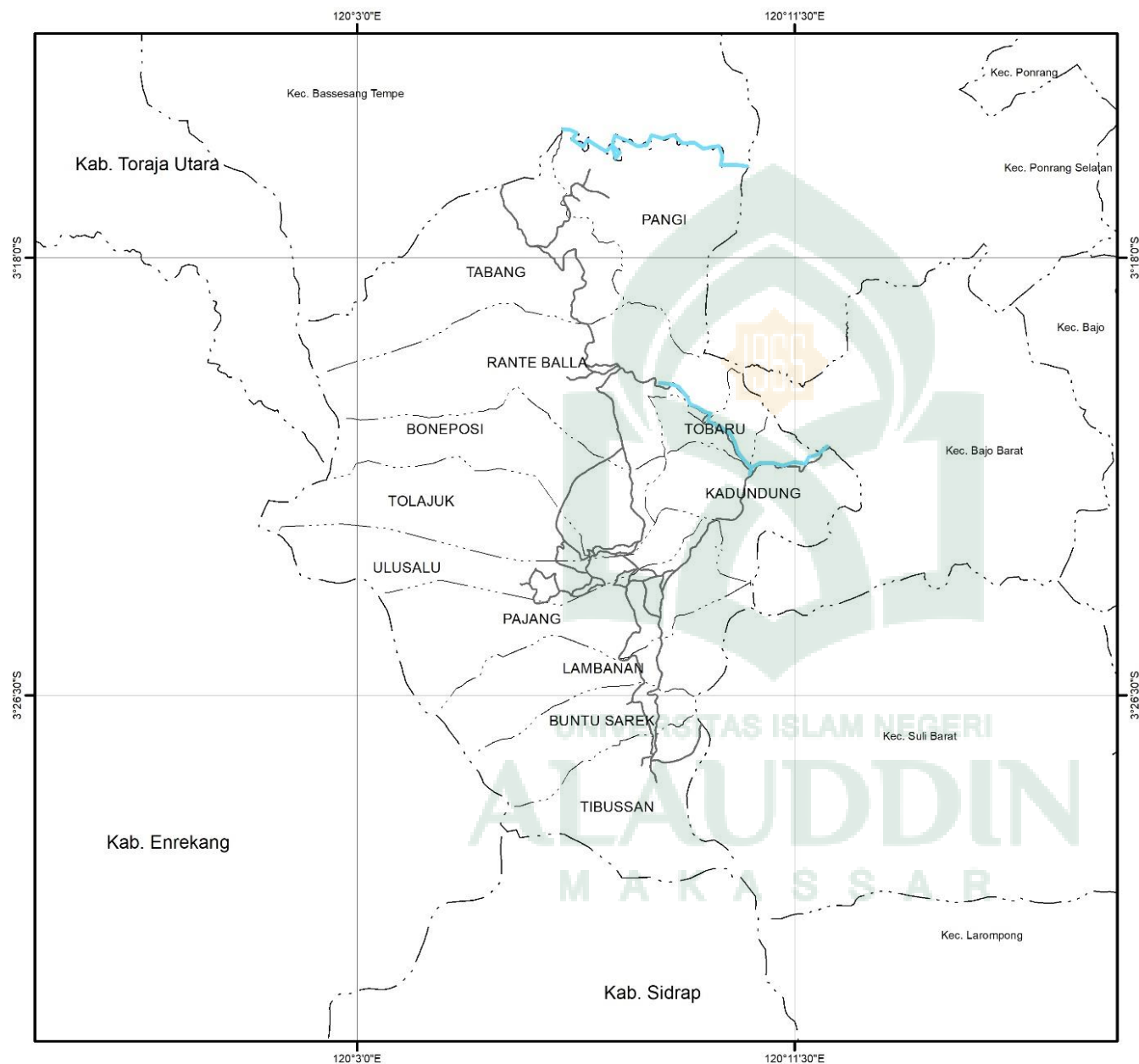
No	Desa/Kelurahan	Kondisi Jalan (Km)						Lebar (M)
		Baik	Persentase (%)	Sedang	Persentase (%)	Buruk	Persentase (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Lambanan	1,97	11,81	1,72	3,45	-	-	5
2	Buntu Serek	2,31	13,85	2,85	5,72	-	-	5
3	Pajang	1,01	6,05	10,73	21,53	1,62	8,61	5
4	Kadundung	-	-	6,65	13,34	-	-	5
5	Tobaru	-	-	2,35	4,71	-	-	5
6	Ulusalu	-	-	2,47	4,95	4,52	24,02	5
7	Boneposi	3,07	18,41	2,74	5,49	4,19	22,27	5

8	Rante Balla	4,53	27,17	7,71	15,47	-	-	5
9	Pangi	-		2,49	4,99	1,69	8,98	5
10	Tabang	2,73	16,37	4,52	9,07	3,35	17,81	5
11	Tibussan	1,05	6,29	4,41	8,85	1,09	5,79	5
12	Tolajuk	-		1,18	2,36	2,35	12,49	5
Total		16,67	100	49,82	100	18,81	100	

Sumber: Survey Lapangan 2019

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa kondisi jalan yang baik berada di Desa Rante Balla dengan nilai persentase 27,17 %, sedangkan kondisi jalan terburuk berada di Desa Ulusalu dengan nilai persentase 24,02%.





UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
JURUSAN TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
2019

**PETA JARINGAN JALAN
KECAMATAN LATIMOJONG
KABUPATEN LUWU**

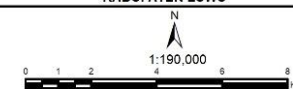
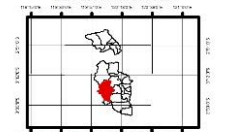


DIAGRAM LOKASI



Kecamatan Latimojong

KETERANGAN :

- Batas Desa
- - - Batas Kecamatan
- . - Batas Kabupaten
- Jalan Lokal

PERAIRAN

- Sungai

NAMA DOSEN PEMBIMBING :

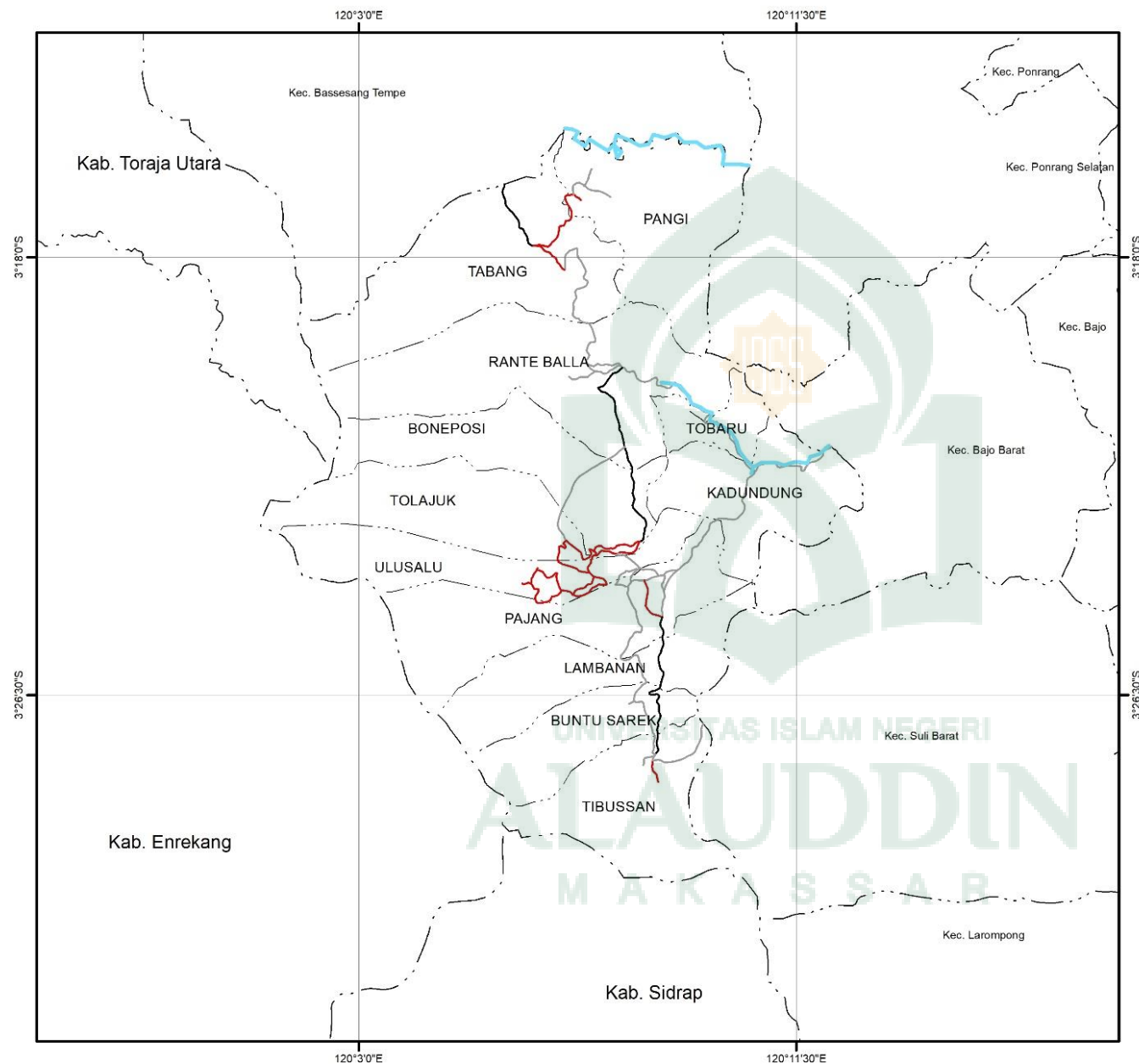
- Ir. H. Mahmuddin, M.Si
- Iyan Awaluddin, S.T., M.T

NAMA MAHASISWA :

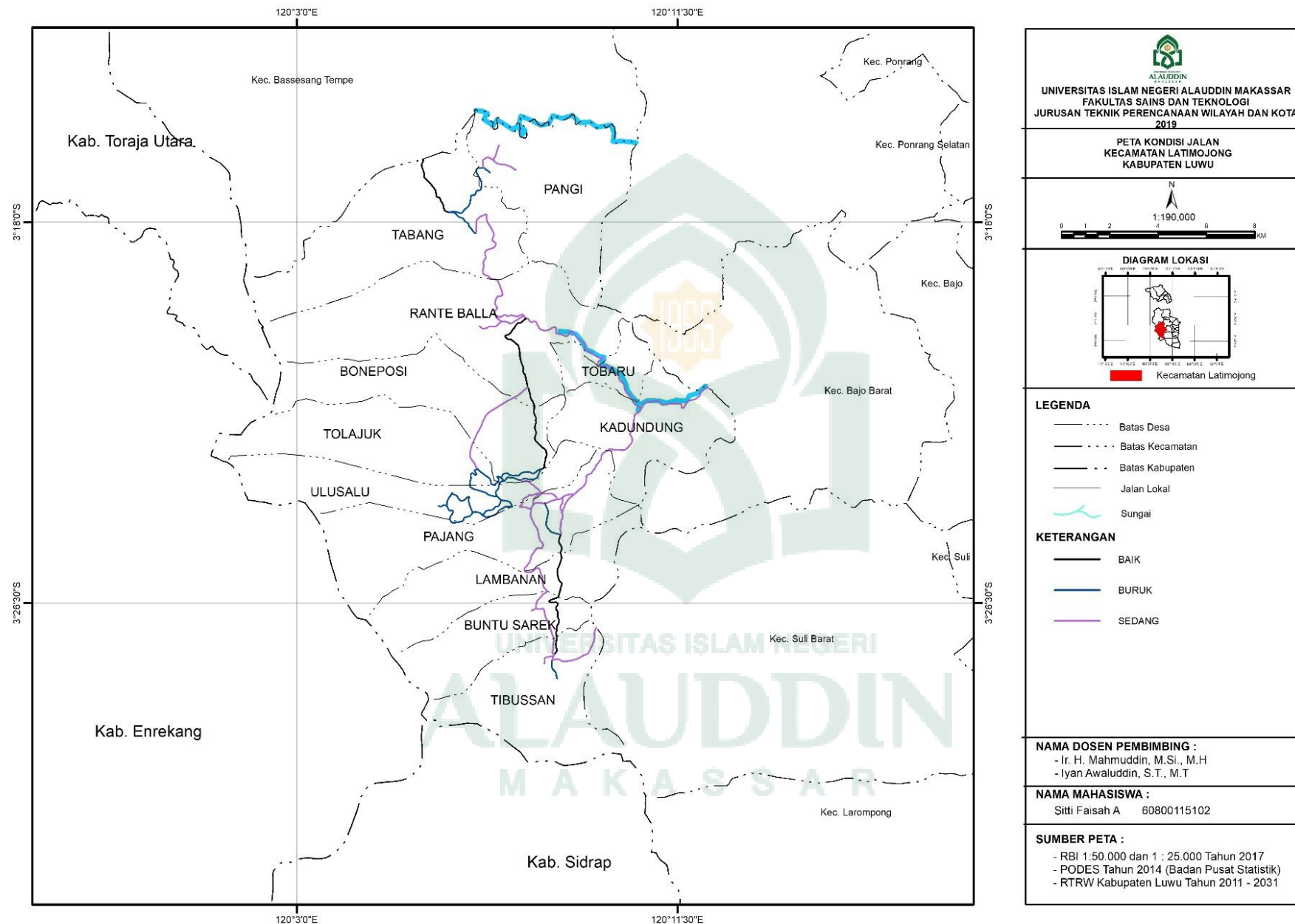
Sitti Faisah A 60800115102

SUMBER PETA :

- RBI 1:50.000 dan 1 : 25.000 Tahun 2017
- PODES Tahun 2014 (Badan Pusat Statistik)
- RTRW Kabupaten Luwu Tahun 2011 - 2031



 <p>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI JURUSAN TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA 2019</p>
<p>PETA JENIS JALAN KECAMATAN LATIMOJONG KABUPATEN LUWU</p>
<p>N</p> <p>0 1 2 4 6 8</p> <p>1:190,000</p> <p>KM</p>
<p>DIAGRAM LOKASI</p>  <p>Kecamatan Latimojong</p>
<p>KETERANGAN :</p> <ul style="list-style-type: none"> ----- Batas Desa ----- Batas Kecamatan ----- Batas Kabupaten ——— Beton ——— Pengerasan ——— Tanah <p>PERAIRAN</p> <p>~~~~~ Sungai</p>
<p>NAMA DOSEN PEMBIMBING :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ir. H. Mahmuddin, M.Si - Iyan Awaluddin, S.T., M.T
<p>NAMA MAHASISWA :</p> <p>Sitti Faisah A 60800115102</p>
<p>SUMBER PETA :</p> <ul style="list-style-type: none"> - RBI 1:50.000 dan 1 : 25.000 Tahun 2017 - PODES Tahun 2014 (Badan Pusat Statistik) - RTRW Kabupaten Luwu Tahun 2011 - 2031



2. Jembatan

Jembatan merupakan struktur yang dibuat untuk menyebrangi jurang atau sungai, rel kereta api maupun jalan raya. Jembatan dibangun untuk penyebrangan pejalan kaki, pengendara atau kereta api di atas halangan. Jembatan juga merupakan bagian dari infrastruktur transportasi darat yang sangat vital dalam aliran perjalanan. Jembatan sering, menjadi komponen kritis dari suatu ruas jalan, karena sebagai penentu beban maksimum kendaraan yang melewati ruas jalan tersebut. Di Kecamatan Latimojong terdapat beberapa unit jembatan yang tersebar di semua desa dan merupakan penghubung dari jalan untuk memudahkan kegiatan transportasi. Dimana setiap desa di Kecamatan Latimojong memiliki kondisi jembatan yang baik dengan jenis jembatan terbuat dari beton dengan lebar jembatan 5 meter. Adapun persebaran jembatan dapat dilihat pada tabel 41 sebagai berikut.

Tabel 41. Jenis dan Kondisi Jembatan di Kecamatan Latimojong

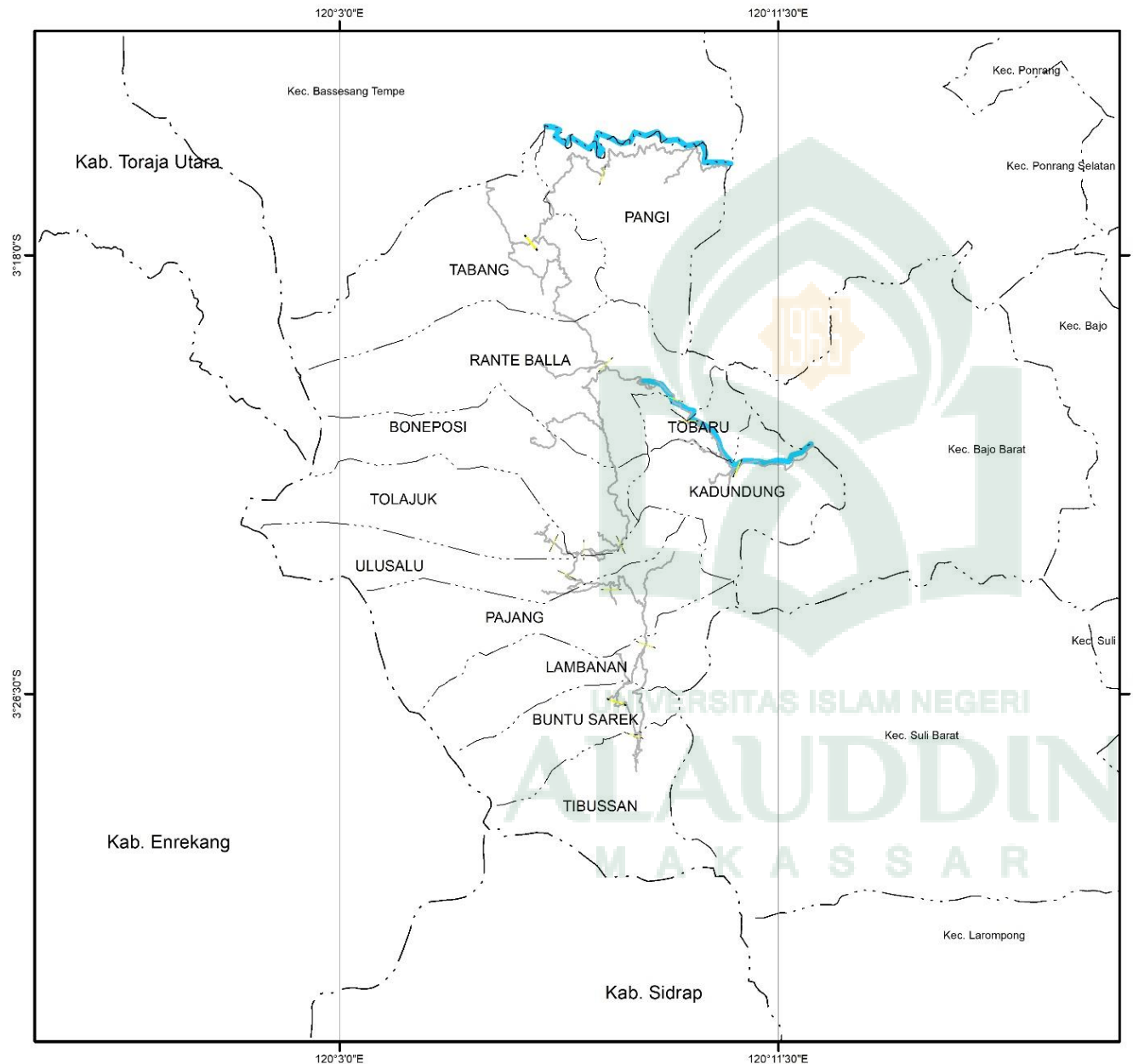
No	Desa/Kelurahan	Jenis Konstruksi	Kondisi Jembatan	Unit	Lebar (M)
1	2	3	4	5	6
1	Lambanan	Beton	Baik	5	5
2	Buntu Serek	Beton	Baik	4	5
3	Pajang	Beton	Baik	5	5
4	Kadundung	Beton	Baik	5	5
5	Tobaru	Beton	Baik	3	5
6	Ulusalu	Beton	Baik	5	5
7	Boneposi	Beton	Baik	4	5
8	Rante Balla	Beton	Baik	6	5
9	Pangi	Beton	Baik	5	5
10	Tabang	Beton	Baik	4	5
11	Tibussan	Beton	Baik	4	5
12	Tolajuk	Beton	Baik	3	5
Total				53	



Sumber: Survey Lapangan 2019

Berdasarkan tabel diatas jumlah jembatan di Kecamatan Latimojong sebanyak 53 unit dengan jenis kontruksi beton dan kondisi baik.



Gambar 14. Jembatan di Kecamatan Latimojong



 <p>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI JURUSAN TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA 2019</p>	
<p>PETA JEMBATAN KECAMATAN LATIMOJONG KABUPATEN LUWU</p>	
<p>Scale: 1:190,000</p> 	
<p>DIAGRAM LOKASI</p>  <p>Kecamatan Latimojong</p>	
<p>LEGENDA</p> <ul style="list-style-type: none"> --- Batas Desa - - - Batas Kecamatan - - - Batas Kabupaten — Jalan Lokal — Sungai 	
<p>KETERANGAN</p> <ul style="list-style-type: none"> — Jembatan 	
<p>NAMA DOSEN PEMBIMBING :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ir. H. Mahmuddin, M.Si., M.H - Iyan Awaluddin, S.T., M.T 	
<p>NAMA MAHASISWA :</p> <p>Sitti Faisah A 60800115102</p>	
<p>SUMBER PETA :</p> <ul style="list-style-type: none"> - RBI 1:50.000 dan 1:25.000 Tahun 2017 - PODES Tahun 2014 (Badan Pusat Statistik) - RTRW Kabupaten Luwu Tahun 2011 - 2031 	

3. Irigasi pedesaan

Air merupakan faktor penentu dalam proses produksi pertanian oleh karena itu investasi irigasi sangat penting dan strategis dalam penyediaan air untuk kegiatan pertanian. Dalam memenuhi kebutuhan air untuk keperluan usaha tani, maka air harus diberikan dalam jumlah waktu dan mutu yang tepat. Jika tidak tanaman akan terganggu pertumbuhannya yang pada gilirannya akan mempengaruhi produksi pertaniannya. Sarana irigasi memiliki peran yang sangat penting dalam pengembangan lahan basah.

a. Luas Pelayanan

Berdasarkan hasil identifikasi jaringan irigasi di Kecamatan Latimojong sudah mampu melayani 670 ha persawahan dengan panjang irigasi sebesar 6,70 km yang terdapat di kecamatan ini. Sehingga dengan adanya daya dukung tersebut mampu menunjang keberlanjutan kawasan pertanian.

b. Kondisi Irigasi

Kondisi irigasi di Kecamatan Latimojong sebagian besar sudah mampu melayani kebutuhan air lahan pertanian yang ada. Namun tetap di temukan beberapa saluran irigasi yang berfungsi kurang baik sehingga diganti dengan pipa-pipa dan selang penyalur air dengan panjang kurang lebih 100 M untuk dapat melayani kebutuhan air pada lahan pertanian. Adapun desa-desa yang memiliki irigasi yang kurang berfungsi yaitu Desa Ulusalu dan Desa Boneposi.



Gambar 16. Irigasi Perdesaan di Kecamatan Latimojong

4. Jalan tani

Secara keseluruhan keberadaan jalan Tani di Kecamatan Latimojong dapat dikatakan mempunyai peranan yang sangat penting dalam mendukung pengembangan wilayah dalam hal ini kegiatan pertanian. Kelancaran kegiatan pertanian dapat ditentukan oleh akses jalan yang baik, dengan kondisi jalan yang baik tentu akan memudahkan kegiatan pertanian.

a. Jenis jalan tani

Jenis jalan tani yang terdapat di Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu berupa jenis jalan pengerasan dan tanah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 42 sebagai berikut.

Tabel 42. Jenis Jalan Tani di Kecamatan Latimojong

No	Desa/Kelurahan	Jenis Konstruksi (Km)				Lebar (M)
		Pengerasan	Persentase (%)	Tanah	Persentase (%)	
1	2	3	4	5	6	7
1	Lambanan	0,55	8,84	0,52	6,90	3
2	Buntu Serek	0,50	8,03	0,68	9,03	3
3	Pajang	-	-	0,11	1,46	3
4	Kadundung	0,40	6,43	0,64	8,50	3
5	Tobaru	0,44	7,07	0,30	3,98	3
6	Ulusalu	-	-	0,23	3,05	3
7	Boneposi	0,80	12,86	0,92	12,21	3
8	Rante Balla	1,10	17,68	1,14	15,14	3
9	Pangi	1,01	16,23	1,40	18,59	3
10	Tabang	0,75	12,05	0,97	12,88	3
11	Tibussan	0,40	6,43	0,62	8,23	3
12	Tolajuk	0,27	4,34	-	-	3
Total		6,22	100	7,53	100	

Sumber: Survey Lapangan 2019

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat dilihat jenis kontruksi jalan tani terpanjang untuk jenis pengerasan yaitu Desa Rante Balla dengan nilai persentase 17,68 %, sedangkan jenis konstruksi jalan tani terpanjang untuk jenis tanah yaitu Desa Pangi dengan nilai persentase 18,59 %.

b. Kondisi Jalan Tani

Kondisi jalan tani yang terdapat di Kecamatan Latimojong umumnya baik sehingga kondisi jalan yang ada di sana hanya butuh pemeliharaan saja bagi pihak terkait. Adapun jalan yang kondisinya kurang baik hanya terdapat di beberapa desa saja. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 43 sebagai berikut.

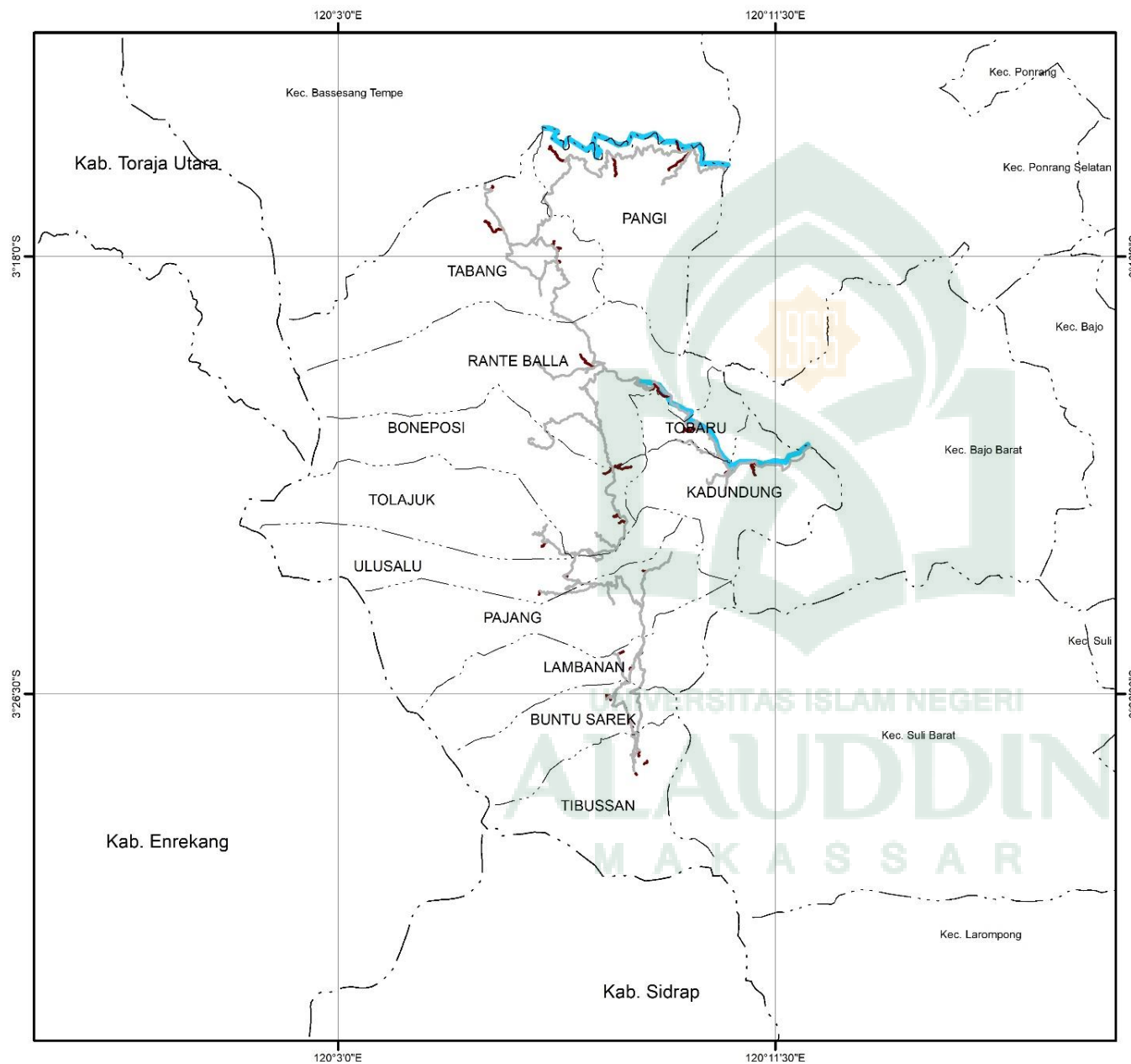
Tabel 43. Kondisi Jalan Tani di Kecamatan Latimojong

No.	Desa/Kelurahan	Kondisi Jalan (Km)				Lebar (M)
		Sedang	Persentase (%)	Buruk	Persentase (%)	
1	2	3	4	5	6	7
1	Lambanan	0,55	8,84	0,52	6,90	3
2	Buntu Serek	0,50	8,03	0,68	9,03	3
3	Pajang	-	-	0,11	1,46	3
4	Kadundung	0,40	6,43	0,64	8,50	3
5	Tobaru	0,44	7,07	0,30	3,98	3
6	Ulusalu	-	-	0,23	3,05	3
7	Boneposi	0,80	12,86	0,92	12,21	3
8	Rante Balla	1,10	17,68	1,14	15,14	3
9	Pangi	1,01	16,23	1,40	18,59	3
10	Tabang	0,75	12,05	0,97	12,88	3
11	Tibussan	0,40	6,43	0,62	8,23	3
12	Tolajuk	0,27	4,34	-	-	3
Total		6,22	100	7,53	100	

Sumber: Survey Lapangan 2019

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat dilihat kondisi jalan tani yang paling baik yaitu Desa Rante Balla dan kondisi jalan tani paling buruk yaitu Desa Pangi.

**Gambar 17.** Jalan Tani di Kecamatan Latimojong



 <p>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI JURUSAN TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA 2019</p>
<p>PETA JALAN TANI KECAMATAN LATIMOJONG KABUPATEN LUWU</p>
<p>N</p> <p>1:190,000</p> <p>0 1 2 3 4 5 6 7 8 KM</p>
<p>DIAGRAM LOKASI</p>  <p>Kecamatan Latimojong</p>
<p>LEGENDA</p> <ul style="list-style-type: none"> --- Batas Desa - - - Batas Kecamatan - - - Batas Kabupaten — Jalan Lokal ~ Sungai <p>KETERANGAN</p> <ul style="list-style-type: none"> — Jalan Tani
<p>NAMA DOSEN PEMBIMBING :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ir. H. Mahmuddin, M.Si., M.H - Iyan Awaluddin, S.T., M.T
<p>NAMA MAHASISWA :</p> <p>Sitti Faisah A 60800115102</p>
<p>SUMBER PETA :</p> <ul style="list-style-type: none"> - RBI 1:50.000 dan 1 : 25.000 Tahun 2017 - PODES Tahun 2014 (Badan Pusat Statistik) - RTRW Kabupaten Luwu Tahun 2011 - 2031

5. Air Bersih

Air bersih merupakan proses pengolahan melalui perpipaan atau tanpa proses pengolahan melalui perpipaan yang memenuhi syarat kesehatan untuk dapat digunakan. Penyediaan air bersih harus dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang tidak mengandung zat berbahaya yang bisa mengancam kesehatan manusia maupun makhluk hidup lainnya, seperti pertumbuhan tanaman. Penyediaan air bersih di Kecamatan Latimojong bersumber dari mata air yang ditampung menggunakan bak penangkap melalui pipa-pipa kecil untuk digunakan sehari-hari. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 44 sebagai berikut.

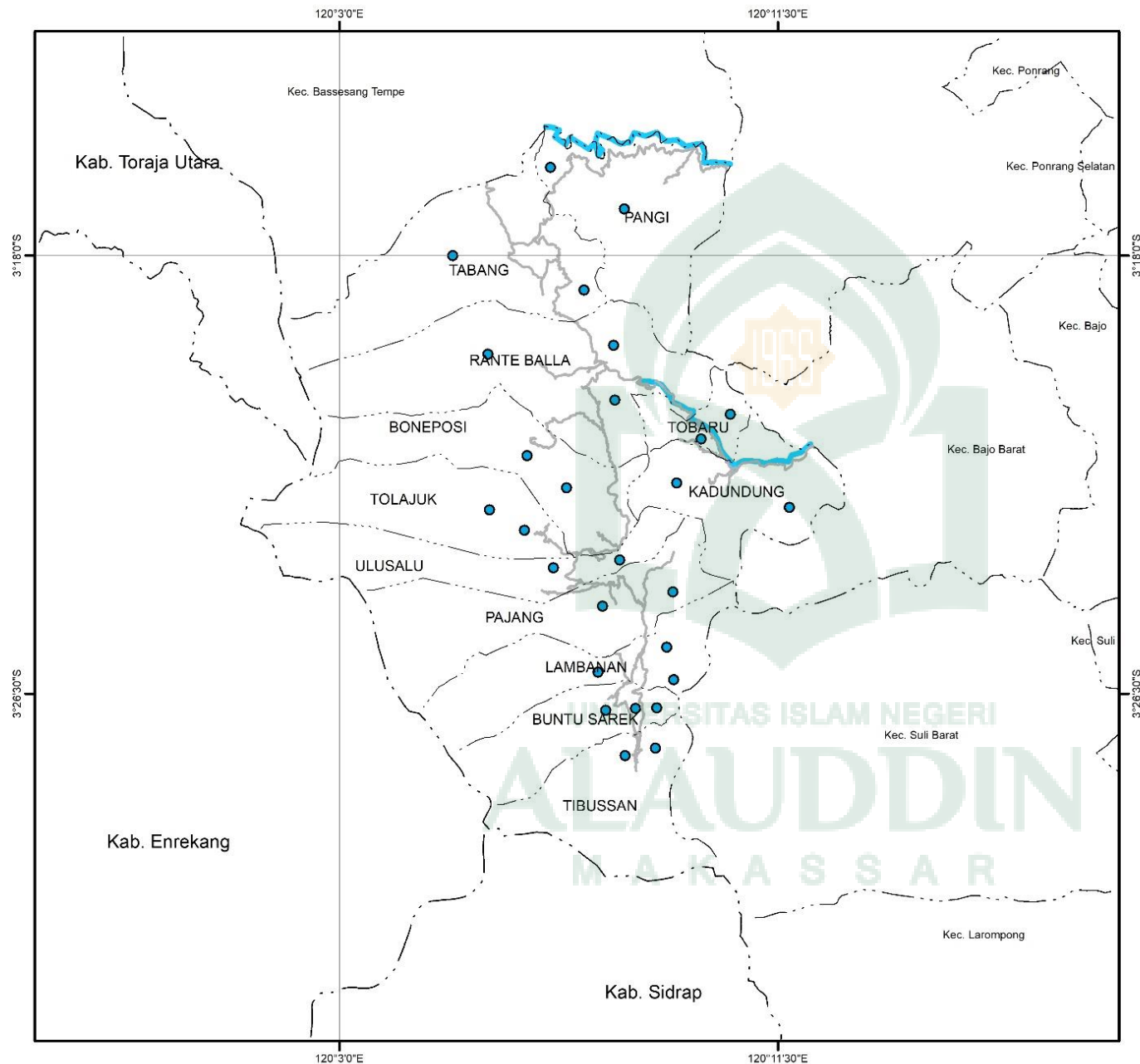
Tabel 44. Air Bersih di Kecamatan Latimojong

No	Desa/Kelurahan	Sumber Air Bersih	Bak Penangkap	Panjang Pipa (M)
1	2	3	4	5
1	Lambanan	Mata Air	4	400
2	Buntu Serek	Mata Air	4	400
3	Pajang	Mata Air	4	400
4	Kadundung	Mata Air	3	300
5	Tobaru	Mata Air	2	200
6	Ulusalu	Mata Air	5	500
7	Boneposi	Mata Air	4	400
8	Rante Balla	Mata Air	5	500
9	Pangi	Mata Air	2	200
10	Tabang	Mata Air	4	400
11	Tibussan	Mata Air	3	300
12	Tolajuk	Mata Air	3	300
Total			43	4.300

Sumber: Kantor Kecamatan Latimojong 2019



Gambar 19. Penyediaan Air Bersih di Kecamatan Latimojong



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
JURUSAN TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
2019

PETA AIR BERSIH
KECAMATAN LATIMOJONG
KABUPATEN LUWU

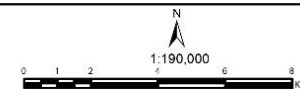
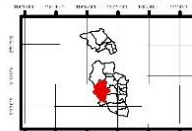


DIAGRAM LOKASI



Kecamatan Latimojong

LEGENDA

- Batas Desa
- Batas Kecamatan
- Batas Kabupaten
- Jalan Lokal
- ~~~~~ Sungai

KETERANGAN

- Mata Air

NAMA DOSEN PEMBIMBING :

- Ir. H. Mahmuddin, M.Si., M.H
- Iyan Awaluddin, S.T., M.T

NAMA MAHASISWA :

Sitti Faisah A 60800115102

SUMBER PETA :

- RBI 1:50.000 dan 1:25.000 Tahun 2017
- PODES Tahun 2014 (Badan Pusat Statistik)
- RTRW Kabupaten Luwu Tahun 2011 - 2031

6. Sanitasi

Sanitasi adalah perilaku hidup sehat masyarakat yang bertujuan mencegah manusia bersentuhan langsung dengan kotoran dan bahan buangan berbahaya lainnya agar menjaga dan meningkatkan kesehatan masyarakat. Secara umum sanitasi mengacu pada penyediaan fasilitas dan layanan untuk pembuangan yang aman. Sedangkan menurut WHO, kegiatan sanitasi meliputi sanitasi air, sanitasi udara, pengelolaan limbah, infrastruktur dan kelembagaan, kesehatan pemukiman dan lingkungan serta kesehatan global.

a. Persampahan

Di Kecamatan Latimojong tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya sanitasi masih sangat rendah, karena kondisi sanitasi cukup buruk dilihat dari kurangnya kesadaran masyarakat dalam membuang sampah. Kurangnya sarana atau fasilitas pengelolaan persampahan seperti tong sampah, truk pengangkut, dan fasilitas TPA membuat masyarakat lebih memilih membuang sampah disungai atau dibelakang rumah dengan cara dibakar. Maka dari itu pentingnya peran pemerintah untuk memberikan sosialisasi mengenai sanitasi agar masyarakat lebih memahami akan pentingnya pola hidup sehat.



Gambar 21. Persampahan di Kecamatan Latimojong

b. MCK

Di Kecamatan Latimojong tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya sanitasi masih sangat rendah, kondisi sanitasi yang cukup buruk dilihat dari kurangnya ketersediaan MCK untuk setiap rumah. Sehingga masih terdapat beberapa masyarakat yang membuang kotoran di belakang rumah dengan cara digali. Maka dari itu pentingnya peran pemerintah untuk memberikan sosialisasi mengenai sanitasi agar masyarakat lebih memahami akan pentingnya pola hidup sehat.



Gambar 22. MCK di Kecamatan Latimojong

c. Saluran pembuangan limbah

Tingkat kesadaran masyarakat di Kecamatan Latimojong akan pentingnya sanitasi masih sangat rendah, kondisi sanitasi yang cukup buruk dilihat dari sistem pengelolaan saluran pembuang limbah yang sebagian besar masih terbuat dari tanah. Maka dari itu pentingnya peran pemerintah untuk memberikan sosialisasi mengenai sanitasi agar masyarakat lebih memahami akan pentingnya pola hidup sehat.



Gambar 23. Saluran Pembuangan Limbah di Kecamatan Latimojong

d. Septic tank

Di Kecamatan Latimojong tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya sanitasi masih sangat rendah, kondisi sanitasi yang cukup buruk dilihat dari kurangnya ketersediaan saptic tank yang terbuat dari beton. Hal ini membuat sebagian masyarakat menggunakan septic tank yang terbuat dari tanah dengan penutup dari bambu sebagai salah satu wadah dalam membuang limbah rumah tangga. Maka dari itu pentingnya peran

pemerintah untuk memberikan sosialisasi mengenai sanitasi agar masyarakat lebih memahami akan pentingnya pola hidup sehat.



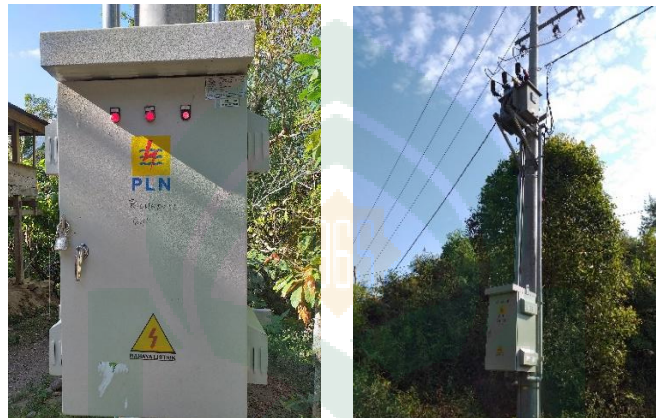
Gambar 24. Saptic Tank di Kecamatan Latimojong

7. Telekomunikasi

Telekomunikasi adalah teknik atau cara yang digunakan untuk mengirimkan sebuah informasi, informasi tersebut bisa berupa tulisan, suara, gambar, ataupun objek lainnya. Di dalamnya telekomunikasi ini dapat menyampaikan data dari satu tempat ke tempat lainnya yang memiliki lokasi berjauhan. Perkembangan **telekomunikasi** memang sangatlah pesat, kini hampir semua orang bisa melakukan komunikasi dengan sangat mudah. Bahkan komunikasi dengan orang yang tidak dikenalpun bisa dilakukan melalui sosial media. Di Kecamatan Latimojong sebagian besar sudah memiliki alat telekomunikasi seperti telepon seluler akan tetapi untuk melakukan komunikasi melalui sosial media masih sangat sulit karena tidak adanya fasilitas tower radio yang dapat memancarkan jaringan untuk mengakses internet.

8. Jaringan listrik

Kecamatan latimojong memiliki jaringan listrik yang memadai. Pada umumnya, tegangan yang digunakan untuk menyalurkan listrik ke rumah-rumah penduduk adalah tegangan menengah dan tegangan rendah yang seluruhnya didistribusikan oleh PLN dengan daya listrik 450-1300 watt/rumah.



Gambar 25. Jaringan Listrik di Kecamatan Latimojong

D. *Karakteristik Responden*

Karakteristik responden adalah penjelasan tentang keberadaan *stakeholder* untuk mengetahui informasi mengenai identitas sebagai responden dalam penelitian ini.

Responden dalam penelitian ini adalah *stakeholder* yang mempunyai keterkaitan dengan penelitian ini dan dipilih secara menunjuk orang yang dianggap mampu memberikan data yang terkait dengan jumlah 20 orang. Berikut ini adalah karakteristik responden yang meliputi:

1. Responden menurut jenis kelamin

Jenis kelamin turut menentukan jenis responden yang akan dipilih, secara tidak langsung akan mempengaruhi kegiatan yang akan dilakukan di

lokasi penelitian. Untuk mengetahui proporsi laki-laki dan perempuan yang akan dijadikan responden dapat dilihat pada Tabel 45 sebagai berikut:

Tabel 45. Jenis Kelamin Responden

Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase (%)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
Laki-Laki	55	55
Perempuan	45	45
Total	100	100

Sumber: Survey Lapangan 2019

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa, jumlah responden laki-laki lebih besar dari jumlah responden perempuan dengan perbandingan 55% dan 45%.

2. Responden berdasarkan usia

Usia responden berpengaruh dalam melakukan pengambilan data karena dianggap berkompeten untuk menjawab pertanyaan yang diajukan kepada peneliti. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 46 sebagai berikut:

Tabel 46. Usia Responden

Usia	Responden	Persentase (%)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
18-25	15	15
26-35	25	25
36-45	35	35
45-55	18	18
56-65	5	5
65+	2	2
Total	100	100

Sumber: Survey Lapangan 2019

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa sebagian besar stakeholder yang menjadi responden berasal dari kelompok usia produktif yaitu 36 – 45 tahun, yaitu sebanyak 35% dan kelompok usia > 65 tahun memiliki komposisi terendah sebesar 2%.

3. Responden berdasarkan pendidikan

Tingkat pendidikan menunjukkan pendidikan formal yang pernah ditempuh seseorang. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang akan mempengaruhi pemahamannya terhadap kebutuhan psikologis dan rasa ingin tahu tentang infrastruktur dibandingkan dengan seseorang yang tingkat pendidikannya lebih rendah. Selain itu, tingkat pendidikan seseorang juga meningkatkan kesadarannya dalam memberikan persepsi tentang pembangunan infrastruktur dalam mendukung pengembangan wilayah pedesaan.

Tabel 47. Pendidikan Responden

Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase (%)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
SMA	55	55
Diploma (D3)	8	8
Sarjana (S1)	37	37
Total	100	100

Sumber: Survey Lapangan 2019

4. Responden berdasarkan pekerjaan

Adapun pengelompokan data responden berdasarkan pekerjaan dapat dilihat pada Tabel 48 sebagai berikut:

Tabel 48. Pekerjaan Responden

Pekerjaan	Jumlah	Persentase (%)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
Petani	56	56
Pegawai	24	24
Wiraswasta	20	20
Total	100	100

Sumber: Survey Lapangan 2019

E. Analisis Ketersediaan dan Kondisi Infrastruktur Dalam Mendukung Pengembangan Wilayah Pedesaan di Kecamatan Latimojong

Teknik analisis yang digunakan untuk mengetahui ketersediaan dan kondisi infrastruktur di Kecamatan Latimojong yaitu metode skoring. Penentuan variabel didasarkan pada pedoman program infrastruktur pedesaan yaitu jaringan jalan, jembatan, irigasi pedesaan, jalan tani jalan tani, penyediaan air bersih, sanitasi, telekomunikasi, dan listrik. Penilaian indikator untuk setiap variabel dilakukan dengan melihat kondisi langsung di lapangan serta partisipasi masyarakat dalam memberikan nilai lewat metode wawancara.

Berdasarkan data yang diperoleh dilapangan, dilakukan pemberian skor untuk setiap indikator pada masing-masing variabel kemudian setiap indikator tersebut dirata-ratakan untuk mengetahui bagaimana ketersediaan dan kondisi infrastruktur di Kecamatan Latimojong. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 49 sebagai berikut.

Tabel 49. Kriteria Penilaian Indikator

No.	Kriteria		Nilai Skor	Interval Skor (%)
	Ketersediaan	Kondisi		
1	2	3	4	5
1	Terpenuhi	Baik	5	75-100
2	Cukup	Sedang	3	50-74
3	Tidak	Buruk	1	< 50

Sumber: Hasil Olah Pustaka 2019

1. Infrastruktur pendukung aksesibilitas

a. Jaringan Jalan

1) Ketersediaan

Ketersediaan infrastruktur jaringan jalan mengacu pada standar pelayanan minimal. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 50 sebagai berikut.

Tabel 50. Skoring Pada Indikator Ketersediaan Jaringan Jalan

No.	Kriteria	Ketersediaan	Skor
1	Apabila berfungsi menghubungkan dengan lokasi lain dan panjang jalan 25-50 m/Ha	Terpenuhi	5
2	Apabila menghubungkan dengan lokasi dan panjang jalan 25 m/Ha	Cukup	3
3	Apabila tidak menghubungkan dengan lokasi lain dan tidak memiliki panjang jalan sesuai standar 25-50 m/Ha	Tidak	1

Sumber: Standar Pelayanan Minimal PR/PP/PU No.53/KPTS/M/2001

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan pada indikator ketersediaan menunjukkan bahwa jaringan jalan terpenuhi dengan nilai skor 5 karena pembangunan infrastruktur jalan merupakan salah satu skala prioritas pemerintah khususnya di Kecamatan Latimojong yang berfungsi menghubungkan jalan dengan lokasi lain dengan panjang jalan 25-50m/Ha.

2) Kondisi

Kondisi infrastruktur jaringan jalan mengacu pada standar pelayanan minimal. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 51 sebagai berikut.

Tabel 51. Skoring Pada Indikator Kondisi Jaringan Jalan

No.	Kriteria	Kondisi	Skor
1	2	3	4
1	Apabilah kondisi konstruksi jalan aspal dan beton	Baik	5
2	Apabilah kondisi konstruksi jalan pekerasan	Sedang	3

No.	Kriteria	Kondisi	Skor
1	2	3	4
3	Apabila kondisi konstruksi jalan tanah	Buruk	1

Sumber: Standar Pelayanan Minimal PR/PP/PU No.53/KPTS/M/2001

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan pada indikator kondisi menunjukkan bahwa kondisi infrastruktur jaringan jalan dominan sedang dengan nilai skor 3 yaitu konstruksi jalan pekerasan.

b. Jembatan

1) Ketersediaan

Ketersediaan infrastruktur jembatan mengacu pada standar pelayanan minimal. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 52 sebagai berikut.

Tabel 52. Skoring Pada Indikator Ketersediaan Jembatan

No.	Kriteria	Ketersediaan	Skor
1	2	3	4
1	Apabila lebar jembatan sesuai dengan lebar jalan yaitu 2-5 m	Terpenuhi	5
2	Apabila lebar jembatan kurang 1 meter dari lebar jalan 2-5 m	Cukup	3
3	Apabila lebar jembatan tidak sesuai dengan lebar jalan 2-5 m	Tidak	1

Sumber: Standar Pelayanan Minimal PR/PP/PU No.53/KPTS/M/2001

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan pada indikator ketersediaan menunjukkan bahwa jembatan terpenuhi dengan nilai skor 5 karena pembangunan infrastruktur jembatan merupakan salah satu skala prioritas pemerintah khususnya di Kecamatan Latimojong dengan lebar jembatan 2-5 m.

2) Kondisi

Kondisi infrastruktur jembatan mengacu pada standar pelayanan minimal. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 53 sebagai berikut.

Tabel 53. Skoring Pada Indikator Kondisi Jembatan

No.	Kriteria	Kondisi	Skor
1	2	3	4
1	Apabila kondisi konstruksi jembatan aspal dan beton	Baik	5
2	Apabila kondisi konstruksi jembatan kayu	Sedang	3
3	Apabila kondisi konstruksi jembatan tanah	Buruk	1

Sumber: Standar Pelayanan Minimal PR/PP/PU No.53/KPTS/M/2001

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan pada indikator kondisi menunjukkan bahwa kondisi infrastruktur jembatan baik dengan nilai skor 5 yaitu konstruksi jembatan aspal dan beton.

2. Infrastruktur pendukung pertanian

a. Irigasi Pedesaan

1) Ketersediaan

Ketersediaan infrastruktur irigasi pedesaan mengacu pada standar pelayanan minimal. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 54 sebagai berikut.

Tabel 54. Skoring Pada Indikator Ketersediaan Irigasi Pedesaan

No.	Kriteria	Ketersediaan	Skor
1	2	3	4
1	Apabila terdapat sumber air berupa waduk, sungai, danau pada sistem irigasi sekunder dan tersier untuk pertanian	Terpenuhi	5
2	Apabila hanya terdapat sumber air berupa waduk pada sistem	Cukup	3

No.	Kriteria	Ketersediaan	Skor
1	2	3	4
	irigasi primer dan tersier untuk pertanian		
3	Apabila tidak terdapat sumber air dan sistem irigasi sekunder dan tersier untuk pertanian.	Tidak	1

Sumber: Permen PU No 04 Tahun 2014 Tentang SPM

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan pada indikator ketersediaan menunjukkan bahwa sistem irigasi pedesaan tidak terpenuhi dengan nilai skor 1 karena hanya terdapat sistem irigasi nonteknis walaupun demikian pembangunan infrastruktur irigasi pedesaan juga merupakan salah satu prioritas pemerintah khususnya di Kecamatan Latimojong.

2) Kondisi

Kondisi infrastruktur irigasi pedesaan mengacu pada standar pelayanan minimal. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 55 sebagai berikut.

Tabel 55. Skoring Pada Indikator Kondisi Irigasi Pedesaan

No.	Kriteria	Kondisi	Skor
1	2	3	4
1	Apabila sistem irigasi sekunder dan tersier mampu mengalir pertanian dengan luas minimal 1000 ha dan intensitas kecepatan air 50 lt/dt	Baik	5
2	Apabila sistem irigasi sekunder dan tersier mampu mengalir pertanian dengan luas minimal 500 ha dan intensitas kecepatan air 20 lt/dt	Sedang	3
3	Apabila sistem irigasi sekunder dan tersier hanya mengalir pertanian <500 ha dan intensitas kecepatan air >20 lt/dt	Buruk	1

Sumber: Permen PU No 04 Tahun 2014 Tentang SPM

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan pada indikator kondisi menunjukkan bahwa kondisi infrastruktur jaringan irigasi pedesaan sedang dengan nilai skor 3.

b. Jalan tani

1) Ketersediaan

Ketersediaan infrastruktur jalan tani mengacu pada standar pelayanan minimal. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 56 sebagai berikut.

Tabel 56. Skoring Pada Indikator Ketersediaan Jalan Tani

No.	Kriteria	Ketersediaan	Skor
1	2	3	4
1	Apabila panjang jalan usaha tani sesuai standar antara 50-100 m/ha	Terpenuhi	5
2	Apabila panjang jalan usaha tani hanya 45 m/ha	Cukup	3
3	Apabila panjang jalan usaha tani hanya <45 m/ha	Tidak	1

Sumber: *web.ipb.ac.id Jalan Tani*

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan pada indikator ketersediaan menunjukkan bahwa jalan tani terpenuhi dengan nilai skor 5 sehingga memudahkan masyarakat dalam melakukan kegiatan pertanian serta mampu mendukung pengembangan wilayah pedesaan.

2) Kondisi

Kondisi infrastruktur jalan tani mengacu pada standar pelayanan minimal. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 57 sebagai berikut.

Tabel 57. Skoring Pada Indikator Kondisi Jalan Tani

No.	Kriteria	Kondisi	Skor
1	2	3	4
1	Apabila permukaan jalan tani di aspal dan beton	Baik	5

No.	Kriteria	Kondisi	Skor
2	Apabila permukaan jalan tani di pengerasan	Sedang	3
3	Apabila konstruksi jalan tani tanah.	Buruk	1

Sumber: *web.ipb.ac.id Jalan Tani*

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan pada indikator kondisi menunjukkan bahwa kondisi infrastruktur jalan tani dominan sedang dengan nilai skor 3 yaitu permukaan jalan tani pengerasan.

3. Infrastruktur pemenuhan dasar masyarakat

a. Penyediaan air bersih

1) Ketersediaan

Ketersediaan infrastruktur air bersih mengacu pada standar pelayanan minimal. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 58 sebagai berikut.

Tabel 58. Skoring Pada Indikator Ketersediaan Air Bersih

No.	Kriteria	Ketersediaan	Skor
1	Apabila terdapat sarana sistem pelayanan perpipaan yaitu Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)	Terpenuhi	5
2	Apabila terdapat sarana sistem pelayanan non perpipaan berupa mata air, sumur bor, dan air dari pegunungan	Cukup	3
3	Apabila terdapat sumber air hujan yang di tampung oleh masyarakat	Tidak	1

Sumber: *Permen PU No 04 Tahun 2014 Tentang SPM*

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan pada indikator ketersediaan menunjukkan bahwa air bersih cukup terpenuhi dengan nilai skor 3 karena pada wilayah penelitian ketersediaan air bersih berasal dari mata air sehingga pada saat musim kemarau debit airnya menurun

sehingga sebagian masyarakat sulit mendapatkan air bersih untuk di gunakan sehari-hari.

2) Kondisi

Kondisi infrastruktur air bersih mengacu pada standar pelayanan minimal. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 59 sebagai berikut.

Tabel 59. Skoring Pada Indikator Kondisi Air Bersih

No.	Kriteria	Kondisi	Skor
1	2	3	4
1	Apabila memenuhi kebutuhan rumah tangga 60-100 liter/orang/hari	Baik	5
2	Apabila kebutuhan rumah tangga hanya 50-55 liter/orang/hari	Sedang	3
3	Apabila kebutuhan air bersih untuk rumah tangga hanya <50 liter/orang/hari	Buruk	1

Sumber: SNI 03-1733-2004 Tentang Perencanaan Lingkungan Perumahan.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan pada indikator kondisi menunjukkan bahwa kondisi infrastruktur air bersih sedang dengan nilai skor 3 karena pada musim kemarau kerap berkurang namun pada saat musim hujan kondisi air baik.

b. Sanitasi

1) Ketersediaan

Ketersediaan infrastruktur sanitasi mengacu pada standar pelayanan minimal. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 60 sebagai berikut.

Tabel 60. Skoring Pada Indikator Ketersediaan Sanitasi

No.	Kriteria	Ketersediaan	Skor
1	2	3	4
1	Apabila tersedianya saluran pembuangan air limbah, sumur resapan, MCK, dan tempat pembuangan sampah untuk masyarakat	Terpenuhi	5
2	Apabila kurang tersedia saluran pembuangan air limbah, sumur resapan, MCK, dan pembuangan sampah untuk masyarakat	Cukup	3
3	Apabila tidak tersedianya saluran pembuangan air limbah, sumur resapan, MCK dan tempat pembuangan sampah untuk masyarakat.	Tidak	1

Sumber: SNI 03-1733-2004 Tentang Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan/SNI 2398-2017 tentang Tata Cara Perencanaan TangkiSeptik.

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan pada indikator ketersediaan infrastruktur sanitasi menunjukkan bahwa cukup terpenuhi dengan nilai skor 3 karena masih terdapat masyarakat yang belum memiliki mck, saluran pembuangan, saptik tank dan tempat pembuangan sampah yang layak.

2) Kondisi

Kondisi infrastruktur sanitasi mengacu pada standar pelayanan minimal. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 61 sebagai berikut.

Tabel 61. Skoring Pada Indikator Kondisi Sanitasi

No.	Kriteria	Kondisi	Skor
1	2	3	4
1	Apabila saluran pembuangan air limbah, sumur resapan, MCK, dan tempat pembuangan sampah yang berfungsi dengan baik	Baik	5
2	Apabila saluran pembuangan air limbah, sumur resapan, MCK, dan tempat pembuangan sampah yang berfungsi kurang baik	Sedang	3

No.	Kriteria	Kondisi	Skor
1	2	3	4
3	Apabila saluran pembuangan air limbah, sumur resapan, MCK, dan tempat pembuangan sampah tidak berfungsi	Buruk	1

Sumber: SNI 03-1733-2004 Tentang Perencanaan Lingkungan Perumahan.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan pada indikator kondisi menunjukkan bahwa kondisi infrastruktur sanitasi sedang dengan nilai skor 3 karena kondisi sanitasi berupa septik tank yang masih terbuat dari tanah ditutup dengan bambu seadanya serta pengelolaan sampah yang masih manual dengan cara membakar di belakang rumah, maka dari itu ketersediaan sanitasi perlu di tingkatkan sehingga mendorong masyarakat untuk hidup lebih bersih yang mencegah manusia bersentuhan langsung dengan kotoran dan bahan buangan berbahaya lainnya dengan tujuan agar menjaga dan meningkatkan kesehatan masyarakat.

c. Telekomunikasi

1) Ketersediaan

Ketersediaan infrastruktur telekomunikasi mengacu pada standar pelayanan minimal. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 62 sebagai berikut.

Tabel 62. Skoring Pada Indikator Ketersediaan Telekomunikasi

No.	Kriteria	Ketersediaan	Skor
1	2	3	4
1	Apabila terdapat layanan telepon rumah tangga 1 KK = jiwa, telepon umum per 1000 jiwa, dan telepon komersial 10% dari telepon domestic	Terpenuhi	5

No.	Kriteria	Ketersediaan	Skor
1	2	3	4
2	Apabila layanan telepon rumah tangga kurang dari 1 KK = jiwa, telepon umum kurang dari 1000 jiwa, dan telepon komersial kurang dari 10 % dari telepon domestic	Cukup	3
3	Apabila tidak terdapat layanan telepon rumah tangga, telepon umum, telepon komersial	Tidak	1

Sumber: SNI 03-1733-2004 Tentang Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan pada indikator ketersediaan infrastruktur telekomunikasi menunjukkan bahwa tidak terpenuhi dengan nilai skor 1 namun secara keseluruhan masyarakat sudah memiliki telepon seluler/hp.

2) Kondisi

Kondisi infrastruktur telekomunikasi mengacu pada standar pelayanan minimal. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 63 sebagai berikut.

Tabel 63. Skoring Pada Indikator Kondisi Telekomunikasi

No.	Kriteria	Kondisi	Skor
1	2	3	4
1	Apabila terdapat fasilitas Radio Pemancar Jaringan yang memenuhi kebutuhan masyarakat	Baik	5
2	Apabila fasilitas Radio Pemancar Jaringan kurang memenuhi kebutuhan masyarakat	Sedang	3
3	Apabila tidak terdapat fasilitas Radio Pemancar Jaringan	Buruk	1

Sumber: SNI 03-1733-2004 Tentang Perencanaan Lingkungan Perumahan.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan pada indikator kondisi menunjukkan bahwa kondisi infrastruktur telekomunikasi buruk dengan

nilai skor 1 karena tidak tersedianya alat telekomunikasi seperti radio pemancar jaringan, sehingga masyarakat masih kesulitan dalam melakukan telekomunikasi.

d. Jaringan Listrik

1) Ketersediaan

Ketersediaan infrastruktur jaringan listrik mengacu pada standar pelayanan minimal. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 64 sebagai berikut.

Tabel 64. Skoring Pada Indikator Ketersediaan Jaringan Listrik

No.	Kriteria	Ketersediaan	Skor
1	2	3	4
1	Apabila terdapat gardu listrik yang melayani penduduk 1000 jiwa	Terpenuhi	5
2	Apabila terdapat gardu listrik yang hanya melayani penduduk 500 jiwa	Cukup	3
3	Apabila tidak terdapat gardu listrik yang melayani penduduk jiwa	Tidak	1

Sumber: SNI 03-1733-2004 Tentang Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan pada indikator ketersediaan infrastruktur jaringan listrik menunjukkan bahwa terpenuhi dengan nilai skor 5 karena secara keseluruhan masyarakat di Kecamatan Latimojong sudah dapat memanfaatkan jaringan listrik dalam kehidupan sehari-sehari.

2) Kondisi

Kondisi infrastruktur jaringan listrik mengacu pada standar pelayanan minimal. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 65 sebagai berikut.

Tabel 65. Skoring Pada Indikator Kondisi Jaringan Listrik

No.	Kriteria	Kondisi	Skor
1	2	3	4
1	Apabila layanan energi listrik 900 W/rumah	Baik	5
2	Apabila layanan energi listrik 450 W/rumah	Sedang	3
3	Apabila layanan energi listrik 300 W/rumah	Buruk	1

Sumber: SNI 03-1733-2004 Tentang Perencanaan Lingkungan Perumahan.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan pada indikator kondisi menunjukkan bahwa kondisi infrastruktur jaringan listrik baik dengan nilai skor 5.

Untuk mengetahui sejauh mana ketersediaan dan kondisi seluruh variabel infrastruktur pendukung aksesibilitas, infrastruktur pendukung pertanian, dan infrastruktur pemenuhan dasar masyarakat di Kecamatan Latimojong menurut hasil analisis skoring sub variabel dapat dilihat pada Tabel 66 sebagai berikut.

Tabel 66. Skoring Variabel Hasil Penelitian

No	Variabel	Sub Variabel	Indikator	Bobot Indikator	Nilai Indikator	Jumlah Nilai Indikator	Penilaian Indikator (%)	Bobot Variabel	Nilai Bobot Variabel (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Infrastruktur Pendukung Aksesibilitas	1. Jaringan Jalan 2. Jembatan	- Ketersedian - Kondisi - Ketersediaan - Kondisi	30% 30% 20% 20%	5 3 5 5	150 90 100 100	88	50	44
2	Infrastruktur Pendukung Pertanian	1. Irigasi Perdesaan 2. Jalan Tani	- Ketersediaan - Kondisi - Ketersediaan - Kondisi	20% 20% 30% 30%	1 3 5 3	20 60 150 150	76	25	19
3	Infrastruktur Pemenuhan Dasar Masyarakat	1. Air Bersih 2. Sanitasi 3. Telekomunikasi 4. Jaringan Listrik	- Ketersediaan - Kondisi - Ketersediaan - Kondisi - Ketersediaan - Kondisi - Ketersediaan - Kondisi	15% 15% 15% 15% 10% 10% 10% 10%	3 3 3 3 1 1 5 5	45 45 45 45 10 10 50 50	60	25	15
Jumlah								100	78

Sumber : Standar Pembobotan Dinas Pekerjaan Umum (PU) Tahun 2007 (Hasil Analisis)

Berdasarkan hasil pembobotan ketersediaan dan kondisi infrastruktur pendukung aksesibilitas, infrastruktur pendukung pertanian, dan infrastruktur pemenuhan dasar masyarakat di Kecamatan Latimojong dengan sintesis data antar sub variabel memperoleh nilai sebesar 78 % dalam mendukung pengembangan wilayah pedesaan. Dengan melihat hasil analisis dari ketersediaan dan kondisi infrastruktur yang telah ada secara eksisting di Kecamatan Latimojong sebagai bentuk dukungan terhadap pengembangan wilayah pedesaan dengan menggunakan metode pembobotan pada tabel 66 dengan melihat kategori - kategori penilaian sebagai berikut:

- a) Terpenuhi/Baik = 5 (Jika memiliki tingkat kesesuaian 75%-100%)
- b) Cukup/Sedang = 3 (Jika memiliki tingkat kesesuaian 50%-74%)
- c) Tidak/Buruk = 1 (Jika memiliki tingkat kesesuaian <50%)

Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa ketersediaan dan kondisi infrastruktur di Kecamatan Latimojong dalam mendukung pengembangan wilayah pedesaan sudah berada pada kategori Terpenuhi/Baik 5 (lima). Meski demikian ada beberapa yang tetap harus lebih diperhatikan lagi seperti irigasi pedesaan, air bersih, sanitasi dan telekomunikasi yang ketersediaannya dan kondisinya masih dalam kategori cukup atau sedang.

F. Analisis Pengaruh Ketersediaan dan Kondisi Infrastruktur Dalam Mendukung Pengembangan Wilayah Pedesaan di Kecamatan Latimojong

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel infrastruktur pendukung aksesibilitas yang terbagi menjadi dua sub variabel jalan dan jembatan, infrastruktur pendukung pertanian terbagi menjadi dua sub variabel yaitu irigasi dan jalan tani, dan infrastruktur pemenuhan dasar masyarakat, yang terbagi menjadi sub variabel penyediaan air bersih, sanitasi, telekomunikasi serta jaringan listrik. Dimana pada masing-masing sub variabel terbagi menjadi dua indikator yaitu ketersediaan dan kondisi. Variabel tersebut diambil untuk menganalisis pengaruh ketersediaan dan kondisi infrastruktur terhadap pengembangan wilayah pedesaan di Kecamatan Latimojong. Sehingga analisis yang digunakan yaitu analisis chi square, untuk mengetahui seberapa besar pengaruh ketersediaan dan kondisi infrastruktur terhadap pengembangan wilayah pedesaan.

1. Infrastruktur pendukung aksesibilitas

a. Jaringan jalan

1) Ketersediaan

Dari hasil kuisioner yang telah disebarakan kepada 100 responden di seluruh Kecamatan Latimojong, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa mayoritas responden merasakan pengaruh ketersediaan jaringan jalan. Berikut penjelasan responden mengenai pengaruh jaringan jalan pada Tabel 67 sebagai berikut.

Tabel 67. Tabulasi Silang Data Responden

		Jaringan Jalan Ketersediaan		Total
		Cukup	Terpenuhi	
1		2	3	4
Pengaruh Pengembangan wilayah pedesaan	Cukup	6	14	20
	Terpenuhi	0	80	80
Total		6	94	100

Sumber: Hasil survey 2019

Berdasarkan hasil tabulasi silang diatas mengenai data dari responden, selanjutnya untuk mengetahui hubungan antara pengembangan wilayah pedesaan (Y) dan ketersediaan jaringan jalan (X), maka digunakan metode analisis Chi Kuadrat berdasarkan data yang telah di peroleh dari tabel 67 diatas. Kemudian hasil rekap tersebut dimasukkan pada tabel analisis Chi Kuadrat yang dapat dilihat pada Tabel 68 sebagai berikut.

Tabel 68. Uji Chi Kuadrat

Tabel 3. Uji Chi Kuadrat									
$\begin{matrix} X \\ Y \end{matrix}$		X		Σ	FH		X ²		Σ
		1	2		1	2	1	2	
I		2	3	4	5	6	7	8	9
Y	1	6	14	20	1.20	18.80	19.20	1.23	20.4255
	2	0	80	80	4.80	75.20	4.80	0.31	5.10638
Σ		6	94	100					
x ²									25.5319
db									1
α									0.05
x ² Tabel									3.84
Kesimpulan									Berpengaruh

Sumber: Hasil analisis tahun 2019

Keterangan:

Y : Pengembangan Wilayah Pedesaan

Y1 : Cukup

Y2 : Terpenuhi

X : Ketersediaan Jaringan Jalan

X_1 : Tidak

X_2 : Cukup

X_3 : Terpenuhi

X^2 : Chi kuadrat)

F_h : Frekuensi harapan

Db : Derajat bebas

α : Alfa (taraf signifikan)

Σ : Jumlah

Berdasarkan hasil analisis dari tabel 68 diatas diketahui bahwa X^2 hitung adalah 25,5, dengan taraf signifikan 0,05 serta derajat kebebasan (db) = (2-1) x (2-1) = 1, sehingga diperoleh X^2 tabel = 3,84, sehingga X^2 hitung lebih besar dibandingkan X^2 tabel maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Untuk mengukur atau mengetahui tingkat pengaruh ketersediaan jaringan jalan terhadap pengembangan wilayah pedesaan selanjutnya dilakukan uji kontingensi dimana:

$$C = \sqrt{\frac{X^2}{(N + X^2)}}$$

$$C = \sqrt{\frac{25.5^2}{(100 + 25.5^2)}}$$

$$= 0.45099 \text{ atau sedang.}$$

Sehingga diketahui bahwa pengaruh antara ketersediaan jaringan jalan dan pengembangan wilayah pedesaan berada pada kategori sedang,

sebab memiliki nilai uji kontingensi (C) = 0.45099 yang berarti memiliki tingkat hubungan atau pengaruh sedang.

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, ditetapkan bahwa pengaruh ketersediaan jaringan jalan terhadap pengembangan wilayah pedesaan tingkat hubungan atau pengaruh sedang yang berarti bahwa ketersediaan jaringan jalan memiliki pengaruh sedang dalam mendukung pengembangan wilayah pedesaan.

2) Kondisi

Dari hasil kuisioner yang telah disebarakan kepada 100 responden di seluruh Kecamatan Latimojong, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa mayoritas responden merasakan pengaruh kondisi jaringan jalan. Untuk lebih jelasnya mengenai pendapat responden, dapat dilihat pada tabel 69 sebagai berikut.

Tabel 69. Tabulasi Silang Data Responden

		Jaringan Jalan kondisi			Total
		Buruk	Sedang	Baik	
1		2	3	4	5
Pengaruh Pengembangan Wilayah Pedesaan	Sedang	10	10	0	20
	Baik	0	55	25	80
Total		10	65	25	100

Sumber: Hasil survey 2019

Berdasarkan hasil tabulasi silang diatas mengenai data dari responden, selanjutnya untuk mengetahui hubungan antara pengembangan wilayah pedesaan (Y) dan kondisi jaringan jalan (X), maka digunakan metode analisis Chi Kuadrat berdasarkan data yang telah di peroleh dari Tabel 69 diatas. Hasil rekap tersebut kemudian

dimasukkan pada tabel analisis Chi Kuadrat, yang dapat dilihat pada Tabel 70 sebagai berikut.

Tabel 70. Uji chi kuadrat

$\begin{matrix} X \\ Y \end{matrix}$		X			Σ	FH			X ²			Σ
		1	2	3		1	2	3	1	2	3	
I		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Y	1	10	10	0	20	2.00	13.00	5.00	32.00	0.69	5.00	37.6923
	2	0	55	25	80	8.00	52.00	20.00	8.00	0.17	1.25	9.42308
Σ		10	65	25	100							
x ²												47.1154
db												2
α												0.05
x ² Tabel												5.99
Kesimpulan												Berpengaruh

Sumber: Hasil analisis Tahun 2019

Keterangan:

Y : Pengembangan Wilayah Pedesaan

Y1 : Sedang

Y2 : Baik

X : Kondisi Jaringan Jalan

X1 : Sedang

X2 : Baik

X^2 : Chi kuadrat)

Fh : Frekuensi harapan

Db : Derajat bebas

α : Alfa (taraf signifikan)

Σ : Jumlah

Berdasarkan hasil analisis dari Tabel 70 diatas diketahui bahwa X^2 hitung adalah 47,1 dengan taraf signifikan 0,05 serta derajat

kebebasan (db) = (3-1) x (2-1) = 2, sehingga diperoleh X^2 tabel = 5,99, sehingga X^2 hitung lebih besar dibandingkan X^2 tabel maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Untuk mengukur atau mengetahui tingkat pengaruh kondisi jaringan jalan terhadap pengembangan wilayah pedesaan selanjutnya dilakukan uji kontingensi dimana:

$$C = \sqrt{\frac{X^2}{(N + X^2)}}$$

$$C = \sqrt{\frac{47,1^2}{(100 + 47,1^2)}}$$

$$= 0,56592 \text{ atau pengaruh sedang.}$$

Dapat diketahui bahwa pengaruh antara kondisi jaringan jalan dan pengembangan wilayah pedesaan berada pada kategori sedang, sebab memiliki nilai uji kontingensi (C) = 0,56592 yang berarti memiliki tingkat hubungan atau pengaruh sedang.

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, ditetapkan bahwa pengaruh kondisi jaringan jalan terhadap pengembangan wilayah pedesaan memiliki tingkat hubungan atau pengaruh sedang dalam mendukung pengembangan wilayah pedesaan.

a. Jembatan

1) Ketersediaan

Dari hasil kuisioner yang telah disebarakan kepada 100 responden di seluruh Kecamatan Latimojong, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa

mayoritas responden merasakan pengaruh ketersediaan jembatan. Untuk lebih jelasnya mengenai pendapat responden, dapat dilihat pada Tabel 71 sebagai berikut.

Tabel 71. Tabulasi silang data responden

		Jembatan Ketersediaan		Total
		Cukup	Terpenuhi	
1		2	3	4
Pengaruh pengembangan wilayah pedesaan	Cukup	17	3	20
	Terpenuhi	0	80	80
Total		17	83	100

Sumber: Hasil survey 2019

Berdasarkan hasil tabulasi silang diatas mengenai data dari responden, selanjutnya untuk mengetahui hubungan antara pengembangan wilayah pedesaan (Y) dan ketersediaan jembatan (X), maka digunakan metode analisis Chi Kuadrat berdasarkan data yang telah di peroleh dari Tabel 71 diatas. Hasil rekap tersebut kemudian dimasukkan pada tabel analisis Chi Kuadrat, yang dapat dilihat pada Tabel 72 sebagai berikut.

Tabel 72. Uji chi kuadrat

<div>X Y</div>		X		Σ	FH		X ²		Σ
		1	2		1	2	1	2	
I		2	3	4	5	6	7	8	9
Y	1	17	3	20	3.40	16.60	54.40	11.14	65.5422
	2	0	80	80	13.60	66.40	13.60	2.79	16.3855
Σ		17	83	100					
x ²									81.9277
db									1
α									0.05
x ² Tabel									3.84
Kesimpulan									Berpengaruh

Sumber: Hasil analisis tahun 2019

Keterangan:

Y : Pengembangan Wilayah Pedesaan

Y1 : Cukup

Y2 : Terpenuhi

X : Ketersediaan Jembatan

X1 : Cukup

X2 : Terpenuhi

X^2 : Chi kuadrat)

Fh : Frekuensi harapan

Db : Derajat bebas

α : Alfa (taraf signifikan)

Σ : Jumlah

Berdasarkan hasil analisis dari Tabel 72 diatas diketahui bahwa X^2 hitung adalah 81,9, dengan taraf signifikan 0,05 serta derajat kebebasan (db) = (2-1) x (2-1) = 1, sehingga diperoleh X^2 tabel = 3,84, sehingga X^2 hitung lebih besar dibandingkan X^2 tabel maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Untuk mengukur atau mengetahui tingkat pengaruh ketersediaan jembatan terhadap pengembangan wilayah pedesaan selanjutnya dilakukan uji kontingensi dimana:

$$C = \sqrt{\frac{X^2}{(N + X^2)}}$$

$$C = \sqrt{\frac{81,9^2}{(100 + 81,9^2)}}$$

= 0.67107 atau pengaruh kuat.

Sehingga dapat diketahui bahwa pengaruh antara ketersediaan jembatan dan pengembangan wilayah pedesaan berada pada kategori kuat, sebab memiliki nilai uji kontingensi $(C) = 0.67107$ yang berarti memiliki tingkat hubungan atau pengaruh kuat.

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, ditetapkan bahwa pengaruh ketersediaan jembatan terhadap pengembangan wilayah pedesaan tingkat hubungan atau pengaruh kuat yang berarti bahwa ketersediaan jembatan memiliki pengaruh kuat dalam mendukung pengembangan wilayah pedesaan.

2) Kondisi

Dari hasil kuisioner yang telah disebarakan kepada 100 responden di seluruh Kecamatan Latimojong, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dominan responden merasakan pengaruh kondisi jembatan. Untuk lebih jelasnya mengenai pendapat responden, dapat dilihat pada Tabel 73 sebagai berikut.

Tabel 73. Tabulasi Silang Data Responden

		Jembatan Kondisi		Total
		Sedang	Baik	
1		2	3	4
Pengaruh dan Pengembangan Wilayah	Sedang	15	5	25
	Baik	0	80	80
Total		15	85	100

Sumber: Hasil survey 2019

Berdasarkan hasil tabulasi silang diatas mengenai data dari responden, selanjutnya untuk mengetahui hubungan antara pengembangan wilayah pedesaan (Y) dan kondisi jembatan (X), maka

digunakan metode analisis Chi Kuadrat berdasarkan data yang telah di peroleh dari Tabel 73 diatas. Hasil rekap tersebut kemudian dimasukkan pada tabel analisis Chi Kuadrat, yang dapat dilihat pada tabel 74 sebagai berikut.

Tabel 74. Uji Chi Kuadrat

Tabel 1. Uji Chi Kuadrat									
$\begin{matrix} X \\ Y \end{matrix}$		X		Σ	FH		X^2		Σ
		1	2		1	2	1	2	
I		2	3	4	5	6	7	8	9
Y	1	15	5	20	3.00	17.00	48.00	8.47	56.4706
	2	0	80	80	12.00	68.00	12.00	2.12	14.1176
Σ		15	85	100					
x^2									70.5882
db									1
α									0.05
x^2 Tabel									3.84
Kesimpulan									Berpengaruh

Sumber: Hasil analisis Tahun 2019

Keterangan:

Y : Pengembangan Wilayah Pedesaan

Y1 : Sedang

Y2 : Baik

X : Kondisi Jembatan

X1 : Sedang

X2 : Baik

X^2 : Chi kuadrat)

Fh : Frekuensi harapan

db : Derajat bebas

α : Alfa (taraf signifikan)

Σ : Jumlah

Berdasarkan hasil analisis dari tabel 74 diatas diketahui bahwa X^2 hitung adalah 70,5 dengan taraf signifikan 0,05 serta derajat kebebasan $(db) = (2-1) \times (2-1) = 1$, sehingga diperoleh X^2 tabel = 3,84, sehingga X^2 hitung lebih besar dibandingkan X^2 tabel maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Untuk mengukur atau mengetahui tingkat pengaruh kondisi jembatan terhadap pengembangan wilayah pedesaan selanjutnya dilakukan uji kontingensi dimana:

$$C = \sqrt{\frac{X^2}{(N + X^2)}}$$

$$C = \sqrt{\frac{70,5^2}{(100 + 70,5^2)}}$$

$$= 0.64327, \text{ atau pengaruh kuat.}$$

Dapat diketahui bahwa pengaruh antara kondisi jembatan dan pengembangan wilayah pedesaan berada pada kategori kuat, sebab memiliki nilai uji kontingensi $(C) = 0.64327$ yang berarti memiliki tingkat hubungan atau pengaruh kuat.

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, ditetapkan bahwa pengaruh kondisi jembatan terhadap pengembangan wilayah pedesaan memiliki tingkat hubungan atau pengaruh kuat yang berarti bahwa kondisi jembatan memiliki pengaruh kuat dalam mendukung pengembangan wilayah pedesaan.

2. Infrastruktur pendukung pertanian

a. Irigasi perdesaan

1) Ketersediaan

Dari hasil kuisioner yang telah disebarkan kepada 100 responden di seluruh Kecamatan Latimojong, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dominan responden merasakan pengaruh ketersediaan irigasi perdesaan. Untuk lebih jelasnya mengenai pendapat responden, dapat dilihat pada Tabel 75 sebagai berikut.

Tabel 75. Tabulasi Silang Data Responden

		Irigasi Perdesaan Ketersediaan		Total
		Cukup	Terpenuhi	
1		2	3	4
Pengaruh Pengembangan Wilayah Pedesaan	Cukup	20	0	20
	Terpenuhi	55	25	80
Total		75	25	100

Sumber: Hasil survey 2019

Berdasarkan hasil tabulasi silang diatas mengenai data dari responden, selanjutnya untuk mengetahui hubungan antara pengembangan wilayah pedesaan (Y) dan ketersediaan irigasi perdesaan (X), maka digunakan metode analisis Chi Kuadrat berdasarkan data yang telah di peroleh dari tabel 75 diatas. Hasil rekap tersebut kemudian dimasukkan pada tabel analisis Chi Kuadrat, yang dapat dilihat pada Tabel 76 sebagai berikut.

Tabel 76. Uji Chi Kuadrat

<div><div>X</div><div>Y</div></div>		X		Σ	FH		X ²		Σ
		1	2		1	2	1	2	
I		2	3	4	5	6	7	8	9
Y	1	20	0	20	15.00	5.00	1.67	5.00	6.66667
	2	55	25	80	60.00	20.00	0.42	1.25	1.66667
Σ		75	25	100					
x ²									8.33333
db									1
α									0.05
x ² Tabel									3.84
Kesimpulan									Berpengaruh

Sumber: Hasil analisis tahun 2019

Keterangan:

Y : Pengembangan Wilayah Pedesaan

Y1 : Cukup

Y2 : Terpenuhi

X : Ketersediaan irigasi perdesaan

X1 : Cukup

X2 : Terpenuhi

X^2 : Chi kuadrat)

Fh : Frekuensi harapan

db : Derajat bebas

α : Alfa (taraf signifikan)

Σ : Jumlah

Berdasarkan hasil analisis dari Tabel 76 diatas diketahui bahwa X^2 hitung adalah 8,3 dengan taraf signifikan 0,05 serta derajat kebebasan (db) = (2-1) x (2-1) = 1, sehingga diperoleh X^2 tabel = 3,84, sehingga X^2 hitung lebih besar dibandingkan X^2 tabel maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Untuk mengukur atau mengetahui tingkat pengaruh

ketersediaan irigasi pedesaan terhadap pengembangan wilayah pedesaan selanjutnya dilakukan uji kontingensi dimana:

$$C = \sqrt{\frac{X^2}{(N + X^2)}}$$

$$C = \sqrt{\frac{8,3^2}{(100 + 8,3^2)}}$$

= 0.27735, atau pengaruh lemah.

Sehingga dapat diketahui bahwa pengaruh antara ketersediaan irigasi pedesaan dan pengembangan wilayah berada pada kategori lemah, sebab memiliki nilai uji kontingensi (C) = 0,27735 yang berarti memiliki tingkat hubungan atau pengaruh lemah.

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, ditetapkan bahwa pengaruh ketersediaan irigasi pedesaan terhadap pengembangan wilayah pedesaan tingkat hubungan atau pengaruh lemah yang berarti bahwa ketersediaan irigasi pedesaan memiliki pengaruh lemah dalam mendukung pengembangan wilayah pedesaan.

2) Kondisi

Dari hasil kuisioner yang telah disebarakan kepada 100 responden di seluruh Kecamatan Latimojong, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dominan responden merasakan pengaruh kondisi irigasi pedesaan. Untuk lebih jelasnya mengenai pendapat responden, dapat dilihat pada Tabel 77 sebagai berikut.

Tabel 77. Tabulasi Silang Data Responden

		Irigasi Perdesaan Kondisi		Total
		Sedang	Baik	
1		2	3	4
Pengaruh Pengembangan Wilayah Pedesaan	Sedang	20	0	20
	Baik	59	21	80
Total		79	21	100

Sumber: Hasil survey 2019

Berdasarkan hasil tabulasi silang diatas mengenai data dari responden, selanjutnya untuk mengetahui hubungan antara pengembangan wilayah pedesaan (Y) dan kondisi irigasi pedesaan (X), maka digunakan metode analisis Chi Kuadrat berdasarkan data yang telah di peroleh dari tabel 77 diatas. Hasil rekap tersebut kemudian dimasukkan pada tabel analisis Chi Kuadrat, yang dapat dilihat pada Tabel 78 sebagai berikut.

Tabel 78. Uji Chi Kuadrat

X Y		X		Σ	FH		X ²		Σ
		1	2		1	2	1	2	
I		2	3	4	5	6	7	8	9
Y	1	20	0	20	15.80	4.20	1.12	4.20	5.31646
	2	59	21	80	63.20	16.80	0.28	1.05	1.32911
Σ		79	21	100					
x ²									6.64557
db									1
α									0.05
x ² Tabel									3.84
Kesimpulan									Berpengaruh

Sumber: Hasil analisis tahun 2019

Keterangan:

Y : Pengembangan Wilayah Pedesaan

Y1 : Sedang

Y2 : Baik

X : Kondisi Irigasi Perdesaan

X1 : Sedang

X2 : Baik

X^2 : Chi kuadrat

Fh : Frekuensi harapan

db : Derajat bebas

α : Alfa (taraf signifikan)

Σ : Jumlah

Berdasarkan hasil analisis dari tabel 78 diatas diketahui bahwa X^2 hitung adalah 6,64 dengan taraf signifikan 0,05 serta derajat kebebasan (db) = (2-1) x (2-1) = 1, sehingga diperoleh X^2 tabel = 3,84, sehingga X^2 hitung lebih besar dibandingkan X^2 tabel maka H0 ditolak dan H1 diterima. Untuk mengukur atau mengetahui tingkat pengaruh kondisi irigasi perdesaan terhadap pengembangan wilayah pedesaan selanjutnya dilakukan uji kontingensi dimana:

$$C = \sqrt{\frac{X^2}{(N + X^2)}}$$

$$C = \sqrt{\frac{6,64^2}{(105 + 6,64^2)}}$$

$$= 0.24963, \text{ atau pengaruh lemah.}$$

Sehingga dapat diketahui bahwa pengaruh antara kondisi irigasi perdesaan dan pengembangan wilayah pedesaan berada pada kategori

lemah, sebab memiliki nilai uji kontingensi (C) = 0.24963 yang berarti memiliki tingkat hubungan atau pengaruh lemah.

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, ditetapkan bahwa pengaruh kondisi irigasi pedesaan terhadap pengembangan wilayah pedesaan memiliki tingkat hubungan atau pengaruh lemah dalam mendukung pengembangan wilayah pedesaan.

b. Jalan tani

1) Ketersediaan

Dari hasil kuisioner yang telah disebarakan kepada 100 responden di seluruh Kecamatan Latimojong, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dominan responden merasakan pengaruh terhadap ketersediaan jalan tani. Untuk lebih jelasnya mengenai pendapat responden, dapat dilihat pada Tabel 79 sebagai berikut.

Tabel 79. Tabulasi Silang Data Responden

		Jalan Tani Ketersediaan		Total
		Cukup	Terpenuhi	
1		2	3	4
Pengaruh pengembangan wilayah pedesaan	Cukup	15	5	20
	Terpenuhi	0	80	80
Total		15	85	100

Sumber: Hasil survey 2019

Berdasarkan hasil tabulasi silang diatas mengenai data dari responden, selanjutnya untuk mengetahui hubungan antara pengembangan wilayah pedesaan (Y) dan ketersediaan jalan tani (X), maka digunakan metode analisis Chi Kuadrat berdasarkan data yang telah di peroleh dari Tabel 79 diatas. Hasil rekap tersebut kemudian

dimasukkan pada tabel analisis Chi Kuadrat, yang dapat dilihat pada Tabel 80 sebagai berikut.

Tabel 80. Uji Chi Kuadrat

$\begin{matrix} X \\ Y \end{matrix}$		X		Σ	FH		X ²		Σ
		1	2		1	2	1	2	
I		2	3	4	5	6	7	8	9
Y	1	15	5	20	3.00	17.00	48.00	8.47	56.4706
	2	0	80	80	12.00	68.00	12.00	2.12	14.1176
Σ		15	85	100					
x ²									70.5882
db									1
α									0.05
x ² Tabel									3.84
Kesimpulan									Berpengaruh

Sumber: Hasil analisis tahun 2019

Keterangan:

Y : Pengembangan Wilayah Pedesaan

Y1 : Cukup

Y2 : Terpenuhi

X : Ketersediaan Jembatan

X1 : Cukup

X2 : Terpenuhi

X^2 : Chi kuadrat)

Fh : Frekuensi harapan

db : Derajat bebas

α : Alfa (taraf signifikan)

Σ : Jumlah

Berdasarkan hasil analisis dari Tabel 80 diatas diketahui bahwa X^2 hitung adalah 70,5, dengan taraf signifikan 0,05 serta derajat kebebasan (db) = (2-1) x (2-1) = 1, sehingga diperoleh X^2 tabel = 3,84,

sehingga X^2 hitung lebih kecil dibandingkan X^2 tabel maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Untuk mengukur atau mengetahui tingkat pengaruh ketersediaan gudang pangan terhadap pengembangan wilayah selanjutnya dilakukan uji kontingensi dimana:

$$C = \sqrt{\frac{X^2}{(N + X^2)}}$$

$$C = \sqrt{\frac{70,5^2}{(100 + 70,5^2)}}$$

$$= 0.64327, \text{ atau pengaruh kuat.}$$

Sehingga dapat diketahui bahwa pengaruh antara ketersediaan jalan tani dan pengembangan wilayah pedesaan berada pada kategori kuat, sebab memiliki nilai uji kontingensi (C) = 0,64327 yang berarti memiliki tingkat hubungan atau pengaruh kuat.

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, ditetapkan bahwa pengaruh ketersediaan jalan tani terhadap pengembangan wilayah pedesaan tingkat hubungan atau kuat yang berarti bahwa ketersediaan jalan tani memiliki pengaruh kuat dalam mendukung pengembangan wilayah pedesaan.

2) Kondisi

Dari hasil kuisioner yang telah disebarakan kepada 100 responden di seluruh Kecamatan Latimojong, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dominan responden merasakan pengaruh terhadap kondisi jalan tani.

Untuk lebih jelasnya mengenai pendapat responden, dapat dilihat pada Tabel 81 sebagai berikut.

Tabel 81. Tabulasi Silang Data Responden

		Jalan Tani Kondisi		Total
		Buruk	Sedang	
1		2	3	4
Pengaruh pengembangan wilayah pedesaan	Sedang	20	0	20
	Baik	15	65	80
Total		35	65	100

Sumber: Hasil survey 2019

Berdasarkan hasil tabulasi silang diatas mengenai data dari responden, selanjutnya untuk mengetahui hubungan antara pengembangan wilayah pedesaan (Y) dan kondisi jalan tani (X), maka digunakan metode analisis Chi Kuadrat berdasarkan data yang telah di peroleh dari tabel 81 diatas. Hasil rekap tersebut kemudian dimasukkan pada tabel analisis Chi Kuadrat, yang dapat dilihat pada Tabel 82 sebagai berikut.

Tabel 82. Uji Chi Kuadrat

<div>X Y</div>		X		Σ	FH		X ²		Σ
		1	2		1	2	1	2	
I		2	3	4	5	6	7	8	9
Y	1	20	0	20	7.00	13.00	24.14	13.00	37.1429
	2	15	65	80	28.00	52.00	6.04	3.25	9.28571
Σ		35	65	100					
x ²									46.4286
db									1
α									0.05
x ² Tabel									3.84
Kesimpulan									Berpengaruh

Sumber: Hasil analisis tahun 2019

Keterangan:

Y : Pengembangan Wilayah Pedesaan

Y1 : Sedang

Y2 : Baik

X : Kondisi Jalan Tani

X1 : Baik

X2 : Sedang

X^2 : Chi kuadrat)

Fh : Frekuensi harapan

db : Derajat bebas

α : Alfa (taraf signifikan)

Σ : Jumlah

Berdasarkan hasil analisis dari Tabel 82 diatas diketahui bahwa X^2 hitung adalah 46,4, dengan taraf signifikan 0,05 serta derajat kebebasan (db) = (2-1) x (2-1) = 1, sehingga diperoleh X^2 tabel = 3,84, sehingga X^2 hitung lebih besar dibandingkan X^2 tabel maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Untuk mengukur atau mengetahui tingkat pengaruh kondisi jalan tani terhadap pengembangan wilayah pedesaan selanjutnya dilakukan uji kontingensi dimana:

$$C = \sqrt{\frac{X^2}{(N + X^2)}}$$

$$C = \sqrt{\frac{46,4^2}{(100 + 46,4^2)}}$$

= 0.56309, atau pengaruh sedang.

Sehingga dapat diketahui bahwa pengaruh antara kondisi jalan tani dan pengembangan wilayah pedesaan berada pada kategori sedang, sebab memiliki nilai uji kontingensi (C) = 0,56309 yang berarti memiliki tingkat hubungan atau pengaruh sedang.

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, ditetapkan bahwa pengaruh kondisi jalan tani terhadap pengembangan wilayah pedesaan memiliki tingkat hubungan atau pengaruh sedang yang berarti bahwa kondisi jalan tani memiliki pengaruh sedang dalam mendukung pengembangan wilayah pedesaan.

3. Infrastruktur pemenuhan dasar masyarakat

a. Penyediaan air bersih

1) Ketersediaan

Dari hasil kuisioner yang telah disebarakan kepada 100 responden di seluruh Kecamatan Latimojong, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dominan responden merasakan pengaruh ketersediaan penyediaan air bersih. Untuk lebih jelasnya mengenai pendapat responden, dilihat pada Tabel 83 sebagai berikut.

Tabel 83. Tabulasi Silang Data Responden

		Penyediaan Air Bersih Ketersediaan		Total
		Cukup	Terpenuhi	
1		2	3	4
Pengaruh Pengembangan Wilayah Pedesaan	Cukup	20	0	20
	Terpenuhi	77	3	80
Total		97	3	100

Sumber: Hasil survey 2019

Berdasarkan hasil tabulasi silang diatas mengenai data dari responden, selanjutnya untuk mengetahui hubungan antara

pengembangan wilayah pedesaan (Y) dan ketersediaan penyediaan air bersih (X), maka digunakan metode analisis Chi Kuadrat berdasarkan data yang telah di peroleh dari tabel 83 diatas. Hasil rekap tersebut kemudian dimasukkan pada tabel analisis Chi Kuadrat, yang dapat dilihat pada Tabel 84 sebagai berikut.

Tabel 84. Uji chi kuadrat

$\begin{matrix} X \\ Y \end{matrix}$		X		Σ	FH		X^2		Σ
		1	2		1	2	1	2	
I		2	3	4	5	6	7	8	9
Y	1	20	0	20	19.40	0.60	0.02	0.60	0.61856
	2	77	3	80	77.60	2.40	0.00	0.15	0.15464
Σ		97	3	100					
x^2									0.7732
db									1
α									0.05
x^2 Tabel									3.84
Kesimpulan									Berpengaruh

Sumber: Hasil analisis tahun 2019

Keterangan:

Y : Pengembangan Wilayah Pedesaan

Y1 : Cukup

Y2 : Terpenuhi

X : Ketersediaan Penyediaan Air Bersih

X1 : Cukup

X2 : Terpenuhi

X^2 : Chi kuadrat)

Fh : Frekuensi harapan

db : Derajat bebas

α : Alfa (taraf signifikan)

Σ : Jumlah

Berdasarkan hasil analisis dari Tabel 84 diatas diketahui bahwa X^2 hitung adalah 0,7 dengan taraf signifikan 0,05 serta derajat kebebasan $(db) = (2-1) \times (2-1) = 1$, sehingga diperoleh X^2 tabel = 3,84, sehingga X^2 hitung lebih besar dibandingkan X^2 tabel maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Untuk mengukur atau mengetahui tingkat pengaruh ketersediaan penyediaan air bersih terhadap pengembangan wilayah pedesaan selanjutnya dilakukan uji kontingensi dimana:

$$C = \sqrt{\frac{X^2}{(N + X^2)}}$$

$$C = \sqrt{\frac{0,7^2}{(100 + 0,7^2)}}$$

= 0.08759, atau pengaruh sangat lemah.

Dapat diketahui bahwa pengaruh antara ketersediaan penyediaan air bersih dan pengembangan wialayah berada pada kategori sangat lemah, sebab memiliki nilai uji kontingensi $(C) = 0,08759$ yang berarti memiliki tingkat hubungan atau pengaruh sangat lemah.

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, ditetapkan bahwa pengaruh ketersediaan penyediaan air bersih terhadap pengembangan wilayah pedesaan tingkat hubungan atau pengaruh sangat lemah yang berarti bahwa ketersediaan penyediaan air bersih memiliki pengaruh yang sangat lemah dalam mendukung pengembangan wialayah pedesaan.

2) Kondisi

Dari hasil kuisioner yang telah disebarakan kepada 100 responden di seluruh Kecamatan Latimojong, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dominan responden merasakan pengaruh kondisi penyediaan air bersih. Untuk lebih jelasnya mengenai pendapat responden, dapat dilihat pada Tabel 85 sebagai berikut.

Tabel 85. Tabulasi Silang Data Responden

		Penyediaan Air Bersih Kondisi			Total
		Buruk	Sedang	Baik	
<i>I</i>		2	3	4	5
Pengaruh Pengembangan Wilayah Pedesaan	Sedang	16	4	0	20
	Baik	0	65	15	80
Total		16	69	15	100

Sumber: Hasil survey 2019

Berdasarkan hasil tabulasi silang diatas mengenai data dari responden, selanjutnya untuk mengetahui hubungan antara pengembangan wilayah pedesaan (Y) dan kondisi penyediaan air bersih (X), maka digunakan metode analisis Chi Kuadrat berdasarkan data yang telah di peroleh dari Tabel 85 diatas. Hasil rekap tersebut kemudian dimasukkan pada tabel analisis Chi Kuadrat, yang dapat dilihat pada Tabel 86 sebagai berikut.

Tabel 86. Uji Chi Kuadrat

[illegible]

$\begin{matrix} X \\ Y \end{matrix}$	X			Σ	FH			X ²			Σ
	1	2	3		1	2	3	1	2	3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
x ² Tabel											7.82
Kesimpulan											Berpengaruh

Sumber: Hasil analisis tahun 2019

Keterangan:

Y : Pengembangan Wilayah Pedesaan

Y1 : Sedang

Y2 : Baik

X : Kondisi Penyediaan Air Bersih

X1 : Sedang

X2 : Baik

X² : Chi kuadrat)

Fh : Frekuensi harapan

db : Derajat bebas

α : Alfa (taraf signifikan)

Σ : Jumlah

Berdasarkan hasil analisis dari Tabel 86 diatas diketahui bahwa X² hitung adalah 16,6 dengan taraf signifikan 0,05 serta derajat kebebasan (db) = (3-1) x (2-1) = 2, sehingga diperoleh X² tabel = 7,82, sehingga X² hitung lebih besar dibandingkan X² tabel maka H0 ditolak dan H1 diterima. Untuk mengukur atau mengetahui tingkat pengaruh kondisi penyediaan air bersih terhadap pengembangan wilayah pedesaan selanjutnya dilakukan uji kontingensi dimana:

$$C = \sqrt{\frac{X^2}{(N + X^2)}}$$

$$C = \sqrt{\frac{16,6^2}{(100 + 16,6^2)}}$$

= 0.37796, atau pengaruh lemah.

Dapat diketahui bahwa pengaruh antara kondisi penyediaan air bersih dan pengembangan wilayah pedesaan berada pada kategori lemah, sebab memiliki nilai uji kontingensi (C) = 0,37796 yang berarti memiliki tingkat hubungan atau pengaruh lemah.

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, ditetapkan bahwa pengaruh kondisi penyediaan air bersih terhadap pengembangan wilayah pedesaan memiliki tingkat hubungan atau pengaruh lemah yang berarti bahwa kondisi penyediaan air bersih memiliki pengaruh lemah dalam mendukung pengembangan wilayah pedesaan.

b. Sanitasi

1) Ketersediaan

Dari hasil kuisioner yang telah disebarkan kepada 100 responden di seluruh Kecamatan Latimojong, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dominan responden merasakan pengaruh ketersediaan sanitasi. Untuk lebih jelasnya mengenai pendapat responden, dapat dilihat pada Tabel 87 sebagai berikut.

Tabel 87. Tabulasi Silang Data Responden

		Sanitasi Ketersediaan			Total
		Tidak	Cukup	Terpenuhi	
<i>l</i>		2	3	4	5
Pengaruh Pengembangan Wilayah Pedesaan	Cukup	20	0	0	20
	Terpenuhi	54	21	5	80
Total		74	21	5	100

Sumber: Hasil survey 2019

Berdasarkan hasil tabulasi silang diatas mengenai data dari responden, selanjutnya untuk mengetahui hubungan antara pengembangan wilayah (Y) dan ketersediaan sanitasi (X), maka digunakan metode analisis Chi Kuadrat berdasarkan data yang telah di peroleh dari tabel 87 diatas. Hasil rekap tersebut kemudian dimasukkan pada tabel analisis Chi Kuadrat, yang dapat dilihat pada tabel 88 sebagai berikut.

Tabel 88. Uji Chi Kuadrat

$\begin{matrix} X \\ Y \end{matrix}$		X			Σ	FH			X ²			Σ
		1	2	3		1	2	3	1	2	3	
I		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Y	1	20	0	0	20	14.80	4.20	1.00	1.83	4.20	1.00	7.02703
	2	54	21	5	80	59.20	16.80	4.00	0.46	1.05	0.25	1.75676
Σ		74	21	5	100							
x ²												8.78378
db												2
α												0.05
x ²												
Tabel												5.99
Kesimpulan												Berpengaruh

Sumber: Hasil analisis tahun 2019

Keterangan:

Y : Pengembangan Wilayah Pedesaan

Y1 : Cukup

Y2 : Terpenuhi

X : Ketersediaan Sanitasi

X1 : Tidak

X2 : Cukup

X3 : Terpenuhi

X^2 : Chi kuadrat

Fh : Frekuensi harapan

db : Derajat bebas

α : Alfa (taraf signifikan)

Σ : Jumlah

Berdasarkan hasil analisis dari tabel 88 diatas diketahui bahwa X^2 hitung adalah 8,7 dengan taraf signifikan 0,05 serta derajat kebebasan (db) = (3-1) x (2-1) = 2, sehingga diperoleh X^2 tabel = 5,99, sehingga X^2 hitung lebih besar dibandingkan X^2 tabel maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Untuk mengukur atau mengetahui tingkat pengaruh ketersediaan sanitasi terhadap pengembangan wilayah pedesaan selanjutnya dilakukan uji kontingensi dimana:

$$C = \sqrt{\frac{X^2}{(N + X^2)}}$$

$$C = \sqrt{\frac{8,7^2}{(100 + 8,7^2)}}$$

= 0.28416, atau pengaruh lemah.

Dapat diketahui bahwa pengaruh antara ketersediaan sanitasi dan pengembangan wilayah pedesaan berada pada kategori lemah, sebab memiliki nilai uji kontingensi (C) = 0,28416 yang berarti memiliki tingkat hubungan atau pengaruh lemah.

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, ditetapkan bahwa pengaruh ketersediaan sanitasi terhadap pengembangan wilayah pedesaan tingkat hubungan atau pengaruh lemah yang berarti bahwa ketersediaan sanitasi memiliki pengaruh lemah dalam mendukung pengembangan wilayah pedesaan.

2) Kondisi

Dari hasil kuisioner yang telah disebarakan kepada 100 responden di seluruh Kecamatan Latimojong, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dominan responden merasakan pengaruh kondisi sanitasi. Untuk lebih jelasnya mengenai pendapat responden, dapat dilihat pada Tabel 89 sebagai berikut.

Tabel 89. Tabulasi Silang Data Responden

		Sanitasi Kondisi			Total
		Buruk	Cukup	Terpenuhi	
1		2	3	4	5
Pengaruh Pengembangan Wilayah Pedesaan	Sedang	20	0	0	20
	Baik	11	63	6	80
Total		31	63	56	100

Sumber: Hasil survey 2019

Berdasarkan hasil tabulasi silang diatas mengenai data dari responden, selanjutnya untuk mengetahui hubungan antara pengembangan wilayah pedesaan (Y) dan kondisi sanitasi (X), maka digunakan metode analisis Chi Kuadrat berdasarkan data yang telah di

peroleh dari Tabel 89 diatas. Hasil rekap tersebut kemudian dimasukkan pada tabel analisis Chi Kuadrat, yang dapat dilihat pada Tabel 90 sebagai berikut.

Tabel 90. Uji Chi Kuadrat

X Y		X			Σ	FH			X ²			Σ
		1	2	3		1	2	3	1	2	3	
I		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Y	1	20	0	0	20	6.20	12.60	1.20	30.72	12.60	1.20	44.5161
	2	11	63	6	80	24.80	50.40	4.80	7.68	3.15	0.30	11.129
Σ		31	63	6	100							
x ²												55.6452
db												2
α												0.05
x ² Tabel												7.82
Kesimpulan												Berpengaruh

Sumber: Hasil analisis tahun 2019

Keterangan:

Y : Pengembangan Wilayah Pedesaan

Y1 : Sedang

Y2 : Baik

X : Kondisi Sanitasi

X1 : Buruk

X2 : Sedang

X3 : Baik

X² : Chi kuadrat)

Fh : Frekuensi harapan

db : Derajat bebas

α : Alfa (taraf signifikan)

Σ : Jumlah

Berdasarkan hasil analisis dari Tabel 90 diatas diketahui bahwa X^2 hitung adalah 55,6 dengan taraf signifikan 0,05 serta derajat kebebasan (db) = (3-1) x (2-1) = 2, sehingga diperoleh X^2 tabel = 5,99, sehingga X^2 hitung lebih besar dibandingkan X^2 tabel maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Untuk mengukur atau mengetahui tingkat pengaruh kondisi sanitasi terhadap pengembangan wilayah pedesaan selanjutnya dilakukan uji kontingensi dimana:

$$C = \sqrt{\frac{X^2}{(N + X^2)}}$$

$$C = \sqrt{\frac{55,6^2}{(100 + 55,6^2)}}$$

= 0.59792, atau pengaruh sedang.

Dapat diketahui bahwa pengaruh antara kondisi sanitasi dan pengembangan wilayah pedesaan berada pada kategori sedang, sebab memiliki nilai uji kontingensi (C) = 0,59792 yang berarti memiliki tingkat hubungan atau pengaruh sedang.

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, ditetapkan bahwa pengaruh kondisi sanitasi terhadap pengembangan wilayah pedesaan memiliki tingkat hubungan atau pengaruh sedang yang berarti bahwa kondisi sanitasi memiliki pengaruh sedang dalam mendukung pengembangan wilayah pedesaan.

c. Telekomunikasi

1) Ketersediaan

Dari hasil kuisioner yang telah disebarakan kepada 100 responden di seluruh Kecamatan Latimojong, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dominan responden kurang merasakan pengaruh ketersediaan telekomunikasi. Untuk lebih jelasnya mengenai pendapat responden, dapat dilihat pada tabel 91 sebagai berikut.

Tabel 91. Tabulasi Silang Data Responden

		Sanitasi Ketersediaan			Total
		Tidak	Cukup	Terpenuhi	
1		2	3	4	5
Pengaruh Pengembangan Wilayah Pedesaan	Cukup	12	5	3	20
	Terpenuhi	80	0	0	80
Total		92	5	3	100

Sumber: Hasil survey 2019

Berdasarkan hasil tabulasi silang diatas mengenai data dari responden, selanjutnya untuk mengetahui hubungan antara pengembangan wilayah (Y) dan ketersediaan telekomunikasi (X), maka digunakan metode analisis Chi Kuadrat berdasarkan data yang telah di peroleh dari tabel 91 diatas. Hasil rekap tersebut kemudian dimasukkan pada tabel analisis Chi Kuadrat, yang dapat dilihat pada tabel 92 sebagai berikut.

Tabel 92. Uji Chi Kuadrat

[illegible]

$\begin{matrix} X \\ Y \end{matrix}$	X			Σ	FH			X^2			Σ
	1	2	3		1	2	3	1	2	3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
α											0.05
χ^2 Tabel											7.82
Kesimpulan											Berpengaruh

Sumber: Hasil analisis tahun 2019

Keterangan:

Y : Pengembangan Wilayah Pedesaan

Y1 : Cukup

Y2 : Terpenuhi

X : Ketersediaan Telekomunikasi

X1 : Tidak

X2 : Cukup

X3 : Terpenuhi

X^2 : Chi kuadrat)

Fh : Frekuensi harapan

db : Derajat bebas

α : Alfa (taraf signifikan)

Σ : Jumlah

Berdasarkan hasil analisis dari Tabel 92 diatas diketahui bahwa X^2 hitung adalah 34,7 dengan taraf signifikan 0,05 serta derajat kebebasan (db) = (3-1) x (2-1) = 2, sehingga diperoleh X^2 tabel = 5,99, sehingga X^2 hitung lebih besar dibandingkan X^2 tabel maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Untuk mengukur atau mengetahui tingkat pengaruh

ketersediaan sanitasi terhadap pengembangan wilayah pedesaan selanjutnya dilakukan uji kontingensi dimana:

$$C = \sqrt{\frac{X^2}{(N + X^2)}}$$

$$C = \sqrt{\frac{34,7^2}{(100 + 34,7^2)}}$$

= 0.508, atau pengaruh sedang.

Dapat diketahui bahwa pengaruh antara ketersediaan telekomunikasi dan pengembangan wilayah pedesaan berada pada kategori sedang, sebab memiliki nilai uji kontingensi (C) = 0,508, yang berarti memiliki tingkat hubungan atau pengaruh sedang.

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, ditetapkan bahwa pengaruh ketersediaan telekomunikasi terhadap pengembangan wilayah pedesaan tingkat hubungan atau pengaruh sedang yang berarti bahwa ketersediaan telekomunikasi memiliki pengaruh sedang dalam mendukung pengembangan wilayah pedesaan.

2) Kondisi

Dari hasil kuisioner yang telah disebarkan kepada 100 responden di seluruh Kecamatan Latimojong, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dominan responden merasakan pengaruh kondisi telekomunikasi. Untuk lebih jelasnya mengenai pendapat responden, dapat dilihat pada tabel 93 sebagai berikut.

Tabel 93. Tabulasi Silang Data Responden

		Telekomunikasi Kondisi		Total
		Buruk	Sedang	
1		2	3	4
Pengaruh Pengembangan Wilayah Pedesaan	Sedang	17	3	20
	Baik	79	1	80
Total		96	4	100

Sumber: Hasil survey 2019

Berdasarkan hasil tabulasi silang diatas mengenai data dari responden, selanjutnya untuk mengetahui hubungan antara pengembangan wilayah pedesaan (Y) dan kondisi telekomunikasi (X), maka digunakan metode analisis Chi Kuadrat berdasarkan data yang telah di peroleh dari tabel 93 diatas. Hasil rekap tersebut kemudian dimasukkan pada tabel analisis Chi Kuadrat, yang dapat dilihat pada tabel 94 sebagai berikut.

Tabel 94. Uji Chi Kuadrat

X Y	X		Σ	FH		X^2		Σ
	1	2		1	2	1	2	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Y	1	17	3	20	19.20	0.80	0.25	6.30208
	2	79	1	80	76.80	3.20	0.06	1.57552
Σ		96	4	100				
x^2								7.8776
db								1
α								0.05
x^2 Tabel								3.84
Kesimpulan								Berpengaruh

Sumber: Hasil analisis tahun 2019

Keterangan:

Y : Pengembangan Wilayah Pedesaan

Y1 : Sedang

Y2 : Baik

X : Kondisi Telekomunikasi

X1 : Buruk

X2 : Sedang

X^2 : Chi kuadrat)

Fh : Frekuensi harapan

db : Derajat bebas

α : Alfa (taraf signifikan)

Σ : Jumlah

Berdasarkan hasil analisis dari Tabel 94 diatas diketahui bahwa X^2 hitung adalah 7,8 dengan taraf signifikan 0,05 serta derajat kebebasan (db) = (2-1) x (2-1) = 1, sehingga diperoleh X^2 tabel = 3,84, sehingga X^2 hitung lebih besar dibandingkan X^2 tabel maka H0 ditolak dan H1 diterima. Untuk mengukur atau mengetahui tingkat pengaruh kondisi telekomunikasi terhadap pengembangan wilayah pedesaan selanjutnya dilakukan uji kontingensi dimana:

$$C = \sqrt{\frac{X^2}{(N + X^2)}}$$

$$C = \sqrt{\frac{7,8^2}{(100 + 7,8^2)}}$$

$$= 0.27023, \text{ atau pengaruh lemah.}$$

Dapat diketahui bahwa pengaruh antara kondisi telekomunikasi dan pengembangan wilayah pedesaan berada pada kategori lemah, sebab

memiliki nilai uji kontingensi (C) = 0,27023 yang berarti memiliki tingkat hubungan atau pengaruh lemah.

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, ditetapkan bahwa pengaruh kondisi telekomunikasi terhadap pengembangan wilayah pedesaan memiliki tingkat hubungan atau pengaruh lemah dalam mendukung pengembangan wilayah pedesaan.

d. Jaringan listrik

1) Ketersediaan

Dari hasil kuisioner yang telah disebarakan kepada 105 responden di seluruh Kecamatan Latimojong, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dominan responden merasakan pengaruh ketersediaan jaringan listrik. Untuk lebih jelasnya mengenai pendapat responden, dapat dilihat pada Tabel 95 sebagai berikut.

Tabel 95. Tabulasi Silang Data Responden

		Jaringan Listrik Ketersediaan		Total
		Cukup	Terpenuhi	
Pengaruh Pengembangan Wilayah Pedesaan	Cukup	10	10	20
	Terpenuhi	0	80	80
Total		10	90	100

Sumber: Hasil survey 2019

Berdasarkan hasil tabulasi silang diatas mengenai data dari responden, selanjutnya untuk mengetahui hubungan antara pengembangan wilayah (Y) dan ketersediaan jaringan listrik (X), maka digunakan metode analisis Chi Kuadrat berdasarkan data yang telah di peroleh dari Tabel 95 diatas. Hasil rekap tersebut kemudian dimasukkan

pada tabel analisis Chi Kuadrat, yang dapat dilihat pada tabel 96 sebagai berikut.

Tabel 96. Uji Chi Kuadrat

$\begin{matrix} X \\ Y \end{matrix}$	X		Σ	FH		X^2		Σ
	1	2		1	2	1	2	
<i>l</i>	2	3	4	5	6	7	8	9
Y	1	10	10	20	2.00	18.00	32.00	35.5556
	2	0	80	80	8.00	72.00	8.00	8.88889
Σ		10	90	100				
x^2								44.4444
db								1
α								0.05
x^2 Tabel								3.84
Kesimpulan								Berpengaruh

Sumber: Hasil analisis tahun 2019

Keterangan:

Y : Pengembangan Wilayah Pedesaan

Y1 : Cukup

Y2 : Terpenuhi

X : Ketersediaan Jaringan Listrik

X1 : Cukup

X2 : Terpenuhi

X^2 : Chi kuadrat)

Fh : Frekuensi harapan

db : Derajat bebas

α : Alfa (taraf signifikan)

Σ : Jumlah

Berdasarkan hasil analisis dari tabel 96 diatas diketahui bahwa X^2 hitung adalah 44,4 dengan taraf signifikan 0,05 serta derajat kebebasan

(db) = (2-1) x (2-1) = 1, sehingga diperoleh X^2 tabel = 3,84, sehingga X^2 hitung lebih besar dibandingkan X^2 tabel maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Untuk mengukur atau mengetahui tingkat pengaruh ketersediaan jaringan listrik terhadap pengembangan wilayah pedesaan selanjutnya dilakukan uji kontingensi dimana:

$$C = \sqrt{\frac{X^2}{(N + X^2)}}$$

$$C = \sqrt{\frac{44,4^2}{(100 + 44,4^2)}}$$

$$= 0.5547, \text{ atau pengaruh sedang.}$$

Dapat diketahui bahwa pengaruh antara ketersediaan jaringan listrik dan pengembangan wilayah pedesaan berada pada kategori sedang, sebab memiliki nilai uji kontingensi (C) = 0,5547 yang berarti memiliki tingkat hubungan atau pengaruh sedang.

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, ditetapkan bahwa pengaruh ketersediaan jaringan listrik terhadap pengembangan wilayah pedesaan tingkat hubungan atau pengaruh sedang yang berarti bahwa ketersediaan jaringan listrik memiliki pengaruh sedang dalam mendukung pengembangan wilayah pedesaan.

2) Kondisi

Dari hasil kuisioner yang telah disebarkan kepada 100 responden di seluruh Kecamatan Latimojong, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa

dominan responden merasakan pengaruh kondisi jaringan listrik. Untuk lebih jelasnya mengenai pendapat responden, dapat dilihat pada Tabel 97 sebagai berikut.

Tabel 97. Tabulasi Silang Data Responden

		Jaringan Telekomunikasi Kondisi		Total
		Sedang	Baik	
<i>I</i>		2	3	4
Pengaruh Pengembangan Wilayah Pedesaan	Sedang	10	10	20
	Baik	0	80	80
Total		10	90	100

Sumber: Hasil survey 2019

Berdasarkan hasil tabulasi silang diatas mengenai data dari responden, selanjutnya untuk mengetahui hubungan antara pengembangan wilayah pedesaan (Y) dan kondisi jaringan listrik (X), maka digunakan metode analisis Chi Kuadrat berdasarkan data yang telah di peroleh dari Tabel 97 diatas. Hasil rekap tersebut kemudian dimasukkan pada tabel analisis Chi Kuadrat, yang dapat dilihat pada Tabel 98 sebagai berikut.

Tabel 98. Uji Chi Kuadrat

<div>X Y</div>		X		Σ	FH		X ²		Σ
		1	2		1	2	1	2	
I		2	3	4	5	6	7	8	9
Y	1	5	15	20	1.00	19.00	16.00	0.84	16.8421
	2	0	80	80	4.00	76.00	4.00	0.21	4.21053
Σ		5	95	100					
x ²									21.0526
db									1
α									0.05
x ² Tabel									3.84
Kesimpulan									Berpengaruh

Sumber: Hasil analisis tahun 2019

Keterangan:

Y : Pengembangan Wilayah Pedesaan

Y1 : Sedang

Y2 : Baik

X : Kondisi Jaringan Listrik

X1 : Sedang

X2 : Baik

X^2 : Chi kuadrat)

Fh : Frekuensi harapan

db : Derajat bebas

α : Alfa (taraf signifikan)

Σ : Jumlah

Berdasarkan hasil analisis dari Tabel 98 diatas diketahui bahwa X^2 hitung adalah 21,0 dengan taraf signifikan 0,05 serta derajat kebebasan (db) = (2-1) x (2-1) = 1, sehingga diperoleh X^2 tabel = 3,84, sehingga X^2 hitung lebih besar dibandingkan X^2 tabel maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Untuk mengukur atau mengetahui tingkat pengaruh kondisi jaringan listrik terhadap pengembangan wilayah pedesaan selanjutnya dilakukan uji kontingensi dimana:

$$C = \sqrt{\frac{X^2}{(N + X^2)}}$$

$$C = \sqrt{\frac{21,0^2}{(100 + 21,0^2)}}$$

= 0.41703, atau pengaruh sedang.

Dapat diketahui bahwa pengaruh antara kondisi jaringan listrik dan pengembangan wilayah pedesaan berada pada kategori sedang, sebab memiliki nilai uji kontingensi (C) = 0,41703 yang berarti memiliki tingkat hubungan atau pengaruh sedang.

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, ditetapkan bahwa pengaruh kondisi jaringan listrik terhadap pengembangan wilayah pedesaan memiliki tingkat hubungan atau pengaruh sedang yang berarti bahwa kondisi jaringan listrik memiliki pengaruh sedang dalam mendukung pengembangan wilayah pedesaan.

Dari hasil analisis pengaruh ketersediaan dan kondisi infrastruktur dalam mendukung pengembangan wilayah pedesaan dapat diketahui bahwa variabel infrastruktur pendukung aksesibilitas dominan berpengaruh, hal tersebut dikarenakan adanya peningkatan pembangunan dan perumahan yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat setempat. Mengenai skala nilai hasil uji kontingensi, dapat dilihat pada Tabel 99 sebagai berikut.

Tabel 99. Rekap Hasil Uji Kontingensi Variabel

Variabel	Indikator	X ²	Hasil	C	Pengaruh
1	2	3	4	5	6
X1 : Infrastruktur Pendukung Aksesibilitas					
Jaringan Jalan	Ketersediaan	105	Berpengaruh	0.45 099	Sedang

Variabel	Indikator	X ²	Hasil	C	Pengaruh
1	2	3	4	5	6
	Kondisi	105	Berpengaruh	0.56 592	Sedang
Jembatan	Ketersediaan	89,6	Berpengaruh	0.67 107	Kuat
	Kondisi	79,5	Berpengaruh	0.64 327	Kuat
X2 : Infrastruktur Pendukung Pertanian					
Irigasi Perdesaan	Ketersediaan	10,2	Berpengaruh	0.27 735	Lemah
	Kondisi	8,2	Berpengaruh	0.24 963	Lemah
Jalan Tani	Ketersediaan	79,5	Berpengaruh	0.64 327	Kuat
	Kondisi	105	Berpengaruh	0.56 309	Sedang
X3 : Infrastruktur Pemenuhan Dasar Masyarakat					
Penyediaan Air Bersih	Ketersediaan	13,7	Berpengaruh	0.08 759	Sangat Lemah
	Kondisi	23,9	Berpengaruh	0.37 796	Lemah
Sanitasi	Ketersediaan	82,3	Berpengaruh	0.28 416	Lemah
	Kondisi	82,3	Berpengaruh	0.59 792	Sedang
Telekomunikasi	Ketersediaan	71,5	Berpengaruh	0.50 8	Sedang
	Kondisi	65,6	Berpengaruh	0.27 023	Lemah
Jaringan Listrik	Ketersediaan	56	Berpengaruh	0.55 47	Sedang
	Kondisi	35,3	Berpengaruh	0.41 703	Sedang

Sumber: Hasil analisis Tahun 2019

Berdasarkan Tabel 99 dapat diketahui bahwa variabel infrastruktur pendukung aksesibilitas berupa jembatan dan infrastruktur pendukung pertanian berupa jalan tani memiliki nilai X² yang berpengaruh kuat, sedangkan hasil koefisien kontingensi terlemah di antara variabel lain adalah infrastruktur kebutuhan masyarakat yang dimana pada sub variabel air bersih memiliki pengaruh sangat lemah

dalam mendukung pengembangan wilayah pedesaan di Kecamatan Latimojong.

G. Keterkaitan Pembangunan Infrastruktur Dalam Perspektif Islam

Keterkaitan ilmu pengetahuan agama Islam dengan ilmu perencanaan wilayah dan kota yaitu mempelajari tentang cara merencanakan serta membangun suatu wilayah dan kota dengan memperhatikan berbagai pertimbangan yang terkait dengan pembangunan baik secara fisik, sosial, ekonomi dan lingkungan. Salah satu proses perencanaan dan pembangunan dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan umat Islam berupa fasilitas atau infrastruktur dalam memperlancar kegiatan sehari-hari umat Islam. Dalam pengembangan wilayah pedesaan tentunya juga memiliki infrastruktur untuk menunjang segala kegiatan yang ada dalam wilayah tersebut.

Allah sebagai pencipta bumi dan seluruh isinya, harus kita yakini bahwa segala jenis bangunan yang ada di muka bumi ini diciptakan oleh Allah karena manusia yang mendirikan bangunan diciptakan oleh Allah dengan akal pikiran sehingga mampu membangun atau mendirikan segala jenis bangunan. Selain itu, harus kita yakini pula bahwa segala sesuatu yang terjadi di bumi adalah karena dengan izin Allah. Allah menciptakan infrastruktur agar manusia dapat melaksanakan kegiatan sehari-harinya dengan lancar. Dalam sebuah hadis

menjelaskan tentang bagaimana pentingnya pembangunan dalam suatu wilayah/daerah:

حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ رَضِيَ
 اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ أَحْبَلًا فَيَأْخُذَ حُرْمَةً مِنْ
 حَطَبٍ فَيَبِيعَ فَإِكَفَّ اللَّهُ بِهِ وَجْهَهُ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ أُعْطِيَ أَمْ مُنِعَ (أَخْرَجَهُ
 الْبُخَارِيُّ)

Terjemahnya:

Diberitakan kepada kami Mua'lla ibn Asad, diberitakan kepada kami Wuhaib, dari Hisyam, dari ayahnya, dari az-Zubair ibn al-Awwam r.a, dari Nabi Saw. bersabda: “Sungguh alangkah baik jika salah seorang diantara kalian (umatku) yang mencari seikat kayu bakar dan mengikatnya kemudian memikulnya dan menjualnya dengan membuka wajah (tanpa rasa malu) karena Allah, daripada meminta-minta kepada orang lain baik diberi maupun tidak. (HR. Al-Bukhari).

Hadis diatas menjelaskan bahwa salah satu pilar dalam pembangunan adalah pembangunan yang bertumpu pada pembangunan manusia yang semuanya dalam kerangka ibadah kepada Allah Swt. Hal ini mempertegas bahwa kemalasan merupakan pangkal dari kemiskinan. Apalagi banyak hadis yang menjelaskan bahwa Rasulullah Saw. sendiri sering berdoa agar terlindung dari sifat malas dan kemiskinan. Malas, miskin, dan kebodohan akan menjerumuskan manusia pada kehinaan. Jadi Pembangunan suatu wilayah harus dimulai dari membangun individu-individu yang menempati wilayah tersebut, bukan hanya dengan bangunan-bangunan fisik saja yang menghiasi wilayah tersebut. Bagaimana mungkin membangun suatu gedung yang tinggi dan megah kalau fondasinya lemah? Kemudian bagaimana memulai pembangunan tersebut? Maka dalam hal ini, ada beberapa faktor ekonomi yang mempengaruhi pembangunan, seperti yang tersirat dari hadis di atas, yaitu terdiri dari faktor sumber daya manusia, sumber daya alam, pembentukan modal, dan kewirausahaan serta teknologi. Kebijakan

infrastruktur dapat dijadikan strategi induk oleh pemerintah, yakni menjadi lokomotif pergerakan perekonomian.

Terkait dengan ketersediaan infrastruktur, keberadaan infrastruktur akan terus baik jika manusia menggunakannya dengan cara yang baik pula tanpa merusaknya. Namun jika manusia tidak memelihara infrastruktur tersebut maka ketersediaan infrastruktur tersebut menjadi tidak baik. Oleh karena itu, agar ketersediaan infrastruktur terus membaik maka manusia dianjurkan untuk memeliharanya dan tidak melakukan kerusakan di muka bumi sesuai firman Allah dalam QS Al-A'raf /7: 56;

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik (Kementrian Agama RI, 2013: 158).

Menurut Quraish Shihab (2002: 123) Ayat ini melarang pengrusakan di bumi. Pengrusakan adalah salah satu bentuk pelampauan batas, karena itu ayat ini menyatakan; *dan janganlah kamu membuat kerusakan di bumi, sesudah memperbaikannya yang dilakukan oleh Allah dan atau siapapun dan berdoalah serta beribadahlah kepada-Nya dalam keadaan takut sehingga kamu khusyu', dan lebih terdorong untuk mentaati-Nya dan dalam keadaan penuh harapan terhadap anugerah-Nya, termasuk pengabulan do'a kamu. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada al-muhsinin*, yakni orang-orang yang berbuat baik.

Alam raya telah diciptakan Allah SWT dalam keadaan yang sangat harmonis, serasi, dan memenuhi kebutuhan makhluk. Allah SWT telah menjadikannya baik, bahkan memerintahkan hamba-hamba-Nya untuk memperbaikinya.

Salah satu bentuk perbaikan yang dilakukan Allah SWT adalah dengan mengutus para nabi untuk meluruskan dan memperbaiki kehidupan yang kacau dalam masyarakat. Siapa yang tidak menyambut kedatangan rasul, atau menghambat misi mereka, maka dia telah melakukan salah satu bentuk pengrusakan di bumi.

Merusak setelah diperbaiki jauh lebih buruk daripada merusaknya sebelum diperbaiki, atau pada saat dia buruk. Karena itu, ayat ini secara tegas menggaris bawahi larangan tersebut, walaupun tentunya memperparah kerusakan atau merusak yang baik juga amat tercela.

Kemudian Rasulullah saw. Bersabda terkait kerusakan akibat perbuatan manusia:

عَنْ أَبِي عَمْرٍ وَبْنِ جُبَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص): مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجْرِهُمْ شَيْءٌ. وَمَنْ سَنَّ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَ وِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ (رواه مسلم)

Artinya:

Dari Abi Amr Ibnu Jubair Ibnu Abdillah, ia berkata, “Rasulullah bersabda, ”Barang siapa yang yang berbuat/prakarsa yang baik dalam Islam, maka ia akan memperoleh pahala dari perbuatan/ prakarsa itu dan pahala dari orang yang melaksanakan atau menirunya. Dan barang siapa berprakarsa yang jelek, maka ia akan mendapatkan dosa dari prakarsanya itu dan dosa dari orang-orang yang mempraktikkan prakarsanya itu tanpa mengurangi dosa yang menirunya. (HR. Muslim)

Rasulullah saw. bersabda, “Barang siapa yang memprakarsai hal baik dalam Islam. Dan barang siapa yang memprakarsai hal buruk dalam Islam”. Hadits ini memberikan beberapa inti sari, yaitu;

1. Anjuran untuk senantiasa memprakarsai hal-hal baru yang positif-konstruktif (hasanah) dan mengharamkan hal-hal baru yang negative destruktif (sayyi'ah).
2. Orang yang memprakarsai hal-hal positif-konstruktif akan mendapatkan pahala setiap orang yang melakukan hal positif itu sampai hari kiamat, dan orang yang memprakarsai hal-hal negatif akan mendapatkan dosa setiap orang yang melakukan hal negatif itu sampai hari kiamat.
3. Orang yang mengajak kepada kebaikan akan mendapatkan pahala seperti pahala para pengikutnya. Begitu juga sebaliknya; orang yang mengajak kepada kesesatan ia akan memikul dosa seperti dosa para pengikutnya; baik kebaikan atau kesesatan itu dia sekaligus yang akan meneruskan prakarsa orang lain saja. Dalam hal ini baik itu berupa pengajaran ilmu, ibadah, bahasa, atau bidang lainnya.

Sabda Nabi saw, “...lalu dilakukan setelahnya...” artinya, jika kesesatan yang ia prakarsai itu diikuti oleh orang lain baik ketika dia masih hidup ataupun dia sudah meninggal dunia. Wallahu A'lam. Hadits di atas menjelaskan bahwa siapa saja yang memprakarsai suatu perbuatan yang baik, menurunkan suatu teori, metode, atau cara yang baik kemudian ditiru dan dilaksanakan oleh orang lain, maka ia akan memperoleh pahala hasil prakarsa dan penemuannya itu serta pahala yang terus mengalir dari pahala-pahala orang yang menirunya dan

melaksanakannya dengan tanpa mengurangi pahala-pahala orang yang mengikutinya itu. Contohnya orang yang mencari lahan pertanian dengan cara membakar hutan, sehingga hutan menjadi gundul dan rusak, lalu perbuatannya itu ditiru orang lain, maka ia akan mendapat dua dosa dari perbuatannya sendiri dan dosa dari orang-orang yang mengikutinya.

Begitu juga sebaliknya, orang yang memprakarsai atau berbuat kejahatan, ia akan mendapat dua dosa dari perbuatan dirinya dan dari dosa orang yang menirunya.

Kebanyakan manusia yang hidup di jaman sekarang ini, menjadikan barometer dalam menilai hal-hal yang terjadi di sekitarnya dengan perkaraperkara lahir yang nampak dalam pandangan mereka, sebagai akibat dari kuatnya dominasi hawa nafsu dan kecintaan terhadap dunia dalam diri mereka.

Mereka lalai dari memahami hakekat semua kejadian tersebut, karena mereka tidak memiliki keyakinan yang kokoh terhadap perkara-perkara yang gaib (tidak nampak) dan lupa pada kehidupan abadi di akhirat nanti.

Kebanyakan dari umat manusia tidak sadar akan pengrusakan yang dilakukannya. Selanjutnya Allah menerangkannya sebagaimana firman-Nya dalam QS Al-Baqarah/2: 11-12;

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ
أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ

Terjemahannya:

Dan bila dikatakan kepada mereka: Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, mereka menjawab: “Sesungguhnya hanya kami orang-orang mushlih. “Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang

benarbenar merusak, tapi mereka tidak menyadari (Kementrian Agama RI, 2013: 4).

Dalam Tafsir Al-Misbah Quraish Shihab (2002: 125) menjelaskan bahwa keburukan mereka tidak terbatas pada kebohongan dan penipuan, tetapi ada yang lain, yaitu kepicikan pandangan dan pengakuan yang bukan pada tempatnya sehingga bila dikatakan yakni ditegur kepada mereka: Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, mereka menjawab; Sesungguhnya hanya kami - bukan selain kami – orang-orang mushlih, yakni yang selalu melakukan perbaikan. Ucapan mereka dibantah, Tidak! Sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang benar-benar merusak, tetapi mereka tidak menyadari.

Pengrusakan di bumi adalah aktivitas yang mengakibatkan sesuatu yang memenuhi nilai-nilainya dan atau berfungsi dengan baik serta bermanfaat menjadi kehilangan sebagian atau seluruh nilainya sehingga tidak atau berkurang fungsi dan manfaatnya.

Seseorang dituntut, paling tidak menjadi saleh, yakni memelihara nilai-nilai sesuatu sehingga kondisinya tetap tidak berubah sebagaimana adanya, dan dengan demikian sesuatu itu tetap berfungsi dengan baik dan bermanfaat. Seorang mushlih adalah siapa yang menemukan sesuatu yang hilang atau berkurang nilainya, tidak atau kurang berfungsi dan bermanfaat, lalu melakukan aktivitas (memperbaiki) sehingga yang kurang atau hilang itu dapat menyatu kembali dengan sesuatu itu. Yang lebih baik dari itu adalah siapa yang menemukan sesuatu yang telah bermanfaat dan berfungsi dengan baik, lalu ia melakukan aktivitas yang melahirkan nilai tambah bagi sesuatu itu sehingga kualitas dan manfaatnya lebih tinggi dari pada semula. Orang-orang munafik menduga diri mereka mencapai peringkat ini.

Ayat di atas menggambarkan bahwa mereka adalah orang-orang yang benar-benar perusak. Pengrusakan tersebut tentu saja banyak dan berulang-ulang karena kalau tidak, mereka tentu tidak dinamai perusak. Pengrusakan yang mereka lakukan itu tercermin antara lain adalah terhadap diri mereka sendiri yang enggan berobat sehingga semakin parah penyakit yang mereka derita. Selanjutnya, pengrusakan kepada keluarga dan anak-anak mereka karena keburukan tersebut mereka tularkan melalui peneladanan sifat-sifat buruk itu. Lebih lanjut pengrusakan kepada masyarakat dengan ulah mereka menghalangi orang lain melakukan kebajikan antara lain dengan menyebarkan isu-isu negative, menanamkan kebencian dan perpecahan dalam masyarakat. Agaknya itu sebabnya nasihat yang ditujukan kepada mereka menyatakan Jangan membuat kerusakan di bumi yakni secara jelas menyebut kata di bumi, bukan sekedar melarang melakukan pengrusakan. Yakni dengan penyebutan kata tersebut tercermin betapa luas dampak keburukan itu sehingga kalau dibiarkan akan menyebar ke seluruh persada bumi. Ia tidak hanya akan menyentuh manusia, tetapi juga semua lingkungan hidup.

Berdasarkan penjelasan ayat dan hadits di atas, dapat diambil kesimpulan terkait tingkat ketersediaan infrastruktur bahwa Allah SWT telah mengutus pemimpin untuk membuat kehidupan di muka bumi berjalan lancar, salah satunya dengan cara membangun infrastruktur agar segala aktivitas manusia berjalan dengan lancar. Seperti yang terjadi pada lokasi penelitian, Allah telah memberikan nikmat dan melimpahkan sumber daya alam yang melimpah, sehingga Kecamatan Latimojong khususnya wilayah pedesaan dapat lebih berkembang.

Selain itu, seperti yang di ketahui bahwa ketersediaan infrastruktur akan baik jika manusia yang beraktivitas di dalamnya dapat menjaga dan memelihara infrastruktur tersebut tanpa melakukan pengrusakan.



BAB V

PENUTUP

A. *Kesimpulan*

Berdasarkan permasalahan dan hasil pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Ketersediaan dan kondisi Infrastruktur:

Secara umum dapat disimpulkan bahwa ketersediaan dan kondisi infrastruktur di Kecamatan Latimojong dalam mendukung pengembangan wilayah pedesaan sudah berada pada kategori Terpenuhi/Baik 5 (lima) dengan interval skor 75%-100%.

2. Pengaruh ketersediaan dan kondisi infrastruktur terhadap pengembangan wilayah:

- a. Infrastruktur pendukung aksesibilitas berupa jaringan jalan dan jembatan mendapatkan hasil sedang karena ketersediaan infrastruktur jaringan jalan dalam kategori cukup terpenuhi dan jembatan dalam kategori terpenuhi dengan nilai pengaruh jaringan jalan = 0.45099 (sedang) dan jembatan = 0.67107 (kuat), sedangkan untuk kondisi jaringan jalan sedang dan jembatan baik dengan nilai pengaruh jaringan jalan = 0.56592 (sedang) dan jembatan = 0.64327 (kuat), sehingga pengaruh infrastruktur sedang terhadap pengembangan wilayah pedesaan di Kecamatan Latimojong.
- b. Infrastruktur pendukung pertanian berupa irigasi pedesaan dan jalan tani mendapatkan hasil sedang karena pengaruh ketersediaan dan kondisi

infrastruktur dalam kategori yang cukup terpenuhi dengan nilai pengaruh ketersediaan irigasi pedesaan = 0.27735 (lemah) dan jalan tani = 0.64327 (kuat), sedangkan nilai pengaruh untuk kondisi irigasi pedesaan = 0.24963 (lemah) dan jalan tani = 0.56309 (sedang) sehingga dapat disimpulkan pengaruh infrastruktur sedang terhadap pengembangan wilayah pedesaan di Kecamatan Latimojong.

- c. Infrastruktur pemenuhan dasar masyarakat berupa air bersih, sanitasi, telekomunikasi dan jaringan listrik mendapatkan hasil sedang karena pengaruh ketersediaan dan kondisi infrastruktur dalam kategori cukup terpenuhi dengan nilai pengaruh ketersediaan air bersih = 0.08759 (sangat lemah), sanitasi = 0.28416 (lemah), telekomunikasi = 0.508 (sedang), jaringan listrik = 0.5547 (Sedang), sedangkan nilai pengaruh untuk kondisi air bersih = 0.37796 (lemah), sanitasi = 0.59792 (sedang), telekomunikasi = 0.27023 (lemah), jaringan listrik = 0.41703 (sedang) sehingga dapat disimpulkan pengaruh infrastruktur sedang dalam mendukung pengembangan wilayah pedesaan di Kecamatan Latimojong.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka disarankan sebagai berikut:

1. Pengendalian dan pengawasan terhadap ketersediaan infrastruktur, serta perlu ditingkatkan dengan melibatkan stakeholder.
2. Perlu adanya peningkatan pembangunan termasuk pemeliharaan rutin dan priodik dilakukan secara terus menerus oleh pihak terkait.

3. Diharapkan pemerintah dan masyarakat mempertahankan potensi wilayah pedesaan seperti lahan pertanian sehingga dapat meningkatkan pembangunan dan perbaikan infrastruktur pedesaan dalam meningkatkan pengembangan wilayah pedesaan.
4. Pemerintah desa serta masyarakat memasukkan kedalam program kerja tahunan untuk infrastruktur yang belum terpenuhi.



DAFTAR PUSTAKA

- Asnudin, A. (2009). pembangunan infrastruktur perdesaan dengan melibatkan masyarakat setempat. *jurnal SMARTek*, 292.
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Badan Pusat Statistik *Kabupaten Luwu dalam angka. (2018)*
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu. *Kecamatan Bupon dalam angka. (2017)*
- Cakrawijaya, A. M., Riyanto, B., & Nuroji. (2014). Evaluasi program Pembangunan infrastruktur perdesaan di desa wonokerto, kecamatan turi, kabupaten sleman, *Jurnal perencanaan wilayah dan kota*, 141.
- Departemen PU 2008, *Pedoman Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan*
- Erna Rustiadi, Sunsun Saefulhakim dan Dyah R. Panuju, 2011, *Perencanaan dan Pengembangan Wilayah, Edisi Kedua*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.
- Kabul Mahi, M. A. (2016). *Pengembangan Wilayah*. jakarta.
- Mut'ali, Luthfi. (2015). *Teknik Analisis Regional*. yogyakarta.
- Mut'ali, Luthfi (2016). *Pengembangan Wilayah Perdesaan*. Yogyakarta.
- Margono, S. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rienaka Cipta.
- NSS Prapti, dkk (2015). Analiksis dampak pembangunan infrastruktur jalan terhadap pertumbuhan usaha ekonominrakyat di kota semarang. *Dinamika Sosbud*, 84.
- Pedoman Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (2016).*
- Peraturan Daerah Kabupaten Luwu No 53 tahun 2011. tentang *Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu tahun 2011-2031*.
- Permendagri nomor 12 tahun 2007 tentang pedoman dan penyusunan tipologi desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005.
- Permen PU Nomor 01/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- Permen PU Tentang Standar Pelayanan Minimal Tahun 2014.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum RI No.13/PRT/M/2011 tentang kriteria jalan.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum RI No.32/PRT/M/2007 tantang kriteria irigasi.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum RI No.33/PRT/M/2016 tentang kriteria jembatan.

Roscoe, 1975, dikutip dari Uma Sekaran, 2006, *Metode Penelitian Bisnis*, Salemba Empat, Jakarta.

Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Vol. I-XV. Jakarta: Lentera Hati, 2011.

Sugiharto, 2006, Pembangunan dan Pengembangan Wilayah, USU Pres, Medan.

Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta

SNI 03-1733-2004 Tentang Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan

SNI 2398-2017 tentang Tata Cara Perencanaan Tangki Septik

Standar Pelayanan Minimal PR/PP/PU No.53/KPTS/M/2001

Tarigan, R, 2004, Perencanaan Pembangunan Wilayah, Bumi Aksara Jakarta.

Tarigan, Robinson, 2008, *Perencanaan Pembangunan Wilayah*, Bumi Aksara, Jakarta.

Yayuk dan Mangku Pirnomop. 2003. *Sosiologi Pedesaan*. Malang. Pustaka Utama.

Yonatan, dkk (2014). Implementasi pembangunan infrastruktur dalam menunjang kelancaran pelayanan pada masyarakat di kecamatan mentarang kabupaten malinau. *Jurnal administrative reform*, 541.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Sitti Faisah A Lahir di Pinrang tanggal 16 Juli tahun 1995, merupakan anak empat dari empat bersaudara dari pasangan Ayahanda **Arsyad Tajangi** dan Ibunda **Suriati** yang berasal dari Pinrang yang tinggal dan menetap di Luwu. Dengan riwayat pendidikan yakni sekolah dasar di SD Negeri 59 Noling pada tahun 2001-2007, lalu setelah itu mengambil pendidikan sekolah menengah pertama di MTs Al-Furqan Noling pada tahun 2007-2010, dan sekolah menengah atas di SMA YPN Noling pada tahun 2010-2013. Kemudian mendapat kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar melalui penerimaan jalur Ujian Masuk Mandiri (UMM) dan tercatat sebagai Alumni Mahasiswa Program Studi Sarjana (S1) pada Jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar setelah berhasil menyelesaikan Bangku kuliahnya selama 4 tahun 6 bulan.